

Hibah Penulisan Buku ajar ber ISBN
Tahun Anggaran 2024

TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK

Dari Klasik ke Modern

Maryam Jamilah

Silvi Cory

Departemen Hubungan Internasional

Universitas Andalas

Society of Visual Informatics (SOTVI)

Transformasi Pemikiran Ekonomi Politik: Dari Klasik ke Modern

Transformasi Pemikiran Ekonomi Politik: Dari Klasik ke Modern

Penulis:

Maryam Jamilah, Silvi Cory

Desain Sampul:

Taufik Gusman

ISBN:

Diterbitkan oleh:

SOCIETY OF VISUAL INFORMATICS (SOTVI)

Komplek Perumahan Dosen Unand, Gadut, Padang Sumatera Barat

Email: rahmat@sotvi.org

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Persembahan

Buku ini kami persembahkan kepada:

- Para mahasiswa dan pembaca yang antusias dalam mendalami ilmu ekonomi politik, yang senantiasa menjadi inspirasi kami untuk terus mengembangkan materi yang relevan dan aplikatif. Semoga buku ini dapat membantu membuka wawasan baru dan memperdalam pemahaman kalian tentang dinamika ekonomi politik dari masa klasik hingga era modern.
- Universitas Andalas, atas dukungan dan hibah yang diberikan untuk penyusunan buku ini. Dengan penuh rasa terima kasih, kami harap buku ini dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian di lingkungan kampus.
- Rekan-rekan akademisi dan kolega yang telah berbagi wawasan, inspirasi, dan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga kerja sama kita terus terjalin dalam berbagai upaya memajukan ilmu pengetahuan.
- Keluarga kami yang tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan pengertian tanpa henti. Kehadiran dan dukungan kalian adalah sumber kekuatan yang tak ternilai dalam proses panjang penulisan buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan yang berkelanjutan bagi para pembacanya.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku "Transformasi Pemikiran Ekonomi Politik: Dari Klasik ke Modern".

Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Andalas atas hibah buku ajar yang telah diberikan. Dukungan ini menjadi pendorong utama dalam penyelesaian buku ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi politik di lingkungan akademis.

Kami juga berterima kasih kepada para kolega, rekan akademisi, dan mahasiswa yang telah memberikan masukan, dukungan, dan inspirasi sepanjang proses penulisan. Diskusi dan kolaborasi yang berharga dengan berbagai pihak telah memperkaya buku ini dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam.

Tidak lupa, kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi, menjadi kekuatan yang selalu menyertai di setiap langkah perjalanan ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi referensi berharga bagi para pembaca dalam memahami dinamika ekonomi politik dari masa ke masa.

Prakata

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas terciptanya buku ajar yang berjudul “Transformasi Pemikiran Ekonomi Politik: Dari Klasik ke Modern”. Buku ini bertujuan untuk membiasakan pembaca dengan perkembangan teori-teori ekonomi politik, mulai dari gagasan klasik hingga konsep-konsep kontemporer yang mempengaruhi pemahaman kita tentang ekonomi global saat ini.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para mahasiswa dan akademisi yang tertarik untuk meneliti transisi paradigma dalam ekonomi politik sepanjang sejarah. Evaluasi sistematis mendorong pembaca untuk memeriksa konsep-konsep utama dari para pemikir terkemuka dan pengaruhnya terhadap perkembangan beragam teori dan kebijakan ekonomi.

Penyusunan buku ini membutuhkan penelitian yang ekstensif dan komitmen untuk menyajikan konten dengan cara yang menyeluruh dan mudah diakses, baik bagi pembaca pemula maupun mereka yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka tentang subjek ini. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi melalui dukungan dan umpan balik yang konstruktif.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dari publikasi ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman pembaca mengenai evolusi pemikiran ekonomi politik.

Selamat membaca, dan semoga bermanfaat!

Daftar Isi

Persembahan	i
Ucapan Terima Kasih	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	viii
BAB I PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK PRE KLASIK	1
1.1 Pendahuluan.....	2
1.2 Xenophon: Oikonomia dan Efisiensi	3
1.3 Plato: Kota dan Ekonomi sebagai Kebutuhan Manusia	9
1.4 Aristoteles: Asosiasi Ekonomi dan Pertukaran	13
1.5 Kesimpulan	18
1.6 Latihan dan Refleksi	18
1.7 Glosarium.....	19
1.8 Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik.....	19
BAB II PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK MERKANTILISME KLASIK	21
2.1 Pendahuluan.....	22
2.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Munculnya Merkantilisme	22
2.3 Pokok Pemikiran Merkantilisme	25
2.4 Konsep Utama dalam Pemikiran Merkantilisme	26
2.5 Tokoh-Tokoh Utama Pemikiran Merkantilisme	28
2.6 Kesimpulan	33
2.7 Latihan dan Refleksi	33
2.8 Glosarium.....	34
2.9 Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik.....	34
BAB III PEMIKIRAN EKONOMI KLASIK - ADAM SMITH DAN DAVID RICARDO	36
3.1 Pendahuluan.....	37
3.2 Adam Smith: Bapak Ekonomi Modern.....	38
3.3 David Ricardo: Hukum Keunggulan Komparatif dan Diminishing Returns	43
3.4 Poin-poin Penting dari David Ricardo	44
3.5 Kesimpulan	48
3.6 Latihan dan Refleksi	49

3.7	Glosarium.....	50
3.8	Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik.....	51
BAB IV PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK SOSIALISME		52
4.1	Pendahuluan.....	53
4.2	Karl Marx dan Asal Usul Pemikiran Sosialisme	54
4.3	Poin-poin Utama dari Pemikiran Karl Marx	54
4.4	Kesimpulan	63
4.5	Latihan dan Refleksi	63
4.6	Glosarium.....	64
4.7	Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik.....	66
BAB V PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK KEYNESIAN		68
5.1	Pendahuluan.....	69
5.2	John Maynard Keynes.....	709
5.3	Prinsip Dasar Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian	72
5.4	Keynesian Dalam Ekonomi Modern	75
5.5	Kesimpulan	79
5.6	Latihan dan Refleksi	80
5.7	Glosarium.....	80
5.8	Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik.....	80
BAB VI PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK ALIRAN MONETARIS		82
6.1	Pendahuluan.....	83
6.2	Pemikiran Ekonomi Politik: Milton Friedman	86
6.3	Prinsip-Prinsip Utama Aliran Monetaris	88
6.4	Monetaris vs Keynesian	91
6.5	Kesimpulan	93
6.6	Latihan dan Refleksi	94
6.7	Glosarium.....	95
6.8	Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik	95
BAB VII PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK SUSAN STRANGE DAN ROBERT GILPIN		97
7.1	Pendahuluan.....	98
7.2	Pemikiran Ekonomi Politik: Susan Strange	99

7.3 Teori Struktur Kekuatan (Structural Power Theory)	100
7.4 Pemikiran Ekonomi Politik: Robert Gilpin.....	104
7.5 Pandangan Utama Robert Gilpin.....	106
7.6 Kesimpulan	110
7.7 Latihan dan Refleksi	110
7.8 Glosarium.....	111
7.9 Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik	111
BAB VIII PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK ISLAM KLASIK.....	113
8.1 Pendahuluan.....	114
8.2 Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW	115
8.3 Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin	117
8.4 Pemikiran Ekonomi Islam Pasca Masa Khulafaur Rasyidin	118
8.5 Pemikiran Eknomi Islam pada Masa Kebijakan Publik	120
8.6 Pemikiran Eknomi Islam pada Masa Fatwa	122
8.7 Kesimpulan	123
8.8 Latihan dan Refleksi	123
8.9 Glosarium.....	124
8.10 Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik	124
BAB IX PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK ISLAM KONTEMPORER	126
9.1 Pendahuluan.....	127
9.2 Pemikiran ekonomi politik Islam: Abad ke 19 -20.....	127
9.3 Pemikiran Ekonomi Politik Abad 21	128
9.4 Kesimpulan	130
9.5 Latihan dan Refleksi	131
9.6 Glosarium.....	131
9.7 Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik	133
BAB X PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK SOCIAL ECOLOGICAL MARKET ECONOMY (SEME).....	134
10.1 Pendahuluan.....	135
10.2 Nilai Utama Social Market Economy (SME)	136
10.3 Implementasi Social Market Economy (SME) di Jerman	138
10.4 Social Ecological Market Economy (SEME)	138

10.5 Tujuan Social Ecological Market Economy (SEME).....	139
10.6 Implementasi SEME di Berbagai Sektor	139
10.7 Tantangan Social Ecological Market Economy (SEME)	142
10.8 Kesimpulan	143
10.9 Latihan dan Refleksi	144
10.10 Glosarium.....	145
10.11 Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra Klasik.....	145
BAB XI.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149

Pendahuluan

Pemikiran Ekonomi Politik (PEP) adalah salah satu mata kuliah wajib dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada pemikiran para ahli ekonomi dunia beserta gagasan mereka yang berhubungan dengan ekonomi politik. Melalui kajian mendalam terhadap tulisan dan kontribusi para pemikir tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana struktur dan dinamika perekonomian dunia terbentuk serta berkembang sesuai dengan pemikiran-pemikiran politik ekonomi terdahulu. Pengetahuan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam kajian maupun praktik, baik secara akademis maupun profesional.

Pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang untuk mencakup pengenalan teori-teori ekonomi politik klasik hingga kontemporer, analisis kritis terhadap tulisan-tulisan para pemikir seperti Adam Smith, Karl Marx, dan John Maynard Keynes, serta diskusi kasus terkait implementasi konsep ekonomi politik dalam dinamika global modern. Selain itu, mahasiswa akan diberikan penugasan yang melibatkan refleksi dan analisis mendalam guna mengasah kemampuan kritis dan aplikatif mereka.

Buku ajar ini disusun sebagai pendamping utama dalam perkuliahan dan dirancang untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara bertahap. Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, penjelasan konsep, latihan dan refleksi, serta glosarium untuk membantu pemahaman istilah-istilah kunci yang relevan. Mahasiswa dianjurkan untuk membaca buku ini secara sistematis agar dapat memahami perkembangan pemikiran ekonomi politik dari masa ke masa dengan baik.

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan pemikiran ekonomi politik dari pra-klasik hingga modern, menganalisis relevansi teori-teori tersebut terhadap isu-isu global kontemporer, menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan teori yang dipelajari, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi politik dalam konteks internasional. Untuk mencapai tujuan ini, evaluasi pembelajaran dilakukan secara formatif melalui diskusi kelas, kuis mingguan, dan refleksi individu, serta secara sumatif melalui ujian akhir dan analisis kasus nyata terkait ekonomi politik. Mahasiswa juga akan menerima umpan balik secara tertulis maupun lisan untuk memperbaiki pemahaman mereka, didukung oleh diskusi kelompok sebagai sarana eksplorasi ide-ide yang lebih luas. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami materi secara teoretis, tetapi juga mampu mengimplementasikan pemikiran ekonomi politik dalam analisis dan praktik global.

BAB I

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK PRE KLASIK

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran Ekonomi Politik Pre Klasik

Menjelaskan

Konsep-konsep dasar dalam Pemikiran Ekonomi Politik Pre Klasik

Menjelaskan

Asumsi utama dalam Pemikiran Ekonomi Politik

Xenophon, Plato dan Aristotle

BAB I

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK PRA KLASIK

1.1 Pendahuluan

Pemikiran ekonomi pada periode pra klasik merupakan fondasi penting untuk mengembangkan teori ekonomi modern. Pada periode ini para pemikir telah meletakkan dasar bagi konsep-konsep ekonomi politik seperti nilai, *exchange*/ pertukaran dan akumulasi kekayaan. Konsep-konsep dasar ini membentuk wacana politik ekonomi selama berabad-abad berikutnya. Para penerus mereka kemudian mengembangkan teori-teori dan gagasan yang telah mereka bangun. Dengan mempelajari pemikiran ekonomi politik pra klasik ini diharapkan kita dapat memahami konsep-konsep dasar ekonomi politik dan kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi modern serta menghargai perubahan pemikiran ekonomi politik dari waktu ke waktu.

Tokoh-tokoh seperti Xenophon, Plato dan Aristoteles dikenal sebagai filsuf Yunani yang hebat dan pelopor dalam memahami konsep-konsep ekonomi dasar (Ekelund Jr & Hébert, 2013). Tulisan-tulisan mereka tentang topik-topik seperti *Oikonomia* karya Xenophon dan *Republic* karya Plato mengeksplorasi hubungan antara etika dan ekonomi, sementara *Politik* karya Aristoteles menggali pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Mereka membahas isu-isu seperti manajemen rumah tangga, pembagian kerja, nilai kekayaan dan hubungan antara ekonomi dan struktur sosial dan politik. Memahami pemikiran mereka memberikan wawasan yang mendalam tentang akar pemikiran ekonomi politik yang mempengaruhi praktiknya di masa saat ini. Para pemikir Yunani kuno sangat percaya bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara mempromosikan kebaikan bersama dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika. Mereka berpendapat bahwa transaksi dalam ekonomi haruslah menguntungkan dan etis, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil.

Pemikiran ekonomi politik pada periode pra klasik ini sangat dipengaruhi oleh filsafat klasik, yang mencakup aspek spiritual, moral dan rasional. Para pemikir Yunani kuno ini menekankan tentang kepentingan bersama dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika. Mereka berpendapat bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mestilah diperlakukan secara adil dan mencegah manusia untuk bertindak hanya demi kepentingan pribadi dan rakus. Pendekatan filosofis dalam ekonomi politik ini menjadi dasar perdebatan di kemudian hari mengenai tanggung jawab etika dalam pemerintahan, bisnis guna memastikan keadilan ekonomi.

1.2 Xenophon: Oikonomia dan Efisiensi

Xenophon (430–354 SM) adalah seorang sejarawan, filsuf, dan prajurit Athena yang karyanya memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi dan manajemen. Karyanya yang paling terkenal dalam konteks ekonomi adalah *Oeconomicus*, yang membahas seni mengelola rumah tangga dan pertanian (Strauss, 1970a). Xenophon meyakini bahwa setiap individu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan membuat pilihan keuangan yang bijak untuk mencapai kemakmuran dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Ajarannya menekankan pentingnya efisiensi dalam pengambilan keputusan ekonomi, mendorong individu untuk mempertimbangkan dengan cermat tindakan mereka dan mengalokasikan sumber daya secara efektif (Pomeroy, 1994). Di dunia saat ini, prinsip-prinsip Xenophon terus memengaruhi pemikiran ekonomi dan memandu bisnis dan pemerintah dalam mengejar pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Setelah diasingkan dari Athena karena hubungannya dengan Sparta, Xenophon menghabiskan banyak waktu di pengasingan, terutama di Sparta dan wilayah sekitarnya. Selama periode ini, Xenophon menulis berbagai karya yang mencakup berbagai topik, mulai dari sejarah dan filsafat hingga politik dan ekonomi. Karyanya yang paling terkenal, selain *Anabasis*, termasuk *Memorabilia*, yang menggambarkan ajaran Sokrates, dan *Hellenica*, yang melanjutkan catatan sejarah Thucydides tentang Yunani. Gaya penulisannya yang jernih dan praktis membuat karyanya dapat diakses oleh berbagai kalangan dan berpengaruh dalam pemikiran politik dan militer pada zamannya.

Di bidang ekonomi, *Oeconomicus* adalah salah satu karyanya yang paling berpengaruh. Dalam dialog ini, Xenophon berbicara tentang manajemen rumah tangga (*oikonomia*) dan pertanian, yang dianggap sebagai dasar ekonomi dalam masyarakat Yunani kuno. Melalui percakapan antara Sokrates dan Critobulus, Xenophon menekankan pentingnya kemampuan manajemen yang baik dan alokasi sumber daya yang efisien untuk mencapai kemakmuran individu dan kesejahteraan bersama. Warisan pemikiran Xenophon, terutama dalam hal efisiensi dan manajemen sumber daya, tetap relevan hingga saat ini, dan prinsip-prinsipnya masih memengaruhi dunia ekonomi modern terkait manajemen bisnis dan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah uraian dari poin-poin penting dalam pemikiran ekonomi politik Xenophon.

a. Oikonomia: Manajemen Rumah Tangga sebagai Seni

Istilah "oikonomia" berasal dari kata Yunani "oikos" (rumah tangga) dan "nomos" (hukum atau aturan). Yang dimaksud dengan kata rumah tangga disini kemudian dikembangkan menjadi kata estate (anything a man can possess/ segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang) atau dalam terminologi lainnya disebut sebagai sumber daya atau *resource* (Strauss, 1970b). Sehingga aktivitas ekonomi merupakan aktivitas yang bermakna pengelolaan atau manajemen sumber daya yang dilakukan oleh seorang individu yang disebut Xenophon sebagai *estate manager*.

Xenophon memandang ekonomi sebagai seni mengelola sumber daya rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan dan efisiensi. Dia percaya bahwa dengan mengelola sumber daya secara efektif di dalam rumah tangga, individu tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Alvey, 2011a). Penekanan Xenophon pada manajemen sumber daya dan efisiensi telah memberikan dampak yang langgeng pada teori dan praktik ekonomi modern, dengan banyak pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan yang masih melihat prinsip-prinsipnya sebagai panduan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di dunia saat ini, gagasan oikonomia sebagai manajemen rumah tangga sebagai seni masih sangat relevan, dengan fokus pada keseimbangan antara kemakmuran individu dengan kesejahteraan kolektif untuk masyarakat yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. Sebagai contoh, perusahaan yang memprioritaskan praktik-praktik berkelanjutan tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka panjang, namun juga berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di mana mereka beroperasi. Dengan menerapkan strategi pengelolaan sumber daya yang efisien yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip Xenophon, perusahaan dapat menciptakan dampak positif bagi keuntungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Oikonomia, Xenophon menekankan ada dua tipe estate manager; yaitu *general household manager* (Oikonomikus). Perbedaan ini didasarkan pada pentingnya Pendidikan dan keterampilan dalam berbagai aspek yang mesti dimiliki oleh estate manager jika ingin meningkatkan efektifitas (Strauss, 1970b). Hal ini menunjukkan bahwa seni dalam mengelola sumber daya merupakan keterampilan yang tidak semua household manager miliki. Ini

merupakan keterampilan unik yang membutuhkan pengetahuan dan Kemahiran tertentu (Natali, 1995).

Seorang manajer rumah tangga yang terampil atau Oikonomikus, memiliki beberapa tugas utama yang sangat penting untuk manajemen sumber daya yang efektif. Tanggung jawab pertama adalah mengenai perolehan dan pengelolaan kekayaan, manajer rumah tangga yang terampil bertanggung jawab untuk memperoleh dan mengelola kekayaan rumah tangga (Ambler, 1996; Strauss, 1970b). Hal ini melibatkan peningkatan sumber daya rumah tangga dengan cara yang tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dipandu oleh pengetahuan dan prinsip-prinsip etika. Tugas kedua adalah manajemen etis yaitu memastikan bahwa rumah tangga dijalankan secara etis. Hal ini termasuk mempraktikkan kesederhanaan dan menahan diri dalam keinginan, seperti makanan, anggur, dan kesenangan lainnya, untuk mencegah kehancuran rumah tangga dan tubuh dan jiwa individu (Strauss, 1970b). Tugas ketiga adalah manajemen yang komprehensif, hal ini disamakan dengan seni memerintah atau *Kingly Art*. Hal ini menunjukkan bahwa mengelola sumber daya membutuhkan keterampilan yang luas seperti yang dibutuhkan untuk mengatur sebuah kota (Alvey, 2011b). Tugas berikutnya adalah pendidikan dan penugasan peran, dimana oikonomikus bertanggung jawab atas pendidikan dan penugasan peran dalam rumah tangga. Seperti memastikan bahwa anggota termasuk perempuan dididik untuk menjalankan perannya secara efektif, yang dianggap sebagai pandangan progresif untuk konteks masyarakat Yunani Kuno. Tugas terakhir yaitu membina kerukunan dan persahabatan. Oikonomikus mestilah bertindak sebagai perekat dan pemersatu bagi rumah tangga dan komunitas yang lebih luas (Strauss, 1970b).

b. Efisiensi sebagai Seni dan Pentingnya Variabel Manusia

Xenophon percaya bahwa efisiensi dapat dicapai melalui pengorganisasian yang baik dan penggunaan sumber daya yang optimal. Hal ini termasuk pemanfaatan lahan, peralatan, dan tenaga kerja. Namun, Xenophon juga menekankan pentingnya variabel manusia dalam mencapai efisiensi operasional. Ia percaya bahwa memperlakukan karyawan dengan baik, memberikan pelatihan dan dukungan yang tepat, serta membina lingkungan kerja yang positif sangat penting untuk memaksimalkan produktivitas (Alvey, 2011a). Dengan menghargai dan berinvestasi pada kesejahteraan pekerja, manajer dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih termotivasi dan berdedikasi, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan kesuksesan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, ajaran Xenophon menyoroti keterkaitan

antara kepemimpinan, efisiensi, dan pertimbangan etika dalam menciptakan organisasi yang berkelanjutan dan berkembang.

Selain itu, Xenophon juga percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah aspek penting yang menentukan keberhasilan masyarakat. Kepemimpinan yang baik meliputi memotivasi pekerja, memahami kebutuhan mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif (Brownson et al., 1925). Kepemimpinan yang baik tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Xenophon menekankan pentingnya para pemimpin berempati dan memahami karyawan mereka, karena hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan loyalitas di antara para pekerja. Dengan memprioritaskan pertimbangan etika dan kesejahteraan karyawan, para manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efisien yang pada akhirnya mendorong keberhasilan organisasi dan masyarakat yang dilayaninya. Pada intinya, ajaran Xenophon tentang kepemimpinan menyoroti pentingnya menumbuhkan budaya hormat, kasih sayang, dan produktivitas untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Sebagai contoh, seorang manajer yang meluangkan waktu untuk mendengarkan kekhawatiran karyawannya dan memperlakukan mereka dengan hormat kemungkinan besar akan melihat tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan tingkat perputaran yang lebih rendah. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas, peningkatan moral, dan pada akhirnya, organisasi yang lebih sukses dan berkembang.

Etika dalam Manajemen: Xenophon menyoroti pentingnya keadilan dan kebajikan dalam manajemen, yang akan menghasilkan loyalitas dan kinerja yang lebih baik dari para pekerja. Xenophon menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan perilaku etis dalam praktik manajemen, karena hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas di antara karyawan (Alvey, 2011b). Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kebajikan, para manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berprestasi. Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan tim yang lebih kohesif, peningkatan efisiensi, dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Intinya, dengan mengedepankan etika dalam manajemen, bisnis tidak hanya dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi juga menumbuhkan fondasi yang kuat untuk kemakmuran jangka panjang.

Lebih lanjut, Xenophon juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam manajemen (Alvey, 2011b). Saluran komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan memahami peran, tanggung jawab, dan harapan mereka dalam organisasi. Ketika para manajer berkomunikasi secara transparan dan konsisten, hal ini

membantu membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara anggota tim. Hal ini, pada gilirannya, menumbuhkan lingkungan kerja yang kolaboratif dan harmonis di mana ide-ide dapat dipertukarkan dengan bebas, masalah dapat segera diatasi, dan umpan balik dapat diberikan secara konstruktif. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam mendorong kerja sama tim, meningkatkan semangat kerja, dan mendorong produktivitas secara keseluruhan di tempat kerja.

c. Kekayaan sebagai Nilai Intrinsik

Xenophon membedakan antara barang yang memiliki nilai karena kegunaannya dan barang yang dihargai karena nilai tukarnya. Dia menekankan bahwa kekayaan sejati terletak pada nilai guna yang memberikan manfaat langsung. Perspektif Xenophon tentang kekayaan menyoroti pentingnya mengenali nilai intrinsik barang di luar nilai tukarnya. Dengan berfokus pada nilai guna barang, individu dapat memprioritaskan manfaat dan fungsi langsung yang mereka berikan (van Berkel, 2024). Pola pikir ini dapat mengarah pada pendekatan yang lebih berkelanjutan dan memuaskan terhadap akumulasi kekayaan, menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap sumber daya yang ada. Pada akhirnya, memahami perbedaan antara nilai guna dan nilai tukar dapat membantu individu membuat pilihan yang lebih sadar tentang bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya dan memprioritaskan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, alih-alih membeli tas tangan desainer semata-mata untuk simbol statusnya, seseorang dapat memilih untuk berinvestasi pada tas ransel berkualitas tinggi yang akan bertahan selama bertahun-tahun dan memiliki tujuan praktis. Dengan menghargai fungsionalitas dan umur panjang tas ransel daripada nilai sosialnya, seseorang dapat membuat pilihan yang lebih berkelanjutan dan memuaskan dalam hal alokasi kekayaan.

Tujuan manajemen ekonomi adalah untuk mencapai keseimbangan dan kemakmuran, bukan akumulasi kekayaan yang berlebihan (Figueira, 2012). Dengan berfokus pada pembelian yang berkelanjutan dan praktis, individu dapat membangun masa depan keuangan yang lebih stabil dan memuaskan. Pergeseran pola pikir ini dapat mengarah pada pendekatan yang lebih seimbang dalam pengelolaan kekayaan, di mana sumber daya dialokasikan dengan cara yang memprioritaskan kesejahteraan jangka panjang daripada kepuasan jangka pendek. Pada akhirnya, dengan membuat pilihan secara sadar tentang bagaimana kita menggunakan kekayaan kita, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan dengan uang.

Hal ini dapat dilakukan dengan berinvestasi pada aset yang terapresiasi dari waktu ke waktu, seperti real estat atau saham, daripada terus-menerus mengejar keuntungan yang cepat. Hal ini juga berarti menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan dana darurat, untuk menyediakan jaring pengaman di saat-saat yang tidak menentu. Selain itu, memprioritaskan pengalaman dan hubungan di atas harta benda dapat menghasilkan kehidupan yang lebih memuaskan dan diperkaya, di mana kekayaan tidak hanya diukur dalam bentuk uang, tetapi juga kualitas pengalaman dan hubungan seseorang. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik terhadap manajemen kekayaan, individu dapat menumbuhkan rasa kelimpahan dan keamanan yang melampaui kekayaan finansial.

Xenophon mengkritik pengejaran kekayaan tanpa tujuan yang jelas, menganggapnya sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan tidak etis. Dia berpendapat bahwa mengumpulkan kekayaan demi memiliki lebih banyak uang adalah usaha yang sia-sia yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpuasan dan kerusakan moral. Menurut Xenophon, memiliki kehidupan yang bermoral dan bermakna dengan kejujuran, integritas, dan kasih sayang sebagai prinsip-prinsip yang menjadi pedoman adalah di mana kekayaan sejati berada. Dengan berfokus pada pertumbuhan pribadi dan hubungan yang bermakna dengan orang lain, individu dapat menemukan kepuasan dan kebahagiaan sejati yang tidak dapat dibeli dengan uang saja.

Perspektif Xenophon tentang materialisme menyoroti pentingnya memprioritaskan nilai-nilai dan kebajikan di atas harta benda. Dia menekankan pentingnya menjalani kehidupan yang memiliki tujuan yang berpusat pada prinsip-prinsip etika, daripada dikonsumsi oleh pengejaran kekayaan untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian, individu dapat memupuk rasa kekayaan dan kepuasan batin yang melampaui kekayaan moneter. Filosofi Xenophon berfungsi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari besarnya rekening bank seseorang, tetapi dari kedalaman karakter dan kualitas hubungan seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang menghargai kebaikan, kejujuran, dan kemurahan hati dapat menemukan kepuasan yang lebih besar dalam membantu orang lain dan membentuk hubungan yang bermakna daripada mengumpulkan harta benda yang mewah. Dengan mewujudkan kebajikan-kebajikan ini, mereka dapat menciptakan rasa kelimpahan dan kepuasan yang melampaui kekayaan materi. Pada akhirnya, ajaran Xenophon mendorong individu untuk memprioritaskan pertumbuhan pribadi dan perkembangan moral sebagai penanda kemakmuran yang sesungguhnya.

1.3 Plato: Kota dan Ekonomi sebagai Kebutuhan Manusia

Plato (427–347 SM) adalah seorang filsuf Yunani yang karya-karyanya, terutama *Republic*, membahas konsep keadilan, struktur masyarakat, dan peran ekonomi dalam negara ideal. Plato percaya bahwa ekonomi adalah komponen penting dari masyarakat yang adil, dengan setiap individu memenuhi peran mereka untuk berkontribusi pada harmoni dan keseimbangan negara secara keseluruhan. (Alvey, 2011c) Dia berpendapat bahwa individu harus berusaha untuk mencapai keunggulan dalam pekerjaan mereka dan tidak mengejar kekayaan untuk kepentingannya sendiri. Dalam masyarakat idealnya, para filsuf akan menjadi penguasa, memandu ekonomi menuju kebaikan bersama daripada keuntungan pribadi. Hal ini berbeda dengan pandangan Xenophon bahwa mengejar kekayaan tanpa tujuan yang jelas merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan tidak etis.

Visi Plato tentang masyarakat yang adil juga mencakup hierarki yang ketat, dengan individu-individu yang diberi peran berdasarkan kemampuan dan bakat alami mereka. Ia percaya bahwa pembagian kerja ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih efisien dan harmonis, di mana setiap individu dapat menyumbangkan keahlian mereka yang unik untuk kebaikan yang lebih besar. (McNulty, 1975) Selain itu, Plato berpendapat bahwa ekonomi harus diatur oleh negara untuk memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara adil dan tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Penekanan pada keadilan dan kesetaraan dalam masalah ekonomi merupakan prinsip utama filosofi Plato, yang membentuk visinya tentang negara yang ideal.

Selain itu, Plato percaya bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk warga negara yang ideal. Dia berpendapat bahwa individu harus dididik sejak usia muda dalam filsafat, matematika, dan pelatihan fisik untuk mengembangkan pikiran dan tubuh mereka. Plato percaya bahwa pendidikan yang menyeluruh tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena warga negara yang berpendidikan akan lebih siap untuk membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Dengan demikian, Plato melihat pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan individu-individu berbudi luhur yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di semua aspek masyarakat.

a. Asal Usul Kota: Kebutuhan Dasar Manusia

Menurut Plato, manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri sehingga membentuk komunitas untuk saling membantu satu sama lain. Plato berpendapat bahwa komunitas sangat penting bagi manusia untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dia percaya bahwa dengan berkumpul di kota, individu dapat saling mendukung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan juga terlibat dalam kegiatan intelektual yang akan meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia. Bagi Plato, asal mula kota berakar pada kesadaran akan saling ketergantungan manusia dan tujuan bersama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis berdasarkan rasa saling menghormati dan kerja sama. Pada akhirnya, ia melihat kota sebagai fondasi untuk mengembangkan individu-individu berbudi luhur yang bekerja sama untuk membangun masyarakat yang adil dan merata. (Zhang, 2021)

Visi Plato tentang kota sebagai landasan pembangunan masyarakat selaras dengan gagasan bahwa kolaborasi dan komunitas adalah kunci kemajuan manusia. Di dunia saat ini, konsep ini tetap relevan karena kita terus menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Pentingnya membina komunitas yang kuat dan inklusif terlihat jelas dalam cara kami mengatasi masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kelestarian lingkungan. Dengan mempromosikan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, kita dapat bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

Kota atau polis terbentuk sebagai hasil dari kebutuhan kolektif, di mana individu-individu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Seiring bertambahnya populasi di komunitas-komunitas awal ini, begitu pula kebutuhan akan organisasi dan kerja sama. Para pemimpin muncul untuk mengawasi distribusi sumber daya dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua penduduk. Rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama ini menjadi dasar bagi prinsip-prinsip demokrasi dan kewarganegaraan yang masih kita hargai hingga saat ini. Pembentukan polis menandai langkah penting dalam evolusi manusia, yang menunjukkan kekuatan tindakan kolektif dalam mengatasi tantangan saat itu.

Pembagian tugas berdasarkan keahlian individu meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Ketika masyarakat terus berkembang dan meluas, individu mulai mengkhususkan diri pada keahlian atau profesi tertentu, sehingga memungkinkan kolaborasi dan inovasi yang lebih besar. Pembagian kerja ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi semua orang di dalam polis. Dengan bekerja sama dan berbagi pengetahuan, masyarakat kuno mampu mencapai kemajuan yang luar biasa dalam teknologi, seni, dan pemerintahan. Keberhasilan peradaban awal ini menjadi bukti kekuatan spesialisasi dan kolaborasi dalam membangun masyarakat yang makmur dan berkembang.

Ekonomi adalah perekat yang menyatukan anggota masyarakat melalui pertukaran barang dan jasa. Ketergantungan ekonomi menciptakan saling ketergantungan di antara individu dan mendorong interaksi sosial. Melalui perdagangan dan perniagaan, orang dapat terhubung satu sama lain, membentuk hubungan dan jaringan yang berkontribusi pada kohesi masyarakat. Keterkaitan ini tidak hanya memperkuat ekonomi tetapi juga mendorong kohesi sosial, menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan di antara para anggotanya. Ketergantungan satu sama lain akan barang dan jasa pada akhirnya mengarah pada masyarakat yang lebih saling terhubung dan saling bergantung, di mana kolaborasi dan kerja sama menjadi penting untuk kelangsungan hidup dan kesuksesan.

Pasar muncul sebagai mekanisme untuk memfasilitasi pertukaran dan distribusi barang, memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks. Ketika pasar terus berkembang dan meluas, individu dan bisnis dapat mengakses lebih banyak variasi barang dan jasa, yang semakin meningkatkan keterkaitan masyarakat. Keterkaitan ini menumbuhkan rasa saling ketergantungan dan saling ketergantungan, di mana individu saling bergantung satu sama lain untuk berbagai kebutuhan dan layanan. Pada gilirannya, hal ini menciptakan jaringan hubungan dan jaringan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat tatanan sosial masyarakat, mendorong kerja sama dan persatuan di antara para anggotanya. Pada akhirnya, evolusi pasar memainkan peran penting dalam membentuk sifat masyarakat modern yang saling terhubung dan saling bergantung.

Ekonomi memengaruhi hierarki sosial dan peran individu dalam masyarakat. Ketika pasar terus berevolusi, pasar memengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat, yang berdampak pada peluang yang tersedia bagi individu yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan

kesenjangan dalam pendapatan dan akses ke sumber daya, membentuk hierarki sosial dan memperkuat norma dan struktur masyarakat tertentu. Namun, pada saat yang sama, keterkaitan dan ketergantungan yang dipupuk oleh pasar juga menciptakan peluang untuk kolaborasi dan saling mendukung, yang memungkinkan individu untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama dan kemakmuran bersama. Pada akhirnya, hubungan antara ekonomi dan masyarakat bersifat kompleks dan beraneka ragam, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pasar membentuk dunia kita yang saling terhubung.

b. Pembagian Kerja: Konsep Otoriter

Plato membagi masyarakat ke dalam tiga kelas: produsen, pemelihara, dan penguasa. Setiap kelas memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik. Pembagian kerja ini dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan efisien, dengan masing-masing kelas bekerja sama dalam peran yang telah ditentukan untuk kebaikan yang lebih besar. Meskipun konsep Plato mungkin tampak otoriter menurut standar modern, konsep ini mencerminkan keyakinan akan pentingnya spesialisasi dan kerja sama untuk keberhasilan fungsi masyarakat. Dengan mengakui kemampuan dan kontribusi unik dari setiap kelas, model Plato bertujuan untuk mempromosikan tatanan dan stabilitas sosial. (Rayward, 2022)

Individu ditempatkan di kelas-kelas tertentu berdasarkan bakat dan pendidikan, dengan sedikit kesempatan untuk mobilitas sosial. Struktur yang kaku ini memastikan bahwa setiap individu dapat fokus pada tugas-tugas khusus mereka tanpa gangguan, yang pada akhirnya mengarah pada masyarakat yang lebih produktif. Namun, para kritikus berpendapat bahwa kurangnya mobilitas sosial ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi individu, sehingga membatasi potensi kemajuan dan perkembangan. Terlepas dari kekurangannya, pembagian kerja Plato meletakkan dasar bagi gagasan bahwa masyarakat yang terorganisir dengan baik bergantung pada individu-individu yang memenuhi peran yang telah ditentukan untuk kebaikan yang lebih besar.

Penguasa yang bijaksana dan berpendidikan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Plato percaya bahwa dengan memiliki penguasa yang menguasai filsafat dan etika, masyarakat akan dibimbing menuju kehidupan yang harmonis dan adil. Para penguasa ini, menurut Plato, akan membuat keputusan untuk kepentingan semua warga negara,

memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau terpinggirkan. Dengan cara ini, pembagian kerja Plato tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata di mana kebutuhan semua orang terpenuhi.

c. Kritik dan Pertimbangan:

Otoritarianisme: Struktur masyarakat yang kaku dapat membatasi kebebasan dan kreativitas individu. Namun, penekanan Plato pada penguasa filsuf dapat mengarah pada bentuk otoritarianisme di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa individu elit. Hal ini berpotensi menghambat perbedaan pendapat dan menghambat inovasi, yang pada akhirnya menghambat kemajuan masyarakat. Selain itu, gagasan Plato tentang pembagian kerja yang kaku mungkin tidak memperhitungkan bakat dan kemampuan individu yang beragam, sehingga berpotensi menimbulkan perasaan terasing dan ketidakpuasan di antara mereka yang tidak sesuai dengan peran yang ditugaskan. Oleh karena itu, meskipun visi Plato tentang masyarakat yang adil memiliki kelebihan, penting untuk mempertimbangkan potensi kekurangan dan keterbatasan sistem yang diusulkannya.

Keseimbangan antara Kebutuhan Individu dan Kolektif: Tantangan untuk memenuhi kebutuhan individu tanpa mengorbankan keharmonisan sosial. Menemukan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan sangat penting dalam mencapai masyarakat yang adil dan merata. Meskipun penting untuk mengenali dan mengembangkan bakat dan kemampuan individu yang beragam, penting juga untuk memastikan bahwa bakat-bakat ini digunakan untuk kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu dan kemajuan masyarakat, masyarakat yang harmonis dan berfungsi dengan baik dapat dicapai. Hal ini membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap aspirasi individu dan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar adil dan berkelanjutan.

1.3 Aristoteles: Asosiasi Ekonomi dan Pertukaran

Aristoteles (384–322 SM) adalah murid Plato yang mengembangkan pendekatan yang lebih empiris dan praktis terhadap ekonomi dalam karya-karyanya seperti *Politics* dan *Nicomachean Ethics*. Aristoteles percaya bahwa asosiasi dan pertukaran ekonomi adalah komponen penting dari masyarakat yang berfungsi dengan baik, menekankan pentingnya kesejahteraan individu dan kolektif. Dalam tulisannya, Aristoteles berpendapat bahwa keseimbangan antara

pengejaran individu dan kebaikan bersama diperlukan agar masyarakat dapat berkembang. (Cooper, 1985) Dengan mempelajari karya-karya Plato dan Aristoteles, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang bagaimana mencapai masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan yang menghargai aspirasi individu dan tanggung jawab bersama.

Lebih jauh lagi, gagasan Aristoteles tentang etika dan politik telah memberikan dampak yang bertahan lama pada filsafat dan teori politik Barat. Penekanannya pada pentingnya kebajikan dan karakter moral dalam membentuk individu dan masyarakat terus mempengaruhi diskusi tentang tata kelola pemerintahan dan organisasi masyarakat. Selain itu, konsep Aristoteles tentang “cara emas” sebagai cara untuk mencapai keseimbangan dan moderasi dalam semua aspek kehidupan tetap menjadi prinsip panduan bagi banyak orang yang ingin menavigasi dilema moral dan etika yang kompleks. Secara keseluruhan, ajaran Aristoteles menawarkan perspektif yang tak lekang oleh waktu tentang interaksi antara kebebasan individu dan kohesi sosial, memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat kontemporer yang bergulat dengan tantangan yang sama.

a. Ekonomi sebagai Serangkaian Asosiasi

Aristotle mencoba untuk menjelaskan ekonomi sebagai serangkaian asosiasi dengan mengkaji keterkaitan antar individu dalam masyarakat dan menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam mencapai kemakmuran ekonomi. Rangkaian ini terdiri dari tiga yaitu: keluarga, desa dan terakhir yaitu polis, pada masing-masing rangkaian akan terwujud kebutuhan manusia pada tingkatan yang berbeda pula (Kopylov & Moskovtsev, 2013).

Keluarga: Unit dasar ekonomi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup utama individu sehari-hari. Unit ini sering dipandang sebagai fondasi masyarakat, di mana individu-individu mempelajari nilai berbagi sumber daya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pada asosiasi ini masing-masing individu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.

Desa: Kumpulan keluarga yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga individu. Keluarga dapat saling mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dengan memupuk rasa kebersamaan di dalam desa-desa ini, menciptakan jaringan kepedulian dan sumber daya yang kuat. Pendekatan kolaboratif ini

tidak hanya memperkuat ikatan antar keluarga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya, dengan mempromosikan gagasan desa sebagai unit yang saling terhubung yang bekerja sama untuk kebaikan bersama, pembuat kebijakan dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berkembang yang menghargai dan mendukung pentingnya keluarga.

Polis (Kota-Negara): Bentuk tertinggi dari asosiasi manusia yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik dan bermakna (eudaimonia). Dalam hal ini, konsep desa dapat dilihat sebagai mikrokosmos dari polis yang lebih besar, dengan setiap keluarga memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan mempromosikan nilai-nilai kerja sama, dukungan, dan saling menghormati di dalam desa-desa ini, para pembuat kebijakan dapat membantu menciptakan masyarakat yang tidak hanya kuat dan tangguh, tetapi juga peduli dan berbelas kasih. Dengan cara ini, gagasan desa sebagai unit yang saling terhubung dan saling bergantung dapat menjadi model untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis di tingkat makro. Pada asosiasi polis ini manusia tidak lagi hanya memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat materialistik namun juga kebutuhan jiwa dan mental mereka.

b. Jenis-Jenis Pertukaran

Aristoteles membagi pertukaran menjadi empat jenis: pertukaran yang wajar dan perlu, tidak wajar dan perlu, tidak wajar dan tidak perlu, dan yang terakhir adalah pertukaran yang sangat tidak wajar dan tidak perlu (McNeill, 1990). Pertukaran-pertukaran ini dapat dilihat sebagai cara untuk memahami dinamika hubungan di dalam komunitas desa. Pertukaran yang wajar dan perlu, seperti berbagi sumber daya pada saat dibutuhkan, dapat memperkuat ikatan dan mendorong persatuan. Sebaliknya, pertukaran yang tidak alami dan tidak perlu, dapat menciptakan ketegangan dan mengganggu keharmonisan di desa. Dengan mengenali dan mempromosikan jenis-jenis pertukaran yang positif, para pembuat kebijakan dapat membantu menumbuhkan budaya kerja sama dan saling mendukung yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat (Meikle, 1979).

- **Pertukaran Alamiah (Natural Exchange):** Pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui barter. Pertukaran antara komoditas dan komoditas terletak esensi dari pertukaran alami, di mana individu-individu di dalam masyarakat desa dapat saling mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan barang kebutuhan

pokok tanpa memerlukan mata uang (Meikle, 1979). Pertukaran jenis ini menumbuhkan rasa saling ketergantungan dan solidaritas di antara anggota masyarakat, yang mengarah pada tatanan sosial yang lebih kuat dan tangguh. Sebaliknya, pertukaran yang tidak wajar, seperti eksploitasi atau manipulasi untuk keuntungan pribadi, dapat mengikis kepercayaan dan kerja sama, yang pada akhirnya melemahkan ikatan yang menyatukan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk mendorong dan memprioritaskan pertukaran yang alami untuk menjaga komunitas desa yang sehat dan berkembang.

- **Pertukaran tidak alami namun dibutuhkan (Unnatural and necessary Exchange):** Hal ini tidak wajar karena dapat menciptakan kesenjangan dan ketidaksetaraan di antara anggota masyarakat, yang menyebabkan rusaknya kepercayaan dan kerja sama (Meikle, 1979). Karena masih dapat diterima dan diidentifikasi sebagai pertukaran yang diperlukan dalam masyarakat.
- **Pertukaran yang tidak alami dan tidak dibutuhkan (Unnatural and unnecessary exchange) :** Dalam perdagangan eceran, misalnya, jenis pertukaran yang terjadi adalah antara uang untuk membeli komoditas dan kemudian menjual komoditas tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Jenis pertukaran seperti ini dapat menimbulkan persaingan, keserakahan, dan ketidaksetaraan di dalam komunitas, yang pada akhirnya melemahkan ikatan antar anggotanya. Penting bagi para pembuat kebijakan untuk mengenali dampak negatif dari pertukaran yang tidak alami dan sebaliknya mempromosikan praktik-praktik yang memprioritaskan hubungan yang tulus dan saling mendukung di antara para anggota masyarakat (Meikle, 1979). Dengan mendorong pertukaran yang alami, seperti berbagi sumber daya, keterampilan, dan pengetahuan, masyarakat desa dapat berkembang dan mempertahankan kekompakan mereka untuk generasi yang akan datang.
- **Pertukaran yang sangat tidak alami dan tidak dibutuhkan (Unnatural and unnecessary exchange) :** jenis pertukaran antara uang, uang, dan uang. Fokus pada kekayaan materi ini hanya menciptakan kesenjangan antar individu dan mengikis rasa persatuan dan kerja sama yang penting bagi komunitas yang kuat (Meikle, 1979). Dengan mengalihkan fokus pada pertukaran yang lebih bermakna yang mendorong kolaborasi dan empati, masyarakat desa dapat membangun fondasi kepercayaan dan solidaritas untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang mereka. Para pembuat kebijakan harus memprioritaskan kebijakan yang mendukung pertukaran

alamiah ini dan mencegah dampak buruk dari persaingan yang berlebihan dan keserakahan di dalam masyarakat. Hal ini tidak wajar dan tidak perlu karena tidak ada sifat membatasi diri dalam jenis pertukaran ini. Hal ini hanya akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Kritik terhadap Akumulasi Kekayaan

Aristoteles menganggap bahwa pengejaran kekayaan tanpa batas adalah tidak wajar dan merusak moralitas masyarakat. Dia percaya bahwa hal itu mengarah pada keserakahan dan keegoisan, yang pada akhirnya merusak individu dan merusak kebaikan bersama. Aristoteles berpendapat bahwa akumulasi kekayaan seharusnya tidak menjadi tujuan akhir individu, karena bertentangan dengan tatanan alamiah masyarakat. Sebaliknya, ia percaya bahwa orang harus fokus pada membangun hubungan yang kuat dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan komunitas yang harmonis dan berbudi luhur. Dengan memprioritaskan kebaikan bersama di atas keuntungan pribadi, Aristoteles percaya bahwa masyarakat secara keseluruhan akan berkembang dan individu akan menemukan pemenuhan dan kebahagiaan sejati. Kritiknya terhadap akumulasi kekayaan yang berlebihan berfungsi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati terletak pada hubungan dan koneksi yang kita bangun dengan orang lain, bukan pada harta benda yang kita kumpulkan.

d. Nilai Penggunaan vs. Nilai Tukar

Konsep nilai yang digunakan versus nilai tukar adalah aspek kunci lain dari filosofi etika Aristoteles. Dia percaya bahwa nilai sebenarnya dari suatu benda terletak pada kegunaan dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan pada nilai uangnya di pasar. Perspektif ini menantang pola pikir kapitalis yang ada yang menempatkan nilai tinggi pada barang dan jasa berdasarkan kemampuan mereka untuk dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Aristoteles berpendapat bahwa nilai sebenarnya dari sesuatu harus ditentukan oleh kontribusinya terhadap kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Miller, 1998). Dengan cara ini, ia menganjurkan pendekatan yang lebih komunal dan altruistik terhadap ekonomi, di mana fokusnya adalah memenuhi kebutuhan semua individu daripada memaksimalkan kekayaan individu.

Pertukaran harus mencerminkan nilai yang adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Filosofi ekonomi alternatif ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan pengambilan keputusan yang etis dalam praktik bisnis. Filosofi ini mendorong perusahaan untuk

memprioritaskan keberlanjutan, keadilan sosial, dan pemeliharaan lingkungan di atas maksimalisasi keuntungan. Dengan mengadopsi perspektif ini, perusahaan dapat berkontribusi pada kebaikan masyarakat yang lebih besar sambil mencapai kesuksesan dan stabilitas jangka panjang. Selain itu, pendekatan ini mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil dan mendorong hubungan yang lebih harmonis antara individu dan ekonomi. Pada akhirnya, ajaran Aristoteles tentang ekonomi menawarkan visi yang menarik untuk sistem ekonomi yang lebih adil dan penuh kasih sayang yang bermanfaat bagi semua orang.

1.5 Kesimpulan

Pemikiran ekonomi pra-klasik dari Xenophon, Plato, dan Aristoteles menawarkan perspektif yang beragam namun saling melengkapi tentang bagaimana ekonomi seharusnya diorganisir dan dikelola dalam masyarakat. Mereka menyoroti pentingnya:

- **Manajemen Efisien dan Etis:** Xenophon menekankan seni mengelola sumber daya dengan efisiensi dan keadilan.

Struktur Sosial dan Pembagian Kerja: Plato menekankan pentingnya pembagian tugas dan peran dalam masyarakat untuk mencapai harmoni dan keadilan.

Keseimbangan antara Ekonomi dan Etika: Aristoteles menekankan perlunya integrasi antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai moral untuk mencapai kehidupan yang baik.

Pemahaman tentang pemikiran mereka membantu kita melihat bahwa ekonomi bukan sekadar ilmu tentang kekayaan atau perdagangan, tetapi juga tentang bagaimana manusia hidup bersama dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan, dan mencapai kesejahteraan bersama.

1.6 Latihan dan Refleksi

1. Xenophon dan Manajemen Ekonomi:

- Bagaimana konsep *oikonomia* dari Xenophon dapat diterapkan dalam konteks manajemen modern?
- Diskusikan relevansi etika dalam manajemen menurut Xenophon dengan praktik bisnis saat ini.

2. Pembagian Kerja menurut Plato:

- Apa implikasi dari struktur kelas yang kaku dalam pemikiran Plato terhadap mobilitas sosial?

- Bagaimana konsep penguasa filosofis Plato dibandingkan dengan konsep kepemimpinan dalam demokrasi modern?

3. **Etika Ekonomi Aristoteles:**

- Jelaskan bagaimana pandangan Aristoteles tentang keadilan distributif dan komutatif dapat diterapkan dalam sistem ekonomi saat ini.
- Diskusikan kritik Aristoteles terhadap akumulasi kekayaan dan relevansinya dengan isu ketimpangan ekonomi modern.

1.7 **Glosarium**

- **Oikonomia:** Konsep manajemen rumah tangga atau ekonomi, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya secara efisien dan etis.
- **Polis:** Kota-negara dalam peradaban Yunani kuno yang berfungsi sebagai unit politik dan sosial utama.
- **Chrematistik:** Seni menghasilkan kekayaan; Aristoteles membedakan antara chrematistik alamiah (untuk memenuhi kebutuhan) dan non-alamiah (akumulasi kekayaan tanpa batas).
- **Eudaimonia:** Konsep kehidupan yang baik atau kebahagiaan sejati dalam filsafat Yunani, terutama dalam pemikiran Aristoteles.

1.8 **Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Pra-Klasik**

Instruksi:

Refleksi Individu (1-2 Halaman): Pilih salah satu tokoh ekonomi pra-klasik: Xenophon, Plato, atau Aristoteles. Jelaskan secara singkat konsep ekonomi yang diusung oleh tokoh tersebut dan refleksikan bagaimana konsep tersebut relevan atau tidak relevan dalam konteks ekonomi modern. Berikan alasan yang mendukung pendapat Anda.

Analisis Kritis (1-2 Halaman): Analisis konsep ekonomi yang diajukan oleh dua tokoh berbeda. Misalnya, Anda dapat membandingkan pandangan Xenophon tentang efisiensi dengan pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam ekonomi. Diskusikan bagaimana perbedaan pandangan ini memengaruhi konsep ekonomi politik modern, terutama dalam hal manajemen sumber daya dan kebijakan ekonomi.

Studi Kasus Aplikasi (1-2 Halaman): Bayangkan Anda seorang ekonom modern yang harus menyarankan kebijakan ekonomi berdasarkan pemikiran pra-klasik dalam situasi berikut:

Negara Anda menghadapi masalah ketimpangan sosial yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Berdasarkan pemikiran salah satu tokoh pra-klasik, saran apa yang akan Anda berikan untuk meminimalkan ketimpangan dan mencapai kesejahteraan bersama?

Gunakan konsep dari tokoh tersebut (misalnya, keadilan Aristoteles, oikonomia Xenophon, atau pembagian kerja Plato) dan jelaskan bagaimana konsep ini dapat diterapkan secara konkret dalam kebijakan ekonomi modern.

Batasan Waktu: 2 Minggu

Format Pengumpulan: Dokumen PDF dengan nama file:

"Penugasan_Bab1_NamaMahasiswa.pdf"

BAB II

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK MERKANTILISME KLASIK

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran Ekonomi Politik Merkantilisme Klasik

Menjelaskan

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kemunculan

Pemikiran Ekonomi Politik Merkantilisme

Menjelaskan

Konsep-konsep dasar dalam Pemikiran Ekonomi Politik

Merkantilisme Klasik

Menjelaskan

Asumsi utama dari tokoh-tokoh pemikir

Ekonomi Politik Merkantilisme Klasik

BAB II

PEMIKIRAN EKONOMI MERKANTILISME KLASIK

2.1 Pendahuluan

Merkantilisme merupakan salah satu pemikiran ekonomi paling berpengaruh pada periode pra-klasik hingga awal modern. Fokus utamanya adalah bagaimana negara dapat mengumpulkan kekayaan melalui kontrol ketat atas perdagangan internasional dan akumulasi emas serta logam mulia. Pemikiran merkantilisme berkaitan erat dengan kebangkitan negara-negara Eropa dan usaha mereka untuk memperkuat kekuatan nasional dengan meningkatkan surplus perdagangan.

Kebijakan merkantilis mencakup tarif, subsidi, dan monopoli untuk mendorong ekspor dan membatasi impor. Pendekatan ini diyakini perlu untuk memastikan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri. Para pemikir merkantilisme juga menekankan pentingnya populasi yang besar untuk menyediakan tenaga kerja dan konsumen untuk barang-barang domestik. Secara keseluruhan, merkantilisme meletakkan dasar bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi modern.

Bab ini akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan munculnya merkantilisme, pandangan tokoh-tokoh merkantilis, serta kontribusi teori ini dalam perkembangan ekonomi dan politik dunia. Kami juga akan menguraikan konsep-konsep utama yang diajukan oleh pemikir merkantilisme seperti Jean Bodin, Thomas Mun, Jean Baptiste Colbert, dan Sir William Petty.

2.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Munculnya Merkantilisme

Merkantilisme muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Eropa selama abad ke-16 hingga ke-18. Beberapa faktor utama yang menyebabkan berkembangnya pemikiran merkantilisme antara lain:

Runtuhnya Feodalisme dan Bangkitnya Kapitalisme Komersial: Pada akhir era feodalisme, terjadi transisi dari ekonomi pertanian ke ekonomi perdagangan dan industri. Perkembangan ini mendorong kebutuhan akan pengelolaan kekayaan yang lebih terfokus pada perdagangan antarnegara. Pergeseran ini meletakkan dasar bagi kebangkitan kapitalisme komersial dan

kemunduran feodalisme. Merkantilisme berusaha memaksimalkan kekayaan suatu negara dengan mendorong ekspor dan mengumpulkan logam mulia, terutama emas dan perak. Sistem ekonomi ini menekankan pentingnya pemerintah pusat yang kuat yang dapat mengatur perdagangan, membangun koloni, dan memberlakukan tarif untuk melindungi industri dalam negeri. Secara keseluruhan, merkantilisme bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh suatu negara melalui cara-cara ekonomi, yang membentuk kebijakan dan praktik di banyak negara Eropa selama periode ini.

Ketika merkantilisme semakin populer, hal ini juga memicu persaingan di antara negara-negara untuk mengumpulkan kekayaan dan sumber daya yang paling banyak. Hal ini menyebabkan konflik dan perang untuk memperebutkan rute perdagangan, koloni, dan kontrol atas komoditas berharga. Keinginan untuk mendominasi ekonomi mendorong negara-negara untuk memperluas kerajaan mereka, mendirikan pos perdagangan di negeri-negeri yang jauh, dan mengeksploitasi penduduk asli untuk tenaga kerja dan sumber daya. Konsekuensi dari merkantilisme sangat luas, membentuk arah sejarah global dan meletakkan dasar bagi sistem ekonomi modern.

Kemajuan Sistem Perdagangan : Penemuan wilayah baru oleh para penjelajah, serta berkembangnya sistem perbankan dan perdagangan menggunakan uang, meningkatkan fokus pada perdagangan internasional sebagai alat untuk memperkuat negara. Negara-negara mulai bersaing untuk menguasai rute perdagangan dan pasar utama, yang mengarah pada persaingan sengit dan konflik yang akan membentuk lanskap geopolitik selama berabad-abad yang akan datang. Pendirian koloni-koloni dan pos-pos perdagangan memungkinkan akumulasi kekayaan dan sumber daya yang sangat penting untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dan pengaruh dalam skala global. Selain itu, eksploitasi penduduk asli untuk tenaga kerja dan sumber daya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga menyebabkan penderitaan dan ketidaksetaraan yang meluas. Pada akhirnya, merkantilisme meletakkan dasar bagi kapitalisme modern dan ekonomi global yang saling terhubung seperti yang kita lihat saat ini.

Perubahan Politik : Ketika kekuasaan feodal melemah, muncullah negara-negara bangsa yang kuat, seperti Prancis dan Inggris, yang mengejar kebijakan nasionalisme ekonomi. Negara-negara ini melihat perdagangan sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan militer dan ekonomi mereka (McCusker, 1996). Mereka mendirikan koloni di seluruh dunia untuk mengeksploitasi

sumber daya dan memperluas kekayaan mereka. Ekspansi ini menyebabkan konflik antar negara yang berlomba-lomba untuk menguasai rute perdagangan dan wilayah yang menguntungkan. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan pada akhirnya mendorong perkembangan sistem politik modern dan pembentukan perjanjian perdagangan internasional. Saat ini, warisan merkantilisme masih dapat dilihat dari bagaimana negara-negara memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh global dalam kebijakan dan praktiknya.

Selain membentuk hubungan internasional, merkantilisme juga memiliki dampak yang besar pada ekonomi domestik. Penekanan pada akumulasi kekayaan melalui perdagangan menyebabkan berkembangnya pemerintah pusat yang kuat yang mengatur perdagangan dan memberlakukan tarif pada barang-barang impor. Pendekatan proteksionis ini bertujuan untuk mempromosikan industri dalam negeri dan menciptakan neraca perdagangan yang menguntungkan. Akibatnya, kebijakan merkantilisme sering kali menguntungkan industri tertentu di atas industri lainnya, yang menyebabkan kesenjangan kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Terlepas dari kekurangannya, merkantilisme meletakkan dasar bagi teori dan praktik ekonomi modern, yang memengaruhi cara negara-negara melakukan pendekatan terhadap perdagangan dan kebijakan ekonomi hingga hari ini.

Pengaruh Agama : Ide-ide Reformasi Protestan mendukung pertumbuhan individualisme dan kebebasan pribadi, termasuk dalam bidang ekonomi. Ide-ide ini memperkuat perlunya kebijakan proteksionis untuk mendukung produsen dalam negeri dan meminimalkan ketergantungan impor. Secara keseluruhan, jalinan pengaruh ekonomi dan agama selama periode ini meletakkan dasar bagi ideologi ekonomi dan politik modern. Warisan merkantilisme dan Reformasi Protestan terus membentuk kebijakan perdagangan global dan strategi ekonomi domestik hingga hari ini. Ketika negara-negara menavigasi kompleksitas hubungan internasional, prinsip-prinsip persaingan dan proteksionisme tetap menjadi pusat dalam membentuk pendekatan mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh global.

Salah satu aspek kunci dari warisan ini adalah perdebatan yang sedang berlangsung antara pendukung perdagangan bebas dan pendukung proteksionisme. Sementara perdagangan bebas mempromosikan ide pasar terbuka dan persaingan tanpa batas, proteksionisme menekankan perlunya hambatan dalam perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri. Ketegangan

antara kedua ideologi ini telah menjadi ciri khas hubungan ekonomi global, dengan negara-negara yang sering terombang-ambing antara meliberalisasi kebijakan perdagangan dan menerapkan langkah-langkah proteksionis sebagai tanggapan terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Selain itu, warisan merkantilisme dan Reformasi Protestan juga telah memengaruhi perkembangan organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), yang berupaya menyeimbangkan kepentingan negara-negara anggota yang saling bersaing dalam ekonomi global.

Penemuan dan Inovasi : Penemuan-penemuan baru dalam bidang navigasi, teknologi maritim, dan infrastruktur perdagangan memungkinkan negara-negara Eropa untuk mengontrol perdagangan dan sumber daya secara lebih efektif di seluruh dunia (Fritze, 2007). Kemajuan ini membuka jalan bagi Zaman Eksplorasi, di mana kekuatan-kekuatan Eropa berusaha memperluas kerajaan mereka dan meningkatkan kekayaan mereka melalui kolonisasi dan perdagangan. Perkembangan teknologi baru seperti kompas dan astrolabe merevolusi navigasi, sehingga memudahkan para penjelajah untuk melakukan perjalanan jauh dan memetakan wilayah yang sebelumnya tidak diketahui. Selain itu, pembangunan rute perdagangan dan pelabuhan memfasilitasi pertukaran barang dan ide antar wilayah yang berbeda, yang mengarah pada globalisasi perdagangan dan budaya.

Ketika para penjelajah Eropa menjelajah lebih jauh dan lebih jauh ke perairan yang belum dipetakan, mereka menemukan tanah, masyarakat, dan sumber daya baru yang akan selamanya mengubah arah sejarah. Penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 membuka dunia baru bagi kekuatan Eropa, yang dengan cepat mulai membangun koloni dan mengeksploitasi kekayaan alam di Dunia Baru. Era penjelajahan ini juga membawa pertukaran budaya yang signifikan antara Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika, seiring dengan meluasnya jaringan perdagangan dan ide-ide dan teknologi baru yang dibagikan antar benua. Zaman Penjelajahan adalah masa pergolakan dan transformasi yang hebat, ketika kerajaan-kerajaan lama runtuh dan kerajaan-kerajaan baru muncul untuk menggantikan mereka di dunia yang berubah dengan cepat (Cohen, 1993; Hague et al., 1992).

2.3 Pokok Pemikiran Merkantilisme

Para pemikir merkantilis berfokus pada kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekayaan negara. Salah satu prinsip utama merkantilisme adalah gagasan bahwa

jumlah kekayaan dunia itu tetap (fixed) (Perrotta, 2023). Oleh karena itu, negara-negara harus berusaha untuk meningkatkan surplus perdagangan dan mengekspor lebih banyak barang daripada yang mereka impor, sehingga mengumpulkan emas dan logam mulia. Pola pikir ini mengarah pada pendirian koloni dan eksploitasi sumber daya untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat ekonomi negara asal. Merkantilisme juga mempromosikan ide kebijakan proteksionis, seperti tarif dan subsidi, untuk melindungi industri dalam negeri dan membatasi persaingan dari negara lain. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip merkantilisme memainkan peran penting dalam membentuk lanskap ekonomi pada Zaman Eksplorasi dan memengaruhi kebijakan banyak negara Eropa pada masa itu.

Salah satu strategi utama yang digunakan oleh negara-negara merkantilis adalah mengejar keseimbangan perdagangan yang menguntungkan, di mana mereka bertujuan untuk mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpor, sehingga mengakumulasi emas dan logam mulia (Smith, 2023). Pola pikir ini mengarah pada pendirian koloni dan eksploitasi sumber daya untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat ekonomi negara asal. Merkantilisme juga mempromosikan ide kebijakan proteksionis, seperti tarif dan subsidi, untuk melindungi industri dalam negeri dan membatasi persaingan dari negara lain. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip merkantilisme memainkan peran penting dalam membentuk lanskap ekonomi pada Zaman Eksplorasi dan memengaruhi kebijakan banyak negara Eropa pada masa itu. Aspek kunci lain dari merkantilisme adalah keyakinan akan pentingnya angkatan laut yang kuat untuk melindungi rute perdagangan dan memastikan aliran barang dari dan ke koloni. Penekanan pada kekuatan angkatan laut ini menyebabkan persaingan ketat di antara negara-negara Eropa untuk membangun dan memelihara armada yang kuat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kebangkitan kerajaan-kerajaan kolonial dan perluasan jaringan perdagangan global.

2.4 Konsep Utama dalam Pemikiran Merkantilisme

a. Bulionisme

Konsep ini menekankan pentingnya mengumpulkan logam mulia (emas dan perak) sebagai simbol kekuatan negara. Dalam pandangan merkantilis, semakin banyak logam mulia yang dimiliki sebuah negara, semakin kuat kekuatan ekonomi dan politiknya (Perrotta, 2023). Para pemikir merkantilis percaya bahwa kekayaan sebuah negara diukur dari jumlah emas dan perak yang dimilikinya, karena logam-logam ini dianggap sebagai fondasi kekuatan ekonomi. Keyakinan ini mengarah pada kebijakan yang bertujuan untuk menimbun logam mulia melalui

surplus perdagangan dan membangun koloni untuk mengeksploitasi sumber daya. Dengan menumpuk kekayaan dalam bentuk emas batangan, negara-negara percaya bahwa mereka dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka di panggung dunia. Pada akhirnya, penekanan pada bullionisme dalam pemikiran merkantilisme membentuk kebijakan ekonomi negara-negara Eropa selama era eksplorasi dan kolonisasi.

Fokus pada akumulasi logam mulia ini juga mengarah pada pengembangan monopoli, tarif, dan subsidi untuk melindungi industri dalam negeri dan memastikan keseimbangan perdagangan yang menguntungkan. Pemerintah memberlakukan peraturan ketat mengenai impor dan ekspor, untuk menjaga neraca perdagangan yang positif dan mengamankan pasokan emas batangan. Pengejaran bullionisme sering kali mengorbankan prioritas ekonomi lainnya, seperti mempromosikan produksi dalam negeri dan mendorong inovasi. Terlepas dari keterbatasannya, pengaruh bullionisme bertahan selama berabad-abad, membentuk strategi ekonomi negara-negara di seluruh dunia.

b. Perdagangan sebagai Permainan Zero-Sum

Merkantilis percaya bahwa perdagangan antar negara adalah permainan zero-sum, di mana keuntungan satu negara berarti kerugian negara lain. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan harus dirancang untuk memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Pola pikir ini menghasilkan kebijakan-kebijakan seperti tarif dan pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mencegah keluarnya emas batangan (Shanlin, 2018).

Prinsip zero sum ini dapat terlihat pada dinamika ekonomi politik kontemporer dalam konteks Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada tahun 2013. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan jaringan rute perdagangan dan mendorong konektivitas ekonomi. Berdasarkan hasil riset Fotak tahun 2022 menemukan bahwa negara-negara yang terlibat dalam BRI bersama Tiongkok sering mengalami penurunan perdagangan dengan negara lainnya yang tidak terlibat dalam BRI (Fotak et al., 2022), seperti Pakistan dan Srilanka yang meskipun mengalami peningkatan signifikan dalam perdagangan dengan Tiongkok, namun mengalami penurunan perdagangan dengan negara-negara di Barat yang berada di luar kerangka kerja BRI. Sehingga menunjukkan prinsip zero sum game bagi Tiongkok.

c. Proteksionisme

Kebijakan proteksionis seperti pembatasan impor, subsidi untuk industri dalam negeri, dan hak monopoli untuk produsen lokal, dianggap perlu untuk melindungi ekonomi nasional dari persaingan asing. Dalam pandangan merkantilisme yang menekankan pentingnya peran negara dan akumulasi kekayaan melalui surplus perdagangan, kebijakan proteksionis dianggap perlu untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing dan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu bentuk proteksionisme yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah berupa pembatasan impor dengan cara menaikkan tarif yang tinggi atau menetapkan kuota guna mengurangi jumlah barang dari luar masuk ke pasar domestik. Hal ini menguntungkan produsen lokal untuk terhindar dari tekanan kompetisi dari produk asing dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih bersaing. Cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan subsidi kepada industri dalam negeri guna menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Contoh kontemporer dari kebijakan proteksionis ini adalah subsidi pertanian yang ditetapkan di Uni Eropa mencapai €38.2 milyar untuk dibayarkan langsung kepada petani dan €13.8 milyar ditujukan untuk pembangunan desa serta sekitar €2.4 milyar dialokasikan untuk mendukung pasar bagi produk-produk agrikultur (European Commission, 2021).

Pemerintah Amerika Serikat juga menggunakan kebijakan proteksionisme, salah satu buktinya adalah pada tahun 2018, pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump menetapkan tarif tinggi terhadap barang-barang yang berasal dari Tiongkok senilai total \$350 miliar. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah Amerika dengan alasan bahwa Tiongkok telah melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dan melanggar kekayaan intelektual. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah melindungi industri dalam negeri AS terutama sektor baja dan aluminium yang terancam oleh produk impor Tiongkok yang lebih murah (Niu, 2023).

d. Pentingnya Peran Negara

Negara memainkan peran sentral dalam mengatur perdagangan, menentukan kebijakan fiskal, dan memastikan stabilitas ekonomi. Para merkantilis menekankan pentingnya negara yang kuat untuk mendukung ekspansi ekonomi dan perdagangan. Negara memiliki peran aktif dalam mengendalikan dan mengatur kegiatan ekonomi untuk membangun kekayaan dan mengamankan kekuasaan negara.

Sebagai pengatur ekonomi, negara menerapkan kebijakan yang mengendalikan perdagangan dan perdagangan untuk menjaga neraca perdagangan yang positif. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti tarif impor, subsidi untuk industri utama, dan undang-undang navigasi yang memprioritaskan kesejahteraan industri dalam negeri sambil membatasi persaingan asing. Sebagai contoh, Undang-Undang Navigasi Inggris mengamanatkan bahwa barang-barang tertentu hanya dapat diangkut dengan kapal-kapal Inggris, untuk memastikan kekuatan ekonomi dan angkatan laut. Negara secara aktif mendukung perusahaan dagang dan manufaktur dengan menumbuhkan lingkungan legislatif yang kondusif bagi ekspansi ekonomi dan lapangan kerja domestik, seperti melalui monopoli dan hak eksklusif yang mendukung perusahaan lokal dan mencegah ketergantungan pada pemasok asing (McCusker, 1996). Di pasar-pasar kolonial, negara memiliki kontrol yang cukup besar atas sumber daya dan perdagangan yang berharga, seperti yang terlihat pada perdagangan tembakau yang dikendalikan oleh negara di Peru. Kendali ini, meskipun terkadang ditantang oleh masalah fiskal dan perdagangan ilegal, tetap memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan menyediakan sumber pendapatan bagi negara untuk memperkuat pengaruhnya (Cerón, 2014).

Merkantilisme juga menggarisbawahi gagasan bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperkuat kekuatan politik dan militer negara. Negara-negara sering menggunakan kebijakan ekonomi untuk memperkuat kemampuan militer mereka, terutama ketika negara-negara Eropa mempersiapkan dan membiayai perang. Hal ini mengharuskan pergeseran kelembagaan yang substansial, termasuk peningkatan pajak dan konsolidasi otoritas negara atas masalah fiskal untuk memenuhi tuntutan pertahanan nasional (Enciso, 2016). Dengan demikian, negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pembangun infrastruktur ekonomi dan kerangka hukum yang menopang ekonomi pasar yang berfungsi. Dalam beberapa kasus, negara bahkan bertindak sebagai “pengusaha pilihan terakhir,” yang turun tangan untuk memandu pembangunan ekonomi ketika inisiatif swasta gagal (Reinert, 1999).

Pendekatan terpusat pada regulasi ekonomi ini menumbuhkan rasa nasionalisme baru, menghubungkan kemakmuran negara dengan kesejahteraan warganya dan secara bertahap memperkuat konsep negara-bangsa. Merkantilisme, dengan menggantikan fragmentasi feodal dengan kebijakan ekonomi yang lebih terpusat, mendukung struktur politik yang kohesif yang menekankan peran negara dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan. Intervensi negara yang meningkat dalam urusan ekonomi dengan demikian mencerminkan tujuan politik dan sosial

yang lebih luas di Eropa modern awal, dan dalam banyak hal, merkantilisme mengantisipasi aspek-aspek kapitalisme modern, di mana kebijakan negara membentuk dinamika pasar (Lloyd, 2023)

2.5 Tokoh-Tokoh Utama Pemikiran Merkantilisme

a. Jean Bodin (1530-1596)

Jean Bodin adalah salah satu pemikir merkantilis awal yang mengembangkan teori tentang uang dan nilai. Jean Bodin adalah seorang ahli hukum dan filsuf politik Prancis, anggota Parlement of Paris dan profesor hukum di Toulouse (Lloyd, 2023). Ia mengamati bahwa peningkatan jumlah emas dan perak di Eropa akibat eksplorasi dunia menyebabkan inflasi dan kenaikan harga. Dia juga membahas faktor-faktor lain seperti monopoli, menurunnya pasokan domestik, dan gaya hidup mewah kaum elit sebagai penyebab inflasi.

Salah satu kontribusi Bodin yang paling signifikan terhadap pemikiran merkantilis adalah keyakinannya akan pentingnya pemerintah pusat yang kuat untuk mengatur aktivitas ekonomi dan memastikan kemakmuran negara. Dia berpendapat bahwa negara harus mengontrol perdagangan, mempromosikan industri domestik, dan mengakumulasi logam mulia untuk meningkatkan kekayaan dan kekuasaannya. Gagasan Bodin menjadi dasar bagi kebijakan merkantilisme yang kemudian diterapkan oleh pemerintah Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Secara keseluruhan, Jean Bodin memainkan peran penting dalam membentuk teori dan praktik ekonomi merkantilisme selama periode sejarah ini.

Salah satu aspek penting dari filosofi merkantilisme Bodin adalah penekanannya pada gagasan nasionalisme ekonomi, yang memprioritaskan kepentingan negara di atas kebebasan ekonomi individu. Dia percaya bahwa kekayaan dan kekuasaan suatu negara terkait langsung dengan kemampuannya untuk mengontrol dan memanipulasi sumber daya ekonominya (Fontanel et al., 2008). Keyakinan akan intervensi negara dalam ekonomi ini merupakan perubahan dari teori ekonomi sebelumnya yang menekankan prinsip-prinsip *laissez-faire*. Gagasan Bodin sangat berpengaruh dalam membentuk kebijakan ekonomi negara-negara Eropa, ketika mereka berusaha untuk memperluas kekayaan dan kekuasaan mereka melalui praktik-praktik merkantilisme.

b. Thomas Mun (1571-1641)

Thomas Mun adalah seorang tokoh penting dalam pemikiran merkantilis Inggris. Dia adalah Direktur East Asian Company dan pendukung utama gagasan bahwa kekayaan suatu negara ditentukan oleh akumulasi logam mulia. Mun percaya bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mempromosikan ekspor dan membatasi impor untuk memastikan keseimbangan perdagangan yang positif. Karyanya, **England's Treasure by Foreign Trade**, menguraikan prinsip-prinsip ini dan memengaruhi kebijakan ekonomi Inggris selama era merkantilisme (Karstensson, 2003). Secara keseluruhan, baik Bodin maupun Mun berkontribusi pada pengembangan teori merkantilisme dan keyakinan akan intervensi negara dalam urusan ekonomi untuk kepentingan bangsa.

Dia menulis tentang pentingnya perdagangan luar negeri dan bagaimana meningkatkan kekayaan negara dengan surplus perdagangan. Mun berpendapat bahwa negara harus selalu berusaha mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpor. Dia percaya bahwa neraca perdagangan yang positif akan mengarah pada akumulasi emas batangan, yang dipandang sebagai ukuran kekayaan suatu negara pada saat itu. Mun menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam mengatur perdagangan untuk mencapai tujuan ini, termasuk penggunaan tarif dan subsidi untuk melindungi industri dalam negeri dan mempromosikan ekspor. Ide-idenya berperan penting dalam membentuk kebijakan ekonomi di Eropa dan memengaruhi perkembangan praktik merkantilisme pada abad ke-17 dan ke-18.

Namun, teori-teori Mun bukannya tanpa kritik. Beberapa ekonom berpendapat bahwa fokus pada akumulasi emas melalui surplus perdagangan dapat mengarah pada kebijakan proteksionis yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Mereka percaya bahwa pendekatan yang lebih seimbang terhadap perdagangan, yang memungkinkan aliran bebas barang dan jasa, pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Terlepas dari kritik-kritik ini, ide-ide Mun terus berpengaruh di banyak negara Eropa, membentuk kebijakan ekonomi mereka untuk tahun-tahun berikutnya.

c. Jean Baptiste Colbert (1619-1683)

Jean Baptiste Colbert, seorang administrator Prancis, adalah arsitek utama kebijakan ekonomi Prancis di bawah Louis XIV. Colbert menerapkan kebijakan merkantilis untuk mendorong swasembada ekonomi dan melindungi industri Prancis dari persaingan asing. Kebijakannya

berfokus pada peningkatan ekspor, pengurangan impor, dan pengembangan kemampuan manufaktur dalam negeri untuk memperkuat ekonomi Prancis (Lux, 2013).

Dia memperkenalkan serangkaian kebijakan proteksionis yang dikenal sebagai “Colbertisme,” termasuk subsidi untuk perusahaan domestik, pembatasan impor, dan hak monopoli untuk perusahaan nasional. Kebijakan-kebijakan ini membantu Prancis menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dominan di Eropa selama abad ke-17. Warisan Colbert sebagai perencana dan administrator ekonomi yang terampil masih diakui hingga saat ini. Penekanannya pada intervensi negara dalam perekonomian menjadi dasar bagi merkantilisme di Prancis, yang bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan melalui perdagangan. Dampak Colbert terhadap kebijakan ekonomi Prancis masih dapat dilihat dalam perdebatan modern mengenai proteksionisme dan kebijakan industri.

Salah satu aspek kunci dari Colbertisme adalah fokus untuk mempromosikan industri dalam negeri dan melindunginya dari persaingan asing. Colbert menerapkan sistem tarif dan pembatasan perdagangan untuk membatasi impor dan meningkatkan ekspor, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Prancis memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Selain itu, ia memberikan hak monopoli kepada industri-industri tertentu, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa persaingan dan meningkatkan keuntungan mereka. Pendekatan intervensionis terhadap ekonomi ini kontroversial pada saat itu, tetapi pada akhirnya membantu Prancis memantapkan dirinya sebagai pemain ekonomi utama di Eropa. Saat ini, warisan Colbert masih hidup dalam perdebatan yang sedang berlangsung mengenai peran pemerintah dalam membentuk kebijakan ekonomi dan mendukung industri dalam negeri.

d. Sir William Petty (1623-1687)

William Petty adalah seorang dokter, ahli epidemiologi, ahli ekonomi politik, demografi, kartografer, dan administrator. Dia adalah tokoh penting dalam ekonomi merkantilis Inggris yang memperkenalkan gagasan nilai dan pembagian kerja. Ia mengembangkan teori nilai berdasarkan tenaga kerja dan juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Banta, 1987). Karya Petty meletakkan dasar bagi ekonomi klasik dan memengaruhi para ekonom setelahnya seperti Adam Smith. Penekanannya pada tenaga kerja sebagai sumber nilai dan pertumbuhan ekonomi terus menjadi konsep sentral dalam teori ekonomi modern.

Pembagian kerja berdasarkan karya Petty dianggap sebagai komponen kunci dari pembangunan ekonomi dan efisiensi, karena memungkinkan individu untuk berspesialisasi dalam tugas-tugas tertentu dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kontribusi Petty pada pemikiran ekonomi telah berdampak pada bidang ini, membentuk cara kita memahami hubungan antara tenaga kerja, nilai, dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, gagasan Petty telah teruji oleh waktu dan tetap relevan dalam lanskap ekonomi saat ini. Wawasannya tentang pentingnya tenaga kerja dan pembagian tugas telah memberikan dampak yang bertahan lama pada cara kita mendekati teori dan kebijakan ekonomi. Melalui karyanya, Petty telah membantu membentuk cara kita berpikir tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

2.6 Kesimpulan

Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menempatkan fokus besar pada pentingnya perdagangan luar negeri, surplus perdagangan, dan akumulasi kekayaan melalui emas dan logam mulia. Teori ini mendominasi kebijakan ekonomi di banyak negara Eropa selama abad ke-16 hingga abad ke-18. Meskipun para ekonom klasik seperti Adam Smith kemudian mengkritik banyak aspek merkantilisme, pemikiran merkantilisme terus menjadi fondasi penting dalam sejarah ekonomi, terutama dalam pengembangan konsep proteksionisme dan peran negara dalam perekonomian.

Selain itu, merkantilisme juga meletakkan dasar bagi pendirian kerajaan kolonial dan eksploitasi sumber daya dari daerah jajahan untuk menguntungkan negara induk. Penekanan pada akumulasi kekayaan melalui perdagangan juga mengarah pada pengembangan monopoli dan pembentukan perusahaan perdagangan seperti British East India Company. Secara keseluruhan, merkantilisme memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan praktik ekonomi di banyak negara pada periode modern awal.

2.7 Latihan dan Refleksi

1. Jelaskan konsep bulionisme dalam pemikiran merkantilisme dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan ekonomi negara.
2. Bagaimana Jean Baptiste Colbert menggunakan kebijakan proteksionis untuk memperkuat ekonomi Prancis?

3. Apa perbedaan utama antara pemikiran merkantilis Thomas Mun dan Sir William Petty mengenai cara meningkatkan kekayaan nasional?
4. Mengapa negara-negara Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 cenderung menganut kebijakan merkantilisme, dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi hubungan internasional antar negara tersebut?
5. Diskusikan peran kolonialisme dalam kebijakan merkantilisme. Bagaimana eksploitasi sumber daya di koloni membantu negara induk memperkaya diri?
6. Bagaimana konsep merkantilisme berkontribusi terhadap Revolusi Industri di Eropa, terutama dalam hal perkembangan industri dan perdagangan?

2.8 Glosarium

- Bulionisme: Kebijakan merkantilis yang menekankan akumulasi emas dan logam mulia sebagai simbol kekuatan ekonomi.
- Zero-Sum Game^{**}: Konsep bahwa keuntungan satu pihak dalam perdagangan internasional berarti kerugian pihak lain.
- Proteksionisme^{**}: Kebijakan ekonomi yang melindungi industri dalam negeri melalui pembatasan impor dan pemberian subsidi.

2.9 Penugasan: Analisis dan Refleksi Pemikiran Merkantilisme

Instruksi:

Esai Refleksi (1-2 Halaman):

Pilih satu faktor utama yang mendorong munculnya merkantilisme, seperti runtuhnya feodalisme, kemajuan sistem perdagangan, atau perubahan politik. Jelaskan bagaimana faktor tersebut memengaruhi kebangkitan merkantilisme di Eropa dan relevansinya dalam konteks globalisasi modern. Gunakan contoh kebijakan merkantilis atau praktik ekonomi masa kini yang menunjukkan pola serupa dengan prinsip merkantilisme klasik.

Analisis Tokoh Merkantilisme (1-2 Halaman):

Pilih dua tokoh merkantilis, misalnya Thomas Mun dan Jean Baptiste Colbert. Bandingkan pandangan dan kebijakan mereka mengenai pengelolaan kekayaan dan perdagangan. Jelaskan bagaimana pandangan mereka diterapkan dalam konteks masing-masing negara dan dampak kebijakan mereka terhadap ekonomi negara tersebut. Berikan pandangan kritis mengenai

bagaimana kebijakan proteksionis yang mereka ajukan masih diterapkan atau diperdebatkan dalam ekonomi modern.

Batas Waktu: 2 Minggu

Format Pengumpulan: PDF dengan nama file:

"Penugasan_Merkantilisme_NamaMahasiswa.pdf"

BAB III

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK KLASIK

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran Ekonomi Politik Klasik Adam Smith dan David Richardo

Menjelaskan

Konsep-konsep dasar dalam Pemikiran Ekonomi Politik

Adam Smith

Menjelaskan

Konsep-konsep dasar dalam Pemikiran Ekonomi Politik

Adam Smith

Menjelaskan

Asumsi utama dari tokoh-tokoh pemikir

Ekonomi Politik Klasik

BAB III

PEMIKIRAN EKONOMI KLASIK - ADAM SMITH DAN DAVID RICARDO

3.1 Pendahuluan

Pemikiran ekonomi klasik menandai lahirnya teori-teori fundamental tentang bagaimana ekonomi modern berfungsi, terutama dalam hal pasar, harga, dan peran negara. Dua tokoh utama dalam mazhab ini adalah Adam Smith dan David Ricardo, yang mengembangkan teori-teori tentang bagaimana pasar beroperasi untuk memenuhi kebutuhan produsen dan konsumen. Konsep Adam Smith tentang tangan tak terlihat dan teori keunggulan komparatif Ricardo terus memengaruhi pemikiran ekonomi saat ini, menyoroti dampak abadi dari pemikiran ekonomi klasik pada ekonomi modern. Ide-ide mereka meletakkan dasar untuk memahami dinamika pasar dan hubungan perdagangan dalam ekonomi global.

Para ekonom klasik percaya pada gagasan pasar yang dapat mengatur dirinya sendiri, di mana persaingan dan penawaran serta permintaan secara alami akan menghasilkan hasil yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka menekankan pentingnya perdagangan bebas, intervensi pemerintah yang terbatas, dan pembagian kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Prinsip-prinsip ini terus membentuk kebijakan dan teori ekonomi, dengan banyak ekonom kontemporer yang memanfaatkan wawasan Smith dan Ricardo dalam analisis dinamika pasar dan rekomendasi kebijakan mereka. Di dunia di mana globalisasi dan kemajuan teknologi membentuk kembali lanskap ekonomi, ide-ide ekonom klasik tetap relevan dalam memahami prinsip-prinsip fundamental yang mendukung fungsi ekonomi modern. Dengan mendorong kompetisi, inovasi, dan spesialisasi, prinsip-prinsip ini telah berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan standar hidup di seluruh dunia. Karena ekonomi terus berkembang dan menghadapi tantangan-tantangan baru, relevansi abadi dari gagasan-gagasan ekonomi klasik ini berfungsi sebagai kerangka kerja pemandu bagi para pembuat kebijakan dan ekonom yang ingin menavigasi ekonomi global yang semakin kompleks.

3.2 Adam Smith: Bapak Ekonomi Modern

Adam Smith (1723-1790) adalah seorang filsuf moral dan ekonom yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Adam Smith, lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia, dibesarkan oleh ibunya setelah ayahnya meninggal dunia. Ia memulai pendidikannya di Universitas Glasgow pada usia 14 tahun, di mana ia belajar filsafat moral di bawah bimbingan Francis Hutcheson, yang membentuk fondasi intelektualnya. Smith kemudian kuliah di Balliol College, Oxford, meskipun ia mengkritik metode pendidikannya. Sekembalinya ke Skotlandia, ia menjadi dosen dan kemudian profesor filsafat moral di Universitas Glasgow, di mana ia mendalami etika, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 1759, ia menerbitkan *The Theory of Moral Sentiments*, yang berfokus pada empati manusia dan perilaku etis, yang menandai kebangkitannya sebagai pemikir utama Pencerahan (Skinner, 2001).

Karyanya yang paling terkenal, *The Wealth of Nations* (1776), merumuskan dasar-dasar ekonomi pasar bebas. Dalam bukunya, Smith menjelaskan bagaimana pasar bekerja secara alami melalui mekanisme harga dan bagaimana tindakan individu untuk mencapai kepentingan pribadi secara tidak langsung menguntungkan masyarakat secara keseluruhan melalui “tangan yang tidak terlihat”. Gagasan Smith tentang pasar bebas dan tangan yang tidak terlihat memiliki dampak yang bertahan lama pada teori dan kebijakan ekonomi, mempengaruhi generasi ekonom dan pembuat kebijakan. Kontribusinya di bidang etika, ekonomi, dan hukum terus dipelajari dan diperdebatkan hingga saat ini.

3.3 Poin-poin Penting dari Adam Smith

a. Teori Moral Sentiments dan Wealth of Nations

Teori sentimen moral yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam karyanya "The Theory of Moral Sentiments" merupakan landasan penting dalam pemikiran filsafat moral dan memiliki kaitan erat dengan ekonomi politik. Dalam teori ini, Smith menekankan bahwa penilaian moral kita didasarkan pada emosi dan kemampuan untuk berempati, yang memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Konsep ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dan norma-norma masyarakat sangat memengaruhi moralitas individu. Dengan demikian, pemikiran Smith memberikan wawasan tentang bagaimana sentimen moral dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kesejahteraan sosial dalam konteks ekonomi politik.

Salah satu inti dari teori Smith adalah konsep empati, yang ia anggap sebagai kemampuan untuk berbagi perasaan orang lain. Kemampuan ini penting untuk penilaian moral, karena memungkinkan individu menilai tindakan mereka berdasarkan dampaknya terhadap orang lain (Khalil, 2023). Smith berpendapat bahwa evaluasi moral tidak hanya bergantung pada pertimbangan rasional, tetapi juga pada respons emosional. Dalam konteks ekonomi politik, ini berarti bahwa keputusan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan moral, karena tindakan individu dalam ekonomi selalu berdampak pada masyarakat luas.

Smith juga memperkenalkan konsep "pengamat tidak memihak," yang berfungsi sebagai representasi perspektif objektif. Sosok ini membantu individu mengevaluasi tindakan dan emosi mereka, mendorong mereka untuk berperilaku secara moral (Ozler, 2024). Dalam kerangka ekonomi politik, pengamat tidak memihak dapat diartikan sebagai alat untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Rasa malu juga memainkan peran penting dalam teori moral Smith, berfungsi sebagai penghalang terhadap perilaku tidak etis. Rasa malu muncul dari kekhawatiran akan penilaian sosial dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain (Ozler, 2024). Dalam konteks ekonomi politik, ini dapat dilihat sebagai pengaruh sosial yang membentuk perilaku ekonomi, di mana individu dan perusahaan mungkin lebih berhati-hati dalam tindakan mereka karena takut akan stigma atau penilaian negatif dari masyarakat.

Selanjutnya, pemikiran Smith dalam konteks masyarakat komersial menunjukkan bahwa sentimen moral seperti keadilan dan kebijaksanaan sangat penting untuk menjaga tatanan sosial yang etis (Arevuo, 2023). Hubungan antara kepentingan pribadi dan sentimen moral menekankan bahwa dalam pasar bebas, tindakan individu harus berkontribusi pada kesejahteraan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi perlu dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral agar dapat mendukung keadilan sosial.

Meskipun terdapat kritik terhadap penekanan Smith pada emosi dan simpati, yang mungkin menyebabkan relativisme moral, ia tetap berpendapat bahwa ada struktur penilaian moral universal yang berakar pada sifat manusia. Teori sentimen moralnya dapat dilihat sebagai

respons terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat komersial modern, termasuk isu-isu korupsi dan ketidaksetaraan (Douglass, 2023).

Dengan demikian, teori sentimen moral Adam Smith memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara emosi, moralitas, dan ekonomi politik. Ia menunjukkan bahwa pertimbangan moral harus menjadi bagian integral dari kebijakan dan praktik ekonomi, sehingga menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan.

b. Harga dan Teori Harga

Smith mengembangkan konsep *natural price* atau harga alamiah and *market price* atau harga pasar. Harga alamiah adalah nilai yang ditentukan oleh biaya produksi, yang terdiri dari tiga komponen utama: Tenaga kerja, modal, dan tanah. (Skinner, 1989) Harga pasar berfluktuasi di sekitar harga alami, tetapi pasar cenderung menuju keseimbangan di mana harga alami tercapai dalam jangka panjang. Biaya produksi menentukan harga, tetapi pasar yang kompetitif memungkinkan harga bergerak naik dan turun. Peran penawaran dan permintaan sangat penting dalam menentukan harga pasar jangka pendek, tetapi Smith berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas, harga alami akan tercapai, yang menguntungkan produsen dan konsumen.

Dengan cara ini, tangan pasar yang tidak terlihat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan ekonomi beroperasi pada potensi penuhnya. Smith percaya bahwa persaingan di antara para produsen akan mendorong harga turun ke tingkat alamiahnya, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang adil dan efisien. Gagasan tentang harga alami dan tangan tak terlihat yang memandu pasar ini telah menjadi landasan teori ekonomi klasik selama berabad-abad. Wawasan Smith tentang cara kerja pasar telah memberikan dampak yang bertahan lama di bidang ekonomi dan terus membentuk pemahaman kita tentang bagaimana pasar berfungsi saat ini.

c. Invisible Hand

Konsep "tangan tak terlihat" (*invisible hand*) yang diperkenalkan oleh Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations* (1776) adalah ide dasar dalam ekonomi yang menggambarkan sifat pasar bebas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Smith berargumen bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan diri mereka sendiri, berusaha memaksimalkan keuntungan, kepuasan, atau utilitas. Ketika individu mengejar kepentingan pribadi mereka, mereka secara

tidak langsung menciptakan barang dan jasa yang diinginkan oleh orang lain. Dalam konteks pasar yang kompetitif, tindakan individu secara kolektif membantu mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang paling produktif, di mana permintaan dari konsumen mendorong produsen untuk menyalurkan sumber daya dalam menghasilkan barang yang diperlukan (Stiglitz & Rosengard, 1988)

Mekanisme harga juga memainkan peran penting dalam tangan tak terlihat, di mana harga ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Ketika permintaan meningkat, harga naik, yang mengindikasikan kepada produsen untuk meningkatkan pasokan, sementara penurunan permintaan akan menurunkan harga dan mendorong produsen untuk mengurangi pasokan. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa di negara-negara dengan pasar yang lebih bebas, seperti Singapura dan Hong Kong, pertumbuhan ekonomi dan inovasi lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki kontrol pemerintah yang lebih ketat (Bank, 2021)

Meskipun setiap individu bertindak demi kepentingan pribadi, Smith berpendapat bahwa hasil dari interaksi ini dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, karena persaingan antara bisnis mendorong inovasi dan perbaikan kualitas barang serta layanan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial (Friedman, 2016). Konsep ini juga mendukung pandangan bahwa intervensi pemerintah yang minimal lebih diutamakan, karena pasar dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif tanpa pengendalian sentral.

d. Peran Negara dalam Ekonomi

Meskipun Smith adalah pendukung pasar bebas, ia percaya bahwa negara memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar. Negara juga harus mengatasi kegagalan pasar, seperti monopoli, dan menyediakan barang publik, seperti keamanan nasional dan pendidikan. Smith menganjurkan kebijakan *laissez-faire* (pemerintah tidak secara langsung mengintervensi ekonomi), tetapi ia juga menekankan bahwa negara harus menyediakan institusi yang mendukung pasar untuk berfungsi secara kompetitif. Dengan demikian, Smith percaya bahwa keseimbangan antara intervensi pemerintah dan prinsip-prinsip pasar bebas diperlukan untuk ekonomi yang sehat. Ia berpendapat bahwa negara harus membuat dan menegakkan hukum yang melindungi hak milik dan memastikan persaingan yang adil, sekaligus menyediakan jaring pengaman bagi mereka

yang membutuhkan. Secara keseluruhan, pandangan Smith tentang peran negara dalam perekonomian meletakkan dasar bagi teori dan kebijakan ekonomi modern (Goldsmith, 1995).

Gagasan Smith tentang peran pemerintah dalam perekonomian terus mempengaruhi pemikiran ekonomi dan pembuatan kebijakan hingga hari ini. Banyak ekonom dan pembuat kebijakan masih mengacu pada konsepnya tentang pendekatan yang seimbang, di mana pemerintah menyediakan peraturan dan dukungan yang diperlukan sementara juga memungkinkan pasar untuk beroperasi secara bebas. Keseimbangan antara intervensi dan *laissez-faire* ini telah menjadi titik perdebatan penting dalam debat ekonomi, dengan beberapa pihak yang memperdebatkan lebih banyak keterlibatan pemerintah dan pihak lain yang mengadvokasi pendekatan lepas tangan. Terlepas dari perdebatan yang sedang berlangsung, prinsip-prinsip Smith tetap menjadi landasan teori ekonomi dan telah membentuk cara kita memahami dan mendekati kebijakan ekonomi.

e. Pembagian Kerja (Division of Labor)

Salah satu konsep penting lainnya yang diperkenalkan oleh Smith adalah *division of labour*, yang menyatakan bahwa spesialisasi dalam produksi dapat meningkatkan produktivitas. Dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, tenaga kerja dapat lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak barang dalam waktu yang lebih singkat (Rosenberg, 1965). Ide ini merevolusi cara industri dan bisnis beroperasi, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan output. Pembagian kerja juga menyoroti pentingnya kerja sama dan kolaborasi di antara para pekerja untuk mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ekonomi Smith telah memberikan dampak yang bertahan lama pada cara kita menyusun sistem ekonomi dan pendekatan produksi dan perdagangan. Sebagai contoh, di pabrik pembuatan jarum, pembagian kerja memungkinkan seorang pekerja untuk berspesialisasi dalam satu langkah produksi, sehingga mempercepat proses produksi secara keseluruhan. Spesialisasi ini merupakan kunci dalam meningkatkan produktivitas industri selama Revolusi Industri.

Smith mengilustrasikan pembagian kerja dengan produksi peniti di sebuah pabrik:

1. **Tanpa pembagian kerja**, satu orang mungkin akan mencoba membuat peniti dari awal hingga akhir, melakukan tugas-tugas seperti menarik kawat, meluruskannya, memotongnya, mengasah ujungnya, dan menambahkan kepala. Proses ini akan memakan waktu, dan seorang pekerja mungkin hanya menghasilkan beberapa pin per hari.

2. **Dengan pembagian kerja**, proses pembuatan pin dibagi menjadi beberapa langkah yang berbeda, dengan masing-masing pekerja mengkhususkan diri pada satu tugas.

Sebagai contoh:

- Seorang pekerja menarik kawat,
- Pekerja lain memotong kawat,
- Pekerja ketiga mengasah ujungnya,
- Pekerja keempat memasang kepala, dan seterusnya.

Dengan melakukan spesialisasi, setiap pekerja menjadi sangat terampil dalam tugas khusus mereka, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Hasilnya, sekelompok kecil pekerja dapat menghasilkan ribuan pin dalam satu hari, secara dramatis meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan satu pekerja yang melakukan semua tugas sendirian.

Smith berpendapat bahwa pembagian kerja ini meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi, karena para pekerja yang berfokus pada tugas-tugas tertentu sering kali menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi mereka. Selain itu, prinsip ini meluas melampaui pabrik-pabrik individual hingga ke seluruh perekonomian, di mana industri dan negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif, yang mengarah pada perdagangan global yang lebih efisien dan penciptaan kekayaan.

Selain itu, gagasan Smith meletakkan dasar bagi jalur perakitan modern, di mana para pekerja berfokus pada tugas-tugas tertentu untuk merampingkan produksi. Metode ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi kesalahan dan pemborosan, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan. Konsep pembagian kerja terus menjadi aspek fundamental dalam ekonomi dan manufaktur, yang membentuk cara perusahaan beroperasi dan berinovasi dalam ekonomi global saat ini. Penekanan Smith pada spesialisasi dan kerja sama di antara para pekerja tetap relevan dalam industri di seluruh dunia, mendorong kemajuan dan kemajuan di berbagai sektor.

3.3 David Ricardo: Hukum Keunggulan Komparatif dan Diminishing Returns

David Ricardo (1772-1823) adalah seorang ekonom Inggris dan tokoh berpengaruh dalam ekonomi klasik. Lahir di London dari keluarga Yahudi Sephardic yang kaya, Ricardo memulai karirnya di bidang keuangan, mengikuti jejak ayahnya sebagai pialang saham. Namun, setelah konflik pribadi menyebabkan perpisahan dengan keluarganya (O'Brien, 2003), Ricardo

mengejar kesuksesan finansialnya dan menjadi orang kaya yang mandiri. Kontribusi Ricardo yang paling terkenal di bidang ekonomi adalah teori keunggulan komparatif, yang menyatakan bahwa negara-negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang dapat mereka produksi dengan paling efisien, bahkan jika mereka bukan yang terbaik dalam memproduksi semua barang. Teori ini memiliki dampak yang bertahan lama pada perdagangan internasional dan globalisasi. Selain itu, Ricardo juga memperkenalkan konsep hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*), yang menunjukkan bahwa semakin banyak sumber daya yang ditambahkan ke dalam produksi, peningkatan output pada akhirnya akan menurun. Karyanya meletakkan dasar bagi banyak teori ekonomi modern dan tetap berpengaruh di bidang ini hingga sekarang.

Ricardo beralih ke bidang ekonomi setelah membaca buku *The Wealth of Nations* karya Adam Smith. Kontribusinya yang paling terkenal termasuk teori keunggulan komparatif, yang menjelaskan bagaimana negara-negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang yang dapat mereka produksi dengan paling efisien. Ia juga mengembangkan teori nilai tenaga kerja dan teori sewa, yang diuraikan dalam karya utamanya, *Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Gagasan Ricardo mengenai perdagangan bebas, upah, dan distribusi pendapatan memengaruhi pemikiran ekonomi. Ia juga menjabat sebagai anggota Parlemen Inggris dan mengadvokasi reformasi ekonomi.

3.4 Poin-poin Penting dari David Ricardo:

a. Hukum Hasil yang Semakin Menurun (Law of Diminishing Returns)

Ricardo mengamati bahwa ketika input produksi seperti tanah atau modal ditingkatkan secara terus menerus, output akan meningkat, tetapi pada titik tertentu, output tambahan yang dihasilkan dari input tambahan akan berkurang. Hal ini disebut dengan hukum hasil yang semakin berkurang. sebagai **prinsip produktivitas marjinal** yang semakin berkurang, menyatakan bahwa semakin banyak unit input variabel (seperti tenaga kerja atau modal) ditambahkan ke input tetap (seperti tanah atau mesin), output tambahan (atau keuntungan) yang dihasilkan oleh setiap unit input baru pada akhirnya akan mulai berkurang (Kurz, 2016). Dengan kata lain, setelah titik tertentu, menambahkan lebih banyak input variabel akan menghasilkan peningkatan output yang semakin kecil. Sebagai contoh, di bidang pertanian,

menambahkan pupuk ke ladang akan meningkatkan produksi tanaman, tetapi setelah titik tertentu, setiap penambahan pupuk akan memberikan hasil yang semakin kecil. Hal ini menjelaskan mengapa produktivitas lahan yang sama tidak dapat terus meningkat tanpa batas.

Pada abad ke-19, di Inggris, harga lahan pertanian meningkat karena kurangnya lahan yang dapat ditanami, yang mengakibatkan berkurangnya hasil produktivitas pada lahan yang sudah jenuh dengan input. Hal ini akhirnya mendorong adopsi teknik dan praktik pertanian baru, seperti rotasi tanaman dan penggunaan mesin, untuk meningkatkan produktivitas tanpa hanya mengandalkan penambahan input. Pelajaran yang dapat dipetik dari contoh historis ini adalah bahwa ada batasan seberapa banyak input yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan output, dan menemukan solusi inovatif sangat penting untuk praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan memahami konsep diminishing returns, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai cara memaksimalkan produktivitas di lahan mereka.

b. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage)

Salah satu kontribusi Ricardo yang paling signifikan adalah ****teori keunggulan komparatif****, yang menyatakan bahwa meskipun satu negara dapat memproduksi semua barang secara lebih efisien daripada negara lain, masih ada keuntungan yang bisa didapat dari perdagangan. Negara-negara harus fokus pada produksi barang dengan keunggulan komparatif, atau biaya peluang yang lebih rendah, dan berdagang dengan negara lain untuk barang lain (Kurz, 2016). Teori ini menekankan pentingnya spesialisasi dan perdagangan untuk memaksimalkan produksi dan efisiensi secara keseluruhan. Dengan berfokus pada produksi barang yang relatif lebih efisien, negara-negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan dengan negara lain yang memiliki keunggulan komparatif pada barang yang berbeda. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, teori keunggulan komparatif menyoroti manfaat kerja sama dan perdagangan global di dunia yang saling terhubung saat ini.

Konsep keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh David Ricardo berkaitan erat dengan biaya peluang. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara atau individu harus berspesialisasi dalam produksi barang atau jasa yang dapat mereka hasilkan dengan biaya peluang yang lebih rendah daripada negara atau individu lain, meskipun negara atau individu tersebut mungkin kurang efisien dalam hal produktivitas absolut. Biaya peluang mengacu pada

nilai atau keuntungan yang hilang ketika memilih satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Dalam konteks perdagangan internasional, negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang memiliki biaya peluang yang lebih rendah untuk memproduksi barang tersebut dibandingkan dengan negara lain.

Mari kita ilustrasikan hal ini dengan dua negara: Negara A dan Negara B, yang memproduksi gandum dan kain.

- Negara A sangat efisien dalam memproduksi gandum dan kain. Dalam satu hari: Negara A dapat memproduksi 10 unit gandum atau 5 unit kain.
- Negara B kurang efisien dalam memproduksi kedua barang tersebut. Dalam satu hari: Negara B dapat memproduksi 6 unit gandum atau 4 unit kain.

Sekilas, Negara A lebih baik dalam memproduksi kedua barang tersebut. Namun, Ricardo berpendapat bahwa perdagangan masih menguntungkan karena adanya keunggulan komparatif. Mari kita hitung biaya peluangnya:

- Negara A
 - Biaya peluang untuk memproduksi 1 unit gandum adalah 0,5 unit kain (karena $10 \text{ gandum} = 5 \text{ kain}$).
 - Biaya peluang untuk memproduksi 1 unit kain adalah 2 unit gandum ($5 \text{ kain} = 10 \text{ gandum}$).
- Negara B
 - Biaya peluang untuk memproduksi 1 unit gandum adalah 0,67 unit kain ($6 \text{ gandum} = 4 \text{ kain}$).
 - Biaya peluang untuk memproduksi 1 unit kain adalah 1,5 unit gandum ($4 \text{ kain} = 6 \text{ gandum}$).

Keunggulan Komparatif:

- Negara A memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam memproduksi gandum (0,5 kain vs 0,67 kain untuk Negara B). Oleh karena itu, negara tersebut harus berspesialisasi pada gandum.
- Negara B memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam memproduksi kain (1,5 gandum vs 2 gandum untuk Negara A). Oleh karena itu, negara tersebut harus berspesialisasi dalam kain.

Keuntungan dari Perdagangan:

- Jika Negara A berspesialisasi dalam gandum dan Negara B berspesialisasi dalam kain, mereka dapat berdagang dan keduanya mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh:

- Negara A memproduksi 20 unit gandum dan menukarkan 10 unit dengan 5 unit kain dari Negara B.
- Negara B memproduksi 10 unit kain dan menukarkan 5 unit dengan 10 unit gandum dari Negara A.

Kedua negara tersebut akhirnya mendapatkan lebih banyak barang daripada yang dapat mereka produksi sendiri tanpa spesialisasi dan perdagangan. Saling menguntungkan ini adalah inti dari teori keunggulan komparatif Ricardo. Ricardo menunjukkan bahwa perdagangan internasional tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak, bahkan ketika satu negara lebih produktif dalam semua jenis produksi, asalkan negara tersebut memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam satu jenis produksi tertentu.

Teori keunggulan komparatif masih relevan dalam kebijakan perdagangan internasional saat ini, di mana negara-negara berfokus pada ekspor barang yang mereka produksi secara efisien dan mengimpor barang yang kurang efisien untuk diproduksi. Spesialisasi ini memungkinkan negara-negara untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan berfokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, negara-negara dapat memaksimalkan output dan surplus perdagangan mereka. Teori ini telah membentuk cara negara-negara melakukan pendekatan terhadap perjanjian dan negosiasi perdagangan, dengan menekankan pentingnya mengakui dan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk saling menguntungkan.

c. Hukum Renta Tanah (Corn Laws)

Ricardo juga dikenal karena mengkritik Corn Laws, undang-undang di Inggris yang memberlakukan tarif tinggi untuk impor biji-bijian untuk melindungi produsen dalam negeri. Menurut Ricardo, undang-undang ini merugikan konsumen dengan menaikkan harga pangan dan membatasi perdagangan internasional. Ia berpendapat bahwa pasar yang lebih bebas akan lebih menguntungkan semua pihak. Ricardo percaya bahwa dengan menghilangkan hambatan perdagangan, seperti Hukum Jagung, negara-negara dapat berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, yang mengarah pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Ide-idenya meletakkan dasar bagi prinsip-prinsip perdagangan bebas yang masih berpengaruh dalam ekonomi global saat ini. Dengan mengadvokasi pasar terbuka dan kompetisi, teori Ricardo memiliki dampak yang bertahan lama

pada cara negara-negara berinteraksi dan terlibat dalam hubungan perdagangan (Hollander, 1985).

Ricardo berpendapat bahwa Undang-Undang Jagung meningkatkan harga tanah dan meningkatkan ketidaksetaraan antara pemilik tanah dan kelas pekerja, yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ia percaya bahwa dengan menghapus pembatasan perdagangan akan memungkinkan sumber daya dialokasikan secara lebih efisien, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua anggota masyarakat. Penekanan Ricardo pada pentingnya perdagangan bebas dan keunggulan komparatif telah berperan penting dalam membentuk kebijakan ekonomi modern dan perjanjian perdagangan. Teori-teorinya terus dipelajari dan diterapkan oleh para ekonom dan pembuat kebijakan di seluruh dunia, menyoroti pentingnya kontribusinya yang abadi di bidang ekonomi.

3.5 Kesimpulan

Pemikiran ekonomi klasik Adam Smith dan David Ricardo menjadi dasar bagi banyak teori ekonomi modern. Smith dengan konsep “tangan tak terlihat” dan pembagian kerja, serta Ricardo dengan teori keunggulan komparatif dan hukum hasil yang semakin berkurang, membantu menjelaskan bagaimana pasar berfungsi dan mengapa perdagangan internasional penting untuk kemakmuran ekonomi. Bab ini menekankan pentingnya mekanisme pasar, peran negara, dan manfaat perdagangan, yang semuanya masih relevan dalam kebijakan ekonomi kontemporer.

Selain itu, ide-ide yang dikemukakan oleh Smith dan Ricardo telah mempengaruhi perkembangan kebijakan dan strategi ekonomi di seluruh dunia. Penekanan mereka pada pasar bebas, spesialisasi, dan perdagangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terus membentuk cara negara-negara mendekati kebijakan ekonomi mereka. Di dunia global saat ini, di mana perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi lebih lazim daripada sebelumnya, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh para ekonom klasik ini tetap penting untuk memahami dan menavigasi kompleksitas ekonomi modern. Selain itu, konsep keunggulan komparatif, yang diperkenalkan oleh Ricardo, terus menjadi konsep fundamental dalam teori perdagangan internasional dan pembuatan kebijakan.

3.6 Latihan dan Refleksi

1. Jelaskan prinsip dasar dari "tangan tak terlihat" dalam pasar bebas dan berikan contoh bagaimana prinsip ini berlaku dalam praktik.
2. Bagaimana hukum hasil yang menurun mempengaruhi keputusan produksi dalam pertanian modern? Berikan contoh nyata.
3. Diskusikan bagaimana teori keunggulan komparatif dapat menjelaskan keuntungan perdagangan antara dua negara.
4. Apa perbedaan utama antara keunggulan komparatif dan keunggulan absolut? Berikan contoh masing-masing.
5. Bagaimana "tangan tak terlihat" dapat menjelaskan keberadaan pasar gelap atau kegiatan ilegal dalam ekonomi pasar bebas?
6. Jelaskan bagaimana hukum hasil yang menurun dapat berperan dalam menentukan strategi harga dalam industri pertanian.
7. Diskusikan bagaimana perubahan teknologi dapat mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara dalam produksi barang tertentu.
8. Bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi mekanisme "tangan tak terlihat" dalam ekonomi pasar bebas melalui kebijakan ekonomi?
9. Berikan contoh bagaimana hukum hasil yang menurun dapat mempengaruhi kebijakan agrikultur dan subsidi pemerintah di negara berkembang.
10. Analisis bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi relevansi teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional.

3.7 Glosarium

Tangan Tak Terlihat (Invisible Hand)

- **Penjelasan:** Konsep yang diperkenalkan oleh Adam Smith, menggambarkan bagaimana tindakan individu yang mencari keuntungan pribadi secara tidak langsung dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini berfungsi sebagai mekanisme yang secara otomatis mengatur pasar dan distribusi sumber daya.

Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage)

- **Penjelasan:** Teori dari David Ricardo yang menyatakan bahwa negara harus memproduksi barang dan jasa di mana mereka memiliki biaya peluang terendah dibandingkan dengan negara lain dan mengimpor barang yang biaya peluangnya lebih tinggi. Ini memungkinkan spesialisasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Keunggulan Absolut (Absolute Advantage)

- **Penjelasan:** Konsep dari Adam Smith yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut jika ia dapat memproduksi barang lebih efisien daripada negara lain. Keunggulan absolut berbeda dengan keunggulan komparatif karena tidak mempertimbangkan biaya peluang.

Hukum Hasil yang Menurun (Law of Diminishing Returns)

- **Penjelasan:** Prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa jika faktor produksi tambahan (misalnya tenaga kerja atau modal) ditambahkan ke proses produksi dengan faktor-faktor lain tetap, hasil tambahan dari setiap unit input tambahan akan menurun seiring waktu.

Biaya Peluang (Opportunity Cost)

- **Penjelasan:** Konsep yang merujuk pada nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika memilih suatu pilihan. Dalam konteks teori keunggulan komparatif, biaya peluang adalah ukuran dari seberapa banyak barang lain yang harus dikorbankan untuk memproduksi barang tertentu.

Pasar Bebas (Free Market)

- **Penjelasan:** Sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Adam Smith mendukung pasar bebas sebagai cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Spesialisasi (Specialization)

- **Penjelasan:** Proses di mana individu, perusahaan, atau negara fokus pada produksi barang atau jasa tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Spesialisasi memfasilitasi keunggulan komparatif dan perdagangan internasional.

3.8 Penugasan: Analisis Konsep Ekonomi Klasik dalam Konteks Modern

Instruksi:

Esai Analisis Konsep (1-2 Halaman):

Pilih salah satu konsep utama dari Adam Smith, seperti Invisible Hand atau Pembagian Kerja. Jelaskan konsep tersebut dan berikan contoh aplikasinya dalam ekonomi modern. Diskusikan relevansi konsep tersebut dalam ekonomi digital saat ini, misalnya pada platform e-commerce atau ekonomi berbagi (sharing economy).

Analisis Teori Keunggulan Komparatif (1-2 Halaman):

Pilih dua negara dan lakukan analisis perdagangan menggunakan teori keunggulan komparatif David Ricardo. Identifikasi barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif di setiap negara, dan jelaskan bagaimana kedua negara dapat saling menguntungkan dengan berdagang. Berikan contoh nyata dari praktik perdagangan internasional saat ini yang menunjukkan prinsip ini.

Studi Kasus tentang Hukum Hasil yang Semakin Menurun (1-2 Halaman):

Berikan contoh sektor atau industri di mana hukum hasil yang semakin menurun berlaku, misalnya sektor pertanian atau manufaktur. Jelaskan bagaimana hukum ini memengaruhi keputusan produksi dan strategi perusahaan dalam mengelola sumber daya. Diskusikan dampaknya terhadap harga, efisiensi, dan output industri tersebut.

BAB IV

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK SOSIALISME

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran Ekonomi Politik Sosialisme

Menjelaskan

Asal-usul Pemikiran Ekonomi Politik Sosialisme

Menjelaskan

Konsep-konsep dasar dalam Pemikiran Ekonomi Politik

Karl Marx

Menjelaskan

Kritik Karl Marx terhadap Pemikiran Ekonomi Politik Klasik

BAB IV

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK SOSIALISME

4.1 Pendahuluan

Sosialisme adalah sebuah aliran pemikiran ekonomi dan politik yang berkembang sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dihasilkan oleh kapitalisme. Aliran ini menganjurkan kepemilikan sosial dan kontrol demokratis atas alat-alat produksi. Kaum sosialis percaya bahwa kepemilikan kolektif ini akan menghasilkan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang lebih adil di antara semua anggota masyarakat. Dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat di atas keuntungan individu, sosialisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Sepanjang sejarah, gerakan sosialis berusaha untuk menantang dominasi sistem kapitalis dan mempromosikan gagasan ekonomi yang lebih kooperatif dan inklusif.

Aliran ini, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Karl Marx, berfokus pada transformasi masyarakat melalui penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi kekayaan yang adil. Sosialisme juga menekankan pentingnya program kesejahteraan sosial dan akses universal ke layanan penting seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Dengan mengadvokasi hak-hak pekerja dan perundingan bersama, sosialisme bertujuan untuk memberdayakan kelas pekerja dan menciptakan distribusi sumber daya yang lebih seimbang. Melalui prinsip-prinsip solidaritas dan kesetaraan, gerakan sosialis terus mendorong perubahan sistemik dan masyarakat yang lebih adil bagi semua individu.

Bab ini akan menjelaskan dasar-dasar ekonomi politik sosialisme, termasuk konsep materialisme historis, teori nilai tenaga kerja, dan perjuangan kelas, serta tahapan-tahapan menuju masyarakat tanpa kelas. Selain itu, bab ini juga akan membahas peran negara dalam sosialisme dan bagaimana negara dapat digunakan sebagai alat untuk redistribusi kekayaan dan kekuasaan. Pada akhirnya, bab ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang sosialisme sebagai sistem politik dan ekonomi, menyoroti potensi manfaat dan tantangannya dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan merata.

4.2 Karl Marx dan Asal Usul Pemikiran Sosialisme

Karl Marx (1818-1883) adalah seorang filsuf, ekonom, dan revolusioner yang pemikirannya menginformasikan teori-teori sosialisme dan komunisme. Karl Heinrich Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Jerman, dari seorang pengacara Yahudi. Ia belajar hukum di Bonn dan Berlin, di mana ia bertemu dengan ide-ide Hegel dan Feuerbach. Setelah meraih gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1841, Marx sempat bekerja sebagai editor sebelum pindah ke Paris pada tahun 1843. Di sana, ia menjadi seorang komunis revolusioner dan menjalin persahabatan yang langgeng dengan Friedrich Engels. Diusir dari Prancis, Marx pindah ke Brussel, di mana ia dan Engels menulis *Manifesto Komunis* pada tahun 1848, yang mengadvokasi kemenangan kaum proletar atas perjuangan kelas. (Avineri, 2019)

Pada tahun 1849, Marx menetap di London, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Meskipun mengalami kesulitan keuangan, Engels mendukungnya, sehingga memungkinkan Marx untuk menghasilkan karya pentingnya *Das Kapital*. Meskipun hanya jilid pertama yang diterbitkan semasa hidupnya, Engels kemudian menyunting jilid-jilid selanjutnya. Kesehatan dan kreativitas Marx menurun di tahun-tahun terakhirnya, dan kematian istrinya pada tahun 1881 serta salah satu putrinya memiliki dampak yang signifikan terhadapnya. Dia meninggal pada 14 Maret 1883 dan dimakamkan di Pemakaman Highgate, London.

Marx dikenal dengan analisisnya tentang kapitalisme, yang ia lihat sebagai sistem ekonomi yang eksploitatif, di mana kelas pekerja (proletar) dieksploitasi oleh kelas pemilik modal (borjuis). Kritik Marx terhadap kapitalisme dan pembelaannya terhadap kelas pekerja memiliki dampak yang bertahan lama pada pemikiran politik dan ekonomi. Ide-idenya menjadi dasar bagi gerakan sosialis dan komunis yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20. Meskipun menghadapi kemiskinan dan tragedi pribadi sepanjang hidupnya, dedikasi Marx terhadap pekerjaannya dan visinya untuk masyarakat yang lebih adil terus menginspirasi para aktivis dan cendekiawan di seluruh dunia. Warisannya sebagai pemikir revolusioner dan ahli teori sosial tetap berpengaruh hingga hari ini.

4.3 Poin-poin Utama dari Pemikiran Karl Marx

a. Materialisme Historis

Marx percaya bahwa sejarah dihasilkan dari perkembangan hubungan ekonomi dan bukan dari ide atau kepercayaan. Ini disebut ****materialisme historis****, yang merupakan gagasan bahwa perubahan ekonomi menentukan perubahan struktur sosial dan politik. Menurut Marx, setiap fase sejarah dicirikan oleh hubungan produksi tertentu, di mana satu kelas mendominasi kelas lainnya. Marx memandang sejarah sebagai perkembangan perjuangan kelas, dengan kelas penguasa mengeksploitasi kelas pekerja untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (Mitchell, 2004). Perspektif ini mengarah pada keyakinannya akan penggulingan kapitalisme oleh kaum proletar, yang mengarah pada masyarakat tanpa kelas. Gagasan Marx tentang materialisme historis memiliki dampak yang bertahan lama di bidang sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik, membentuk cara para sarjana menganalisis dan memahami perubahan masyarakat. Teori-teorinya terus memicu perdebatan dan diskusi tentang sifat kapitalisme, konflik kelas, dan potensi masyarakat yang lebih setara dan adil.

Materialisme historis mengasumsikan bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap ekonomi yang berbeda, mulai dari masyarakat primitif, feodalisme, hingga kapitalisme. Kapitalisme, menurut Marx, akan digantikan oleh sosialisme melalui revolusi kelas pekerja. Sosialisme pada akhirnya akan digantikan oleh komunisme, menghasilkan masyarakat tanpa kelas tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi. Gagasan Marx memiliki dampak yang bertahan lama di bidang sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik, dengan banyak akademisi yang masih menggunakan konsep-konsepnya untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Kritiknya terhadap kapitalisme dan penekanannya pada peran perjuangan kelas telah mengilhami generasi aktivis dan pemikir untuk mendorong perubahan sosial. Meskipun tidak semua prediksi Marx menjadi kenyataan, karyanya terus menjadi landasan bagi mereka yang menginginkan masyarakat yang lebih adil dan setara.

b. Perjuangan Kelas (Class Struggle)

Marx berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Dalam masyarakat kapitalis, ada dua kelas utama: ****Borjuasi**** (pemilik modal) dan ****proletariat**** (kelas pekerja). Kaum borjuis mengeksploitasi tenaga kerja kaum proletar untuk mendapatkan keuntungan, sementara kaum proletar tidak memiliki kendali atas alat-alat produksi. Konflik

antara kedua kelas ini tidak dapat dihindari dan, menurut Marx, akan berujung pada revolusi di mana kelas pekerja menggulingkan kelas borjuis dan membentuk masyarakat tanpa kelas. Revolusi ini akan menghasilkan alat produksi yang dimiliki dan dikendalikan secara kolektif oleh kaum proletar, yang mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan merata di mana kekayaan dan kekuasaan dibagi di antara semua anggota masyarakat (Engels, 2007). Marx percaya bahwa perjuangan kelas ini diperlukan untuk kemajuan masyarakat dan pada akhirnya pembentukan komunisme, di mana tidak akan ada lagi eksploitasi atau penindasan. Dia melihat ini sebagai tujuan akhir dari sejarah manusia dan langkah yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sejati bagi semua orang.

c. Teori Nilai Kerja (Labor Theory of Value)

Salah satu konsep utama dalam pemikiran ekonomi Marx adalah **teori nilai tenaga kerja**. Dia berpendapat bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang menentukan nilainya. Namun, dalam kapitalisme, pemilik modal mengambil nilai lebih-juga dikenal sebagai **nilai surplus**-yang dihasilkan oleh para pekerja. Marx melihat hal ini sebagai bentuk eksploitasi di mana para pekerja tidak mendapatkan bagian yang adil dari nilai yang mereka hasilkan. Dalam kapitalisme, kapitalis mengambil nilai surplus sebagai keuntungan pribadi, sementara pekerja hanya mendapatkan upah yang jauh lebih rendah dari nilai yang mereka ciptakan. Sebagai contoh, di sebuah pabrik di mana para pekerja memproduksi barang melalui tenaga mereka, pemilik kapitalis mengambil keuntungan dari penjualan barang dengan nilai yang lebih tinggi daripada upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Hal ini mengakibatkan para pekerja hanya menerima sebagian kecil dari nilai yang mereka kontribusikan, yang mengarah pada distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak merata dalam sistem kapitalis(Engels, 2007).

Marx percaya bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata ini merupakan kelemahan mendasar dari kapitalisme, yang mengarah pada konflik kelas antara kaum borjuis (kelas kapitalis) dan proletar (kelas pekerja). Dia berpendapat bahwa eksploitasi tenaga kerja ini pada akhirnya akan mengakibatkan runtuhnya kapitalisme dan bangkitnya sosialisme, di mana para pekerja secara kolektif akan memiliki alat produksi. Teori Marx tentang nilai tenaga kerja dan nilai lebih terus menjadi konsep dasar dalam analisis ekonomi Marxis dan kritik terhadap kapitalisme. Marx berpendapat bahwa eksploitasi tenaga kerja pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan kapitalisme dan kebangkitan sosialisme, di mana alat produksi akan dimiliki bersama.

d. Keterasingan (Alienation)

Marx juga memperkenalkan konsep *alienasi*, di mana para pekerja dalam sistem kapitalisme teralienasi dari produk yang mereka hasilkan, dari proses produksi, dari diri mereka sendiri, dan dari sesama pekerja. Karena tidak memiliki kontrol atas alat produksi, pekerja merasa terasing dari pekerjaan dan hasil kerja mereka (Engels, 2007). Dalam masyarakat kapitalis, pekerja menjadi roda kecil dalam sebuah sistem yang besar, tanpa kendali atas hasil kerja mereka sendiri. Hal ini menyebabkan hilangnya kepuasan dan makna dalam bekerja, dan mengurangi martabat manusia. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan inovasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, seorang pekerja pabrik yang merakit produk sepanjang hari mungkin tidak akan pernah melihat hasil akhir atau memahami dampak dari pekerjaan mereka pada konsumen akhir. Mereka mungkin merasa hanya sebagai roda penggerak mesin, yang mengarah pada perasaan tidak penting dan kurangnya motivasi dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan efisiensi dan kreativitas, karena pekerja tidak memiliki tujuan dan rasa kepemilikan dalam pekerjaan mereka.

Kurangnya hubungan dengan produk akhir juga dapat menyebabkan kurangnya kebanggaan dalam pekerjaan seseorang, karena pekerja mungkin tidak melihat nilai yang mereka kontribusikan kepada masyarakat. Tanpa rasa tujuan dan kepemilikan, karyawan dapat menjadi tidak bersemangat dan kurang berkomitmen terhadap tugas-tugas mereka, yang mengarah pada penurunan kualitas kerja secara keseluruhan. Penting bagi perusahaan untuk menumbuhkan rasa makna dan nilai dalam pekerjaan yang dilakukan karyawan mereka, untuk mempertahankan tingkat produktivitas dan inovasi yang tinggi di dalam organisasi. Dengan membantu karyawan memahami dampak dari pekerjaan mereka dan memberikan kesempatan untuk merasa memiliki, pemberi kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih memuaskan dan produktif bagi semua.

e. Kapitalisme sebagai Sistem yang Merusak

Menurut Marx, kapitalisme adalah sistem yang merusak. Meskipun kapitalisme telah memungkinkan peningkatan produktivitas yang luar biasa, kapitalisme juga menciptakan ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Dalam kapitalisme, beberapa orang memiliki alat produksi, sementara mayoritas hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual. Distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak merata ini menyebabkan eksploitasi

terhadap kelas pekerja dan melanggengkan siklus kemiskinan. Marx percaya bahwa kapitalisme pada akhirnya akan mengarah pada keruntuhannya ketika kelas pekerja menyadari penindasan mereka dan bangkit melawan kelas kapitalis. Untuk memerangi sifat destruktif kapitalisme, Marx menganjurkan sistem sosialis di mana alat produksi dimiliki secara kolektif dan kekayaan didistribusikan secara lebih adil.

f. Konsekuensi dari Kapitalisme Menurut Marx

Eksplotasi Pekerja

Kapitalis mengeksploitasi pekerja dengan mencuri nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja mereka. Sementara para pekerja bekerja keras untuk menghasilkan barang, kapitalis mengambil keuntungan dari nilai lebih ini. Eksploitasi ini menyebabkan alienasi dan dehumanisasi pekerja, karena mereka direduksi menjadi komoditas belaka dalam sistem kapitalis. Marx percaya bahwa distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak merata ini pada akhirnya akan menghasilkan konflik kelas dan revolusi (Engels, 2007).

Dalam pandangan Marx, kapitalisme melanggengkan sistem ketidaksetaraan di mana segelintir orang kaya mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan banyak orang yang bekerja. Eksploitasi terhadap pekerja ini tidak hanya menyebabkan kesenjangan ekonomi, tetapi juga konsekuensi sosial dan psikologis. Keterasingan dan dehumanisasi yang dialami oleh para pekerja di bawah kapitalisme dapat berdampak luas pada kesejahteraan dan rasa harga diri mereka. Akibatnya, Marx berpendapat bahwa kontradiksi yang melekat pada kapitalisme pada akhirnya akan mengarah pada keruntuhannya, ketika para pekerja bangkit melawan para penindas mereka dalam perjuangan revolusioner untuk mendapatkan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Krisis Berulang dalam Kapitalisme

Marx juga berpendapat bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan secara berkala akan mengalami krisis ekonomi. Kelebihan produksi-produksi barang yang lebih banyak daripada permintaan-adalah akar penyebabnya. Hal ini mengakibatkan jatuhnya harga, penutupan pabrik, dan pengangguran massal. Marx percaya bahwa krisis-krisis ini pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya kapitalisme, karena sistem ini tidak akan mampu mempertahankan dirinya sendiri dalam jangka panjang (Engels, 2007). Dia melihat krisis yang berulang ini

sebagai kelemahan mendasar dari kapitalisme yang pada akhirnya akan membuka jalan bagi munculnya masyarakat yang lebih adil dan merata.

Marx percaya bahwa krisis-krisis ini bukan hanya kemunduran sementara, melainkan konsekuensi yang tak terelakkan dari kontradiksi yang melekat pada sistem kapitalisme. Dia berpendapat bahwa ketika kapitalisme terus berkembang dan memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang, kelas pekerja akan menjadi semakin miskin dan terasing. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada penggulingan revolusioner sistem kapitalis, ketika kaum proletar bangkit untuk mengambil alih kendali atas alat-alat produksi dan membangun masyarakat sosialis. Teori-teori Marx tentang krisis kapitalisme terus diperdebatkan dan dianalisis hingga hari ini, ketika para ekonom dan ahli teori politik bergulat dengan implikasi dari ide-idenya untuk masa depan kapitalisme global.

Keterasingan/ Alienasi

Sistem kapitalisme juga menyebabkan keterasingan, baik dari pekerjaan, sesama manusia, atau diri sendiri. Pekerja merasa terasing dari produk yang mereka ciptakan karena mereka tidak memiliki kendali atas proses produksi. Keterasingan ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan terputus, yang berkontribusi pada rasa keterasingan di antara individu-individu dalam masyarakat kapitalis. Marx berpendapat bahwa keterasingan ini merupakan kelemahan mendasar dari kapitalisme, yang pada akhirnya memicu keinginan untuk perubahan revolusioner.

Marx percaya bahwa pengejaran keuntungan yang terus-menerus dalam sistem kapitalis tidak hanya melanggengkan keterasingan ini, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dorongan untuk akumulasi modal mengarah pada eksploitasi tenaga kerja, yang semakin memperdalam jurang pemisah antara kaum borjuis dan proletar. Akibatnya, individu-individu merasa terputus dari kemanusiaannya sendiri, terjebak dalam siklus materialisme dan kompetisi. Perasaan terasing dan terlepas dari jati diri ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pada akhirnya, kritik Marx terhadap kapitalisme menyoroti perlunya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan yang memprioritaskan perkembangan manusia daripada keuntungan.

g. Tahapan Menuju Sosialisme

Marx mengusulkan bahwa kapitalisme pada akhirnya akan digantikan oleh sosialisme melalui revolusi kelas pekerja. Marx mengusulkan empat langkah utama dalam transisi dari kapitalisme ke sosialisme (Sweezy, 1985):

Dominasi Kelas: Kelas borjuis mendominasi masyarakat kapitalis dan mengeksploitasi tenaga kerja proletar. Langkah pertama dalam tahapan Marx menuju sosialisme melibatkan kelas pekerja yang menyadari eksploitasi mereka dan bangkit melawan kelas borjuis. Revolusi ini akan mengarah pada penggulingan sistem kapitalis dan pembentukan masyarakat sosialis di mana alat produksi dimiliki secara kolektif. Melalui transisi ini, Marx percaya bahwa ketidaksetaraan dan ketidakadilan kapitalisme dapat dihapuskan, yang mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua individu.

Revolusi: Sebagai kelas yang tertindas, kaum proletar akan memberontak untuk menggulingkan kelas borjuis. Pemberontakan ini akan menghasilkan redistribusi kekayaan dan kekuasaan, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana kebutuhan semua orang terpenuhi. Marx membayangkan hal ini sebagai tahap akhir sebelum mencapai komunisme sejati, di mana semua individu akan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.

Pendirian Negara Sosialis: Setelah revolusi, negara akan bekerja untuk menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mendistribusikan kekayaan secara adil di antara semua orang. Negara sosialis ini akan memprioritaskan kebutuhan kelas pekerja dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil melalui kepemilikan kolektif dan pengambilan keputusan. Tujuan akhirnya adalah menghilangkan perbedaan kelas dan menciptakan masyarakat di mana semua orang dapat berkembang.

Masyarakat tanpa kelas: Pada akhirnya, negara akan memudar, dan masyarakat tanpa kelas akan terbentuk, di mana setiap orang memiliki akses yang sama terhadap alat produksi dan tidak ada lagi eksploitasi. Visi masyarakat tanpa kelas ini berakar pada keyakinan bahwa kesetaraan sejati hanya dapat dicapai jika semua individu memiliki kesempatan dan sumber daya yang sama. Dengan menghilangkan hambatan yang diciptakan oleh perbedaan kelas, masyarakat dapat benar-benar maju menuju kehidupan yang lebih adil dan harmonis. Dalam masyarakat tanpa kelas, setiap individu akan bebas untuk mengejar minat dan bakat mereka tanpa batasan status

sosial atau ketidaksetaraan ekonomi. Visi ini mendorong rasa kebersamaan dan kerja sama, di mana individu-individu bekerja sama demi kebaikan bersama daripada bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Dengan berjuang menuju masyarakat tanpa kelas, kita dapat bergerak lebih dekat untuk mencapai dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Tahapan tertinggi yaitu masyarakat tanpa kelas ini kemudian dimaknai oleh Marx sebagai Komunnisme.

Sosialisme dan Komunisme telah menjadi dua terminologi yang sering salah makna dan diartikan sama. Pada hakikatnya kedua konsep ini berbeda dan berikut adalah elaborasi perbedaan antara keduanya:

Sosialisme

- **Definisi** Sosialisme adalah tahap peralihan antara kapitalisme dan komunisme. Sistem ini muncul setelah revolusi proletar dan ditandai dengan kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi.
- **Fitur Utama:**
 - **Kepemilikan Kolektif:** Alat-alat produksi (pabrik, tanah, sumber daya) dimiliki oleh negara atau oleh para pekerja itu sendiri, menghilangkan kepemilikan pribadi oleh kapitalis.
 - **Distribusi Berdasarkan Kontribusi:** Dalam sosialisme, orang diberi kompensasi sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang mereka sumbangkan (yaitu, “dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk masing-masing sesuai dengan pekerjaannya”).
 - **Kontrol Negara:** Negara memainkan peran penting dalam mendistribusikan sumber daya dan merencanakan ekonomi untuk memastikan kesetaraan dan memenuhi kebutuhan semua warga negara.
 - **Perjuangan Kelas Masih Ada:** Meskipun kelas kapitalis telah digulingkan, beberapa sisa-sisa pembagian kelas masih ada dalam fase ini. Negara diperlukan untuk menekan setiap upaya dari kelas penguasa sebelumnya (borjuasi) untuk mendapatkan kembali kekuasaan.
- **Tujuan:** Sosialisme adalah fase transisi yang berusaha menghilangkan ketidaksetaraan kapitalisme dengan memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara lebih adil. Hal ini meletakkan dasar bagi kebangkitan komunisme.

Komunisme

- **Definisi:** Komunisme adalah tahap akhir dan paling maju dari masyarakat manusia dalam teori Marx. Ini mewakili masyarakat tanpa kelas, tanpa negara, dan tanpa uang di mana semua anggota berbagi secara setara dalam kepemilikan dan kontrol produksi.
- **Fitur Utama:**
 - **Masyarakat Tanpa Kelas:** Dalam komunisme, semua perbedaan kelas lenyap. Tidak ada kaum proletar atau borjuis, karena semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.
 - **Distribusi Berdasarkan Kebutuhan:** Tidak seperti sosialisme, di mana orang dihargai berdasarkan kerja keras mereka, komunisme mengikuti prinsip, “dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.” Setiap orang berkontribusi kepada masyarakat dengan kemampuan terbaiknya, dan sumber daya didistribusikan berdasarkan kebutuhan, bukan tenaga kerja.
 - **Tidak Ada Negara atau Pemerintah:** Karena tidak ada konflik kelas atau kepemilikan pribadi, negara menjadi usang dan layu. Masyarakat diatur sendiri melalui pengambilan keputusan bersama.
 - **Tidak Ada Kepemilikan Pribadi:** Dalam komunisme, semua bentuk kepemilikan pribadi dihapuskan. Barang dan jasa digunakan bersama secara komunal, dan alat produksi dimiliki secara kolektif oleh semua anggota masyarakat.
- **Tujuan:** Komunisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari eksploitasi, ketidaksetaraan, dan penindasan. Komunisme membayangkan sebuah dunia di mana semua individu bebas untuk mengembangkan potensi mereka tanpa kendala pembagian kelas atau kelangkaan ekonomi.

Perbedaan Sosialisme dan Komunisme

Aspek	Sosialisme	Komunisme
Kepemilikan	Kepemilikan kolektif atas intervensi negara	Kepemilikan kolektif tanpa campur tangan negara
Distribusi kekayaan	Berdasarkan kontribusi (tenaga kerja)	Berdasarkan kebutuhan
Peran Negara	Kontrol negara yang kuat untuk mendistribusikan sumber daya	Tidak ada negara

Struktur Kelas	Beberapa perbedaan kelas mungkin tetap ada	Masyarakat sepenuhnya tanpa kelas
Sistem Ekonomi	Perencanaan terpusat	Tidak ada ekonomi formal, produksi dan konsumsi bersama
Tujuan Akhir	Peralihan dari kapitalisme ke arah komunisme	Masyarakat tanpa eksploitasi

4.4 Kesimpulan

Pemikiran ekonomi politik sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx didasarkan pada analisis yang mendalam tentang kapitalisme dan konsekuensi-konsekuensinya terhadap kelas pekerja. Marx melihat sejarah sebagai perjuangan kelas, dengan kapitalisme sebagai fase transisi menuju masyarakat tanpa kelas melalui revolusi. Teori nilai kerja dan keterasingan merupakan fondasi bagi kritik Marx terhadap kapitalisme, sementara solusi yang ia tawarkan adalah sosialisme yang bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan eksploitasi.

Kesimpulannya, analisis Marx tentang kapitalisme dan visinya untuk sosialisme menyoroti pentingnya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk berkembang. Dengan memahami akar penyebab eksploitasi dan mengadvokasi distribusi sumber daya yang lebih adil, teori-teori Marx memberikan kerangka kerja untuk menciptakan masyarakat di mana setiap orang dapat mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Meskipun transisi menuju sosialisme mungkin menantang, wawasan Marx tentang kelemahan kapitalisme dan potensi masyarakat yang lebih adil menawarkan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

4.5 Latihan dan Refleksi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan materialisme historis oleh Karl Marx dan bagaimana konsep ini menjelaskan perubahan sosial.
2. Apa yang dimaksud dengan nilai lebih dalam teori nilai tenaga kerja Marx, dan mengapa ia menganggapnya sebagai bentuk eksploitasi?
3. Bagaimana Marx melihat keterasingan dalam sistem kapitalisme, dan apa dampaknya terhadap pekerja?

4. Jelaskan hubungan antara basis ekonomi dan suprastruktur dalam teori Marx. Bagaimana basis ekonomi mempengaruhi institusi-institusi masyarakat seperti politik dan budaya?
5. Apa yang dimaksud dengan kesadaran kelas, dan mengapa penting bagi kaum proletar untuk mengembangkannya menurut Marx?
6. Jelaskan perbedaan antara borjuasi dan proletariat. Apa peran kedua kelas ini dalam sistem kapitalisme?
7. Bagaimana Marx mendefinisikan moda produksi, dan apa peran moda produksi dalam membentuk masyarakat?
8. Apa yang dimaksud dengan fetisisme komoditas, dan bagaimana fetisisme komoditas mendistorsi hubungan antarmanusia dalam masyarakat kapitalis menurut Marx?
9. Diskusikan visi Marx tentang transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Apa yang dia prediksi akan terjadi selama revolusi proletar?
10. Bagaimana Marx memandang pembentukan masyarakat komunis pada akhirnya? Apa saja ciri-ciri utama yang membedakan komunisme dari kapitalisme dan sosialisme?

4.6 Glossarium

Materialisme Historis

Konsep bahwa perkembangan sejarah manusia ditentukan oleh kondisi material dan ekonomi. Perubahan sosial terjadi karena adanya konflik antar kelas sosial yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang.

Kapitalisme.

Sebuah sistem ekonomi di mana alat produksi dimiliki secara pribadi, dan produksi didorong oleh akumulasi modal melalui keuntungan. Menurut Marx, kapitalisme pada dasarnya bersifat eksploitatif karena menghasilkan nilai lebih dari tenaga kerja.

Nilai Surplus

Selisih antara nilai yang dihasilkan oleh pekerja dan upah yang mereka terima. Ini adalah sumber utama keuntungan kapitalis dan dianggap sebagai bentuk eksploitasi oleh Marx, karena pekerja tidak menerima nilai penuh dari apa yang mereka hasilkan.

Alienasi

Kondisi keterasingan yang dialami oleh para pekerja di bawah kapitalisme, di mana mereka terpisah dari hasil kerja mereka, proses produksi, sesama pekerja, dan potensi kemanusiaan mereka sendiri. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dan keterasingan dari kehidupan.

Kelas Sosial

Dalam pandangan Marx, masyarakat kapitalis dibagi menjadi dua kelas utama:

- **Borjuasi:** Kelas yang memiliki modal dan alat produksi.
- **Proletariat:** Kelas pekerja yang tidak memiliki alat produksi dan hanya dapat menjual tenaga mereka untuk bertahan hidup.

Kesadaran Kelas

Kesadaran kolektif di antara anggota kelas pekerja tentang posisi mereka dalam masyarakat, serta eksploitasi yang mereka alami di bawah kapitalisme. Kesadaran ini adalah kunci revolusi kaum proletar.

Revolusi Proletar

Proses di mana kelas pekerja, yang sadar akan eksploitasi yang dialaminya, menggulingkan kapitalisme melalui aksi revolusioner dan menggantinya dengan sosialisme, yang pada akhirnya berkembang menjadi komunisme, masyarakat tanpa kelas.

Sosialisme

Sistem ekonomi dan sosial di mana alat produksi dimiliki dan dikendalikan secara kolektif oleh masyarakat, dengan tujuan menghilangkan eksploitasi kelas dan menciptakan kesetaraan ekonomi.

Komunisme

Tahap akhir perkembangan masyarakat menurut Marx, setelah kapitalisme dan sosialisme. Dalam komunisme, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan kelas sosial serta negara sebagai institusi tidak ada lagi. Orang-orang hidup dalam harmoni tanpa eksploitasi.

Teori Nilai Tenaga Kerja

Teori yang menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang secara sosial diperlukan untuk memproduksinya. Dalam kapitalisme, pekerja menghasilkan nilai lebih dari upah yang mereka terima, yang diambil oleh kapitalis sebagai nilai lebih.

Akumulasi Modal

Proses di mana kapitalis terus menginvestasikan kembali keuntungan atau nilai lebih untuk menghasilkan lebih banyak modal. Hal ini meningkatkan kekayaan kelas kapitalis dan memperdalam ketimpangan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja.

Fetisisme Komoditas

Konsep bahwa di bawah kapitalisme, hubungan sosial antar manusia seringkali dimediasi oleh komoditas. Barang-barang yang diproduksi di pasar dianggap memiliki kekuatan dan nilainya sendiri, sementara tenaga kerja manusia yang menciptakannya tersembunyi dan tidak terlihat.

Cara Produksi

Cara masyarakat memproduksi barang dan jasa yang terdiri dari kekuatan-kekuatan produktif (alat produksi, teknologi, tenaga kerja) dan relasi-relasi produksi (kelas dan kepemilikan). Setiap moda produksi memiliki dinamika kelasnya sendiri, seperti feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme.

Dialektika

Metode pemikiran yang digunakan oleh Marx untuk memahami perubahan historis sebagai hasil dari kontradiksi internal. Setiap sistem sosial atau ekonomi mengandung konflik yang pada akhirnya memicu perubahan ke sistem yang baru.

4.7 Penugasan: Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Sosialisme dan Aplikasinya

Instruksi:

Esai Analisis Konsep Materialisme Historis (1-2 Halaman):

Jelaskan konsep Materialisme Historis oleh Karl Marx. Analisis bagaimana konsep ini bisa menjelaskan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern saat ini. Gunakan contoh nyata, misalnya revolusi industri atau kebangkitan ekonomi digital, untuk menggambarkan bagaimana kondisi material dapat memengaruhi perubahan struktural dalam masyarakat.

Studi Kasus Alienasi dalam Sistem Kerja Modern (1-2 Halaman):

Pilih sebuah industri atau jenis pekerjaan (misalnya, pekerja pabrik atau pekerja call center) dan analisis bagaimana konsep Alienasi berlaku dalam konteks kerja modern. Diskusikan

bagaimana pekerja mungkin merasa terasing dari pekerjaan mereka dan dampaknya pada kesejahteraan mereka. Sertakan saran atau strategi yang bisa diterapkan perusahaan untuk mengurangi keterasingan dalam pekerjaan.

Analisis Krisis Berulang dalam Kapitalisme (1-2 Halaman):

Pilih salah satu krisis ekonomi yang pernah terjadi, misalnya Krisis Keuangan 2008, dan jelaskan bagaimana pemikiran Marx tentang krisis berulang dalam kapitalisme dapat digunakan untuk memahami penyebab dan dampaknya. Berikan penjelasan tentang bagaimana pemikiran ini relevan untuk memahami krisis di masa depan.

Perbandingan Sosialisme dan Kapitalisme (1-2 Halaman):

Buat perbandingan antara Sosialisme dan Kapitalisme dalam hal distribusi kekayaan, peran negara, dan dampak pada kelas pekerja. Sertakan pandangan kritis Anda mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem ini, serta relevansinya dengan masalah ketidaksetaraan ekonomi saat ini.

Batas Waktu: 2 Minggu

Format Pengumpulan: PDF dengan nama file: "Penugasan_Sosialisme_NamaMahasiswa.pdf"

BAB V

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK KEYNESIAN

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran ekonomi politik Keynesian

Menjelaskan

Kemunculan pemikiran ekonomi politik Keynesian

Menjelaskan

Tokoh pemikiran ekonomi politik Keynesian:

John Meynard Keynes

Menjelaskan

Prinsip-prinsip dasar dalam pemikiran ekonomi politik Keynesian

Menjelaskan

Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dalam Ekonomi Modern

BAB V

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK KEYNESIAN

5.1 Pendahuluan

Ekonomi dunia pada abad ke-18 didominasi oleh pengaruh pemikiran ekonomi politik klasik yang mendukung besarnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Ide utama pemikiran liberalisma seperti *laissez Faire* merupakan sebuah ide yang dianggap relevan untuk membangun ekonomi negara karena peran negara dilihat dapat menjadi penghalang bagi tumbuhnya ekonomi. *Supply Creates Its Own Demand* juga menjadi ide berikutnya yang dibesarkan oleh liberalisme klasik dalam membangun ekonomi negara pada masa itu.

Pemikiran ekonomi politik klasik yang dinilai hanya menguntungkan para pemilik modal atau para pelaku usaha bertahan sangat lama di banyak negara. Pemikiran ekonomi politik klasik juga dikenal dengan sifatnya yaitu *self interest* yang berarti hanya menguntungkan para pemilik modal yang sejatinya selalu mementingkan kepentingan individu atau dirinya sendiri. Oleh karena itu masyarakat dinilai menjadi pihak yang hanya akan mendapat kerugian (Piketty, 2013).

Berkembangnya ekonomi klasik dan berkurangnya peran neagara dalam mengatur ekonmi dalam waktu yang lama memunculkan masalah baru yaitu meningkatnya produksi diluar kendali di berbagai neagara induustri seperti di Amerika Serikat. Pada tahun 1930 Amerika Serikat menagalami krisis yang sangat besar yaitu meningkatnya produksi sementara daya beli berkurang sehingga terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak. Hal ini berujung terhadap inflasi dan bermasalahnya ekonomi Amrika Serikat yang berlanjut terhadap inflasi dna pengangguran merajalela.

Pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1920-an, perekonomian dunia didominasi oleh pemikiran *laissez-faire* yang dianut oleh kaum klasik dan neoklasik. Dalam konteks kebebasan produksi yang dilakukan oleh swasta, setiap perusahaan berlomba-lomba untuk memproduksi barang sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan kapasitas serapan pasar. Akibatnya, pada tahun 1930-an, dunia mengalami krisis ekonomi besar-besaran atau yang dikenal dengan Depresi Besar, yang menyebabkan perekonomian global runtuh, pengangguran merajalela, dan inflasi meningkat tajam (Deliarnov, 2018).

Menanggapi permasalahan ekonomi yang muncul telah mengiring munculnya sebuah pemikiran ekonomi politik yaitu Keynesian. Teori Keynesian dapat menyelesaikan beberapa masalah yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan oleh aliran klasik, khususnya yang diungkapkan oleh Smith. Dengan adanya intervensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, diharapkan dapat mengatasi isu-isu seperti pengangguran dan ketidakmerataan pendapatan. Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal meliputi penurunan atau peningkatan pajak sesuai dengan gejala inflasi yang muncul. Sementara itu, dalam kebijakan moneter, pemerintah berperan melalui Bank Sentral yang mengatur suku bunga, baik dengan menaikkan maupun menurunkan.

Pemerintah berperan penting dalam membatasi dan membuka kebijakan untuk memastikan kelangsungan serta kelancaran perekonomian. Teori Keynesian menekankan bahwa fluktuasi inflasi di suatu negara adalah hal yang wajar, dan keberlanjutan ekonomi akan terus dipengaruhi oleh perubahan pajak dan suku bunga yang ditetapkan pemerintah (Samuelson dan Nordhaus, 2010). Jika dibandingkan dengan membiarkan pasar beroperasi secara alami, kebijakan ini memberikan peluang lebih besar untuk menstabilkan dan meratakan perekonomian suatu negara.

Krisis ekonomi tersebut membuktikan bahwa konsep Classical Macroeconomics Theory (CMT) gagal dalam menciptakan perekonomian yang stabil dan sejahtera. Konsep ini tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi dan memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Kegagalan ini menjadi dorongan bagi John Maynard Keynes untuk menawarkan pendekatan baru dalam menganalisis perekonomian masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai teori ekonomi Keynesian. Menurut Keynes, pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi, terutama untuk mencapai kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5.2 John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) adalah seorang ekonom Inggris yang memimpin mazhab Keynesian. Inti dari pemikiran Keynesian adalah bahwa kebijakan fiskal, yang mencakup pajak dan pengeluaran pemerintah, seharusnya digunakan sebagai alat untuk mengendalikan perekonomian. Dalam karya monumental Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money* yang diterbitkan pada tahun 1936, ia menyatakan bahwa pasar tidak selalu

mampu menciptakan keseimbangan secara otomatis. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan agar distribusi sumber daya dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Pandangan Keynesian ini sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan ekonomi global. Idenya menjadi panduan yang diperhitungkan dalam membangun ekonomi negara. Selanjutnya, pandangan Keynesian juga memiliki peran yang besar terutama dalam Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 dan pembentukan Dana Moneter Internasional (IMF). Pemikiran Keynes dianggap sebagai titik awal dari pemikiran ekonomi politik modern karena ia melakukan perombakan besar-besaran terhadap doktrin-doktrin klasik dan neoklasik, serta menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi (Delong, 2001).

Menurut pemikiran Keynesian, permintaan efektif dalam perekonomian terbentuk dari empat komponen utama, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, Keynesian berpendapat bahwa perekonomian tidak selalu dapat mencapai keseimbangan secara otomatis tanpa intervensi dari pemerintah. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas ekonomi dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Samuelson dan Nordhaus, 2010). Negara diharapkan dapat terlibat aktif dalam praktik ekonomi yang ideal, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan, sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Permintaan agregat, yang merujuk pada total permintaan dalam perekonomian, merupakan faktor utama yang menentukan tingkat output dan kesempatan kerja. Ketika permintaan agregat menurun, ekonomi dapat terperosok ke dalam resesi atau depresi, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Intervensi pemerintah melalui perencanaan ekonomi yang matang dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan langkah-langkah kebijakan yang efektif, seperti peningkatan belanja pemerintah atau penyesuaian suku bunga, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan dapat tercapai, menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Keynes mengkritik teori ekonomi klasik karena dianggap memiliki banyak kekurangan, terutama terkait dengan mekanisme pasar dan pencapaian keseimbangan ketenagakerjaan. Menurutnya, teori klasik terlalu mengandalkan pasar bebas yang dianggap dapat mencapai keseimbangan secara otomatis, padahal kenyataannya pasar sering gagal menciptakan cukup lapangan pekerjaan dan menstabilkan ekonomi, terutama saat terjadi krisis. Sebagai alternatif,

dalam teori neo-klasik, Keynes melakukan revisi dengan menekankan peran penting pemerintah dalam mengatur permintaan agregat serta mengatasi ketidakseimbangan ekonomi (DeLong, 2001). Revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan teori dengan kondisi ekonomi yang lebih kompleks pada masa kini, di mana intervensi negara diperlukan untuk mendorong pertumbuhan, mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan ekonomi.

Secara umum, Keynes mengkritik pandangan para pemikir klasik dan neo-klasik tentang pasar, yang dianggapnya terlalu mengandalkan pasar bebas untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Menurut Keynes, pasar tidak selalu mampu menciptakan kondisi yang diinginkan, seperti pengurangan pengangguran atau pemulihan ekonomi selama masa resesi. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mengelola ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Dengan adanya intervensi pemerintah, tujuan seperti mengurangi pengangguran dan mengatasi resesi dapat tercapai, serta memastikan kestabilan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Popularitas paham Keynesian mulai menurun pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, disebabkan oleh kemakmuran yang menimbulkan berbagai masalah seperti kekurangan sumber daya, inflasi yang kembali muncul, dan konflik distribusi pendapatan, yang akhirnya mengarah pada stagflasi. Menanggapi fenomena ini, paham-paham yang menentang Keynesian memanfaatkan situasi tersebut untuk menggulingkan revolusi Keynesian, sementara kelompok kontra-revolusioner menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan paham ekonomi klasik dan menerapkannya dalam kebijakan ekonomi neo-liberal. Berbagai peristiwa ini berujung pada hilangnya kemakmuran bersama secara bertahap selama 30 tahun, yang mengubah pandangan terhadap paham Keynesianisme dan menyebabkan penurunan popularitasnya (Palley, 2017).

5.3 Prinsip Dasar Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian

1. Permintaan Agregat

Menurut Keynesian, faktor utama yang menentukan pendapatan nasional, total produksi, dan tingkat kesempatan kerja dalam suatu perekonomian adalah permintaan agregat. Permintaan agregat ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi oleh sektor bisnis, belanja pemerintah, dan ekspor. Masing-masing komponen ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk total permintaan dalam perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat produksi dan kesempatan kerja. Keynesian berpendapat bahwa apabila permintaan agregat cukup

tinggi, perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar, yang pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Keberadaan permintaan agregat yang cukup besar juga berperan dalam menentukan seberapa banyak barang dan jasa yang akan diproduksi dalam suatu perekonomian. Jika permintaan agregat meningkat, perusahaan akan berusaha memenuhi permintaan tersebut dengan meningkatkan output produksi, yang pada akhirnya akan merangsang aktivitas ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja lebih banyak. Sebaliknya, jika permintaan agregat menurun, maka produksi dan kegiatan ekonomi akan melambat, yang berpotensi menyebabkan pengangguran meningkat. Dengan demikian, bagi Keynesian, menjaga tingkat permintaan agregat yang stabil dan cukup tinggi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat pekerjaan di pasar tenaga kerja (Sukirno, 2013).

2. Peran Pemerintah

Keynesian berpendapat bahwa peran aktif pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemikiran ini meyakini bahwa tanpa intervensi pemerintah, perekonomian cenderung mengalami fluktuasi yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, seperti pengangguran yang tinggi atau inflasi yang tidak terkendali. Untuk mencapai tujuan ekonomi seperti kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Keynesian menyarankan agar pemerintah menggunakan kebijakan fiskal (seperti pengeluaran pemerintah dan pajak) serta kebijakan moneter (seperti pengendalian jumlah uang beredar) untuk menyesuaikan kondisi perekonomian. Dengan demikian, pemerintah dapat bertindak sebagai penyeimbang dalam ekonomi, memastikan bahwa permintaan agregat tidak terlalu rendah (yang dapat menyebabkan resesi) atau terlalu tinggi (yang dapat menyebabkan inflasi).

Sebagai contoh, dalam menghadapi inflasi yang tinggi, Keynesian menyarankan agar pemerintah mengurangi pasokan uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan moneter yang ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan suku bunga, yang pada gilirannya akan membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Ketika suku bunga tinggi, masyarakat dan perusahaan akan cenderung mengurangi pengeluaran dan

investasi, yang dapat membantu meredam inflasi yang disebabkan oleh pengeluaran berlebihan. Kebijakan seperti ini membantu menstabilkan ekonomi dengan mengendalikan laju inflasi, sambil memastikan bahwa perekonomian tetap berjalan pada tingkat yang seimbang dan berkelanjutan.

3. Tabungan dan Investasi

Pemikiran Keynesian menekankan bahwa tabungan rumah tangga lebih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daripada tingkat suku bunga. Menurut Keynesian, rumah tangga cenderung menabung lebih banyak ketika pendapatan mereka meningkat, karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk disisihkan. Sebaliknya, ketika pendapatan rendah, tingkat tabungan akan lebih kecil, meskipun suku bunga tinggi sekalipun. Dengan kata lain, dalam pandangan Keynesian, tabungan rumah tangga tidak dipengaruhi secara langsung oleh suku bunga, melainkan lebih terkait dengan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka. Ini menunjukkan bahwa pendapatan adalah faktor utama yang menentukan seberapa banyak individu atau keluarga dapat menabung, bukan hanya insentif dari suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

Di sisi lain, investasi dalam perekonomian lebih dipengaruhi oleh dua faktor utama: tingkat suku bunga dan ekspektasi keuntungan di masa depan. Suku bunga yang lebih rendah cenderung merangsang investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga perusahaan lebih tertarik untuk meminjam dan menginvestasikan dana dalam proyek-proyek baru. Selain itu, ekspektasi keuntungan yang tinggi di masa depan juga merupakan faktor penting dalam keputusan investasi. Jika para pengusaha percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan besar di masa depan, mereka akan lebih cenderung melakukan investasi meskipun suku bunga mungkin lebih tinggi (Sukirno, 2013). Oleh karena itu, menurut Keynesian, baik faktor biaya pinjaman (suku bunga) maupun prospek keuntungan jangka panjang memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian.

Lebih lanjut prinsip dasar Keynesian dapat dijabarkan secara langsung pada nilai-nilai asumsi dasar pada pemikiran ekonomi politik Keynesian yaitu:

1. Intervensi pemerintah: Pemerintah berperan aktif dalam mengatasi ketidaksetaraan dan stagnasi ekonomi melalui redistribusi pendapatan serta pengeluaran sosial. Dengan meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan suku bunga, pemerintah dapat mengendalikan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Agar pertumbuhan ekonomi tercapai, peran aktif pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah bertindak sebagai penstabil ekonomi, dengan mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mengimbangi fluktuasi alami dalam aktivitas ekonomi.
2. Kebijakan Fiskal: Kebijakan ini merupakan sebuah cara yang dapat diambil oleh pemerintah pada saat terjadinya resesi. Pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran publik untuk merangsang permintaan agregat. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengurangi atau menghapus pajak. Penurunan pajak akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Kebijakan ini berperan dalam mempercepat pemulihan ekonomi dengan meningkatkan permintaan secara langsung.
3. Kebijakan Moneter: Kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Perubahan dalam sektor keuangan dapat secara efektif meningkatkan output melalui investasi dan perdagangan saham. Pemikiran Keynesian menekankan pentingnya ekspansi fiskal dan moneter sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dalam permintaan agregat. Sebagai contoh, penurunan suku bunga oleh bank sentral bertujuan untuk mendorong peningkatan pinjaman dan investasi. Dengan suku bunga yang lebih rendah, biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau, yang pada gilirannya akan mendorong aktivitas ekonomi.

5.4 Keynesian Dalam Ekonomi Modern

Pemikiran Keynesian memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan kebijakan ekonomi modern, terutama dalam hal bagaimana pemerintah seharusnya berperan aktif dalam mengelola perekonomian. Teori Keynesian menekankan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk merangsang perekonomian, terutama selama masa resesi atau ketika permintaan agregat menurun. Selama krisis ekonomi atau resesi global, banyak negara yang mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif, seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak, untuk mendorong permintaan domestik dan merangsang aktivitas ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari

penurunan permintaan dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga membantu perekonomian pulih lebih cepat.

Keberhasilan kebijakan Keynesian ini dapat dilihat pada penerapannya selama krisis keuangan global 2008. Ketika banyak negara menghadapi resesi parah dan lonjakan pengangguran, pemerintah di berbagai belahan dunia mengikuti prinsip-prinsip Keynesian dengan mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi yang besar. Mereka meningkatkan belanja pemerintah untuk mendanai proyek infrastruktur, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, dan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk mendorong investasi. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dan mempercepat pemulihan ekonomi (Krugman, 2009). Dengan mengurangi tekanan pada sektor swasta yang sedang lesu dan meningkatkan daya beli masyarakat, kebijakan stimulus ini membantu mencegah resesi yang lebih dalam dan mempercepat proses pemulihan ekonomi global.

Pemikiran Keynesian mengalami kebangkitan kembali pada tahun 2007-2008, seiring dengan terjadinya krisis keuangan global yang mengguncang perekonomian dunia. Pada periode ini, banyak negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, beralih ke pendekatan Keynesian untuk merumuskan kebijakan guna mengatasi dampak krisis tersebut. Dengan krisis yang melibatkan keruntuhan lembaga keuangan besar dan penurunan tajam dalam permintaan agregat, pemerintah di banyak negara merasa perlu untuk campur tangan melalui kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengembalikan kepercayaan pasar (Krugman, 2009). Kebangkitan teori Keynesian terjadi pada saat yang tepat, ketika banyak ekonom dan pembuat kebijakan mulai kembali mengakui pentingnya peran aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian.

Salah satu tokoh yang berperan penting dalam kebangkitan ini adalah Profesor N. Gregory Mankiw dari Universitas Harvard. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh New York Times, Mankiw menyatakan bahwa meskipun John Maynard Keynes telah lama meninggal, teori-teori dan pemikiran ekonominya tetap relevan dan menjadi fondasi yang sangat penting dalam ekonomi modern. Mankiw menekankan bahwa Keynes adalah ekonom yang dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi, termasuk dalam kondisi krisis yang luar biasa (Palley, 2017). Pandangan ini sejalan dengan banyaknya negara yang mengimplementasikan kebijakan fiskal yang lebih aktif dan memperbesar belanja pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi global.

Namun, meskipun Keynesian berhasil memberikan solusi untuk beberapa masalah ekonomi yang muncul selama krisis, peristiwa tersebut juga menunjukkan bahwa teori Keynesian masih perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang lebih kompleks di era modern. Salah satu kritik utama yang muncul adalah perlunya peran sistem keuangan yang lebih baik dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Krisis 2007-2008 menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor keuangan dan bagaimana kegagalan sektor ini dapat memperburuk dampak krisis. Serta munculnya pendapat bahwa krisis ekonomi 2007-2008 juga menunjukkan bahwa teori Keynesian masih perlu dievaluasi, terutama terkait dengan peran sistem keuangan yang lebih baik dan efektif (Bernanke, 2015). Oleh karena itu, meskipun Keynesianisme memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan fiskal ekspansif, tantangan baru dalam sistem keuangan global memerlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap teori ini agar lebih responsif terhadap dinamika pasar dan risiko sistemik.

Pandangan dan teori Keynes terus dievaluasi serta diperbarui oleh kelompok Neo-Keynesian dan Post-Keynesian agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan makroekonomi modern. Kelompok Neo-Keynesian, yang muncul pada 1970-an, berusaha mengintegrasikan pemikiran Keynes dengan teori-teori ekonomi mikro, seperti teori pasar yang tidak sempurna dan ekspektasi rasional. Mereka mengembangkan model-model yang lebih menekankan pada peran harga, upah, dan pengaturan pasar dalam perekonomian yang tidak selalu berjalan lancar. Sementara itu, para ekonom Post-Keynesian menyoroti ketidaksempurnaan pasar dan ketidakpastian yang lebih besar dalam perekonomian, serta pentingnya kebijakan yang berfokus pada distribusi pendapatan dan stabilitas jangka panjang. Kedua aliran ini menggunakan penelitian empiris terbaru untuk memperbaharui pendekatan Keynesian agar lebih relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer, seperti globalisasi, teknologi, dan krisis keuangan.

Kelompok Neo-Keynesian dan Post-Keynesian melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengembangan terhadap teori Keynesian untuk membuatnya lebih efektif dalam menjaga stabilitas perekonomian di dunia modern yang semakin kompleks. Mereka berfokus pada aspek-aspek baru yang belum dibahas secara mendalam dalam teori asli Keynes, seperti peran sektor keuangan yang lebih besar, ketimpangan ekonomi, serta faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, mereka berupaya menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih holistik dan fleksibel untuk mengatasi tantangan global, seperti krisis ekonomi, ketidaksetaraan, dan perubahan struktural

dalam pasar tenaga kerja. Melalui pendekatan ini, teori Keynesian tidak hanya tetap relevan, tetapi juga lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam perekonomian dunia.

Teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok Neo-Keynesian bertujuan untuk menjelaskan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam perekonomian. Mereka berfokus pada bagaimana menjaga stabilitas ekonomi dengan merespons fluktuasi yang muncul, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pendapatan dalam jangka panjang. Fluktuasi ekonomi, seperti siklus resesi dan ekspansi, menjadi isu utama dalam pemikiran Neo-Keynesian, yang menganggap peran pemerintah dan kebijakan fiskal sebagai kunci untuk menstabilkan perekonomian. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan pendapatan menjadi fokus utama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2016). Teori-teori ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan strategi ekonomi yang dapat merespons ketidakseimbangan dalam ekonomi global.

Namun, pendekatan Neo-Keynesian berbeda dengan pendekatan Keynesian klasik dalam hal pemahaman tentang fluktuasi ekonomi. Sementara teori Keynesian asli lebih berfokus pada analisis penyebab fluktuasi, Neo-Keynesian lebih menekankan pada cara-cara untuk mengatasi fluktuasi tersebut daripada berusaha mencari akar penyebabnya. Kelompok ini melihat fluktuasi ekonomi sebagai fenomena yang sulit diprediksi dan sering kali tidak dapat dihindari, sehingga perhatian utama mereka adalah pada pengelolaan fluktuasi melalui kebijakan yang dapat menstabilkan perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang responsif dan penggunaan instrumen kebijakan moneter yang tepat menjadi penting untuk mengatasi dampak negatif dari fluktuasi tersebut, seperti pengangguran yang tinggi atau inflasi yang tidak terkendali. Pendekatan ini lebih pragmatis, mengutamakan respons cepat untuk mengurangi dampak ketidakstabilan ekonomi tanpa terlalu banyak bergantung pada prediksi yang mungkin tidak akurat.

Meskipun teori-teori dalam paham Keynesian pada dasarnya bersifat statis, yang berarti hanya relevan dengan kondisi saat pembentukannya dan tidak mempertimbangkan masa kini, masa lalu, atau masa depan, dasar dari sistem ini sebenarnya bersifat dinamis. Meskipun konsep dan teori Keynes memperhitungkan relevansi masa lalu dan masa depan, Keynes juga meninggalkan beberapa petunjuk mengenai penerapan premis dasar dari teori pertumbuhan ekonomi jangka panjang seiring berjalannya waktu.

5.5 Kesimpulan

Ekonomi dunia pada abad ke-18 dan awal abad ke-20 didominasi oleh pemikiran ekonomi politik klasik yang menekankan kebebasan pasar dan pengurangan peran negara dalam mengatur perekonomian. Namun, penerapan teori *laissez-faire* yang berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian, seperti yang terlihat dalam krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1930-an. Kegagalan pemikiran klasik dalam mengatasi masalah pengangguran, inflasi, dan ketidakmerataan pendapatan mendorong munculnya teori Keynesian, yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian. Dengan kebijakan tersebut, Keynesian berargumen bahwa pemerintah dapat mengatasi fluktuasi ekonomi dan memastikan kelangsungan serta kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, teori Keynesian menawarkan solusi yang lebih efektif untuk menciptakan perekonomian yang stabil dan sejahtera, mengingat kelemahan yang ditinggalkan oleh aliran klasik.

Pemikiran ekonomi politik Keynesian memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan ekonomi global, seperti yang terlihat pada Perjanjian Bretton Woods dan pembentukan IMF, dengan menekankan peran penting pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan mengatasi ketidakseimbangan pasar. Namun, pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, popularitas paham Keynesian menurun karena masalah seperti inflasi, kekurangan sumber daya, dan stagflasi, yang memicu kebangkitan pemikiran ekonomi klasik dan neo-liberal. Meskipun demikian, Keynes tetap menekankan pentingnya permintaan agregat dalam perekonomian dan mendesak intervensi pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengatasi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kritik Keynesian terhadap teori klasik dan neo-klasik menyoroti kelemahan mekanisme pasar dan menegaskan bahwa pasar tidak selalu dapat menciptakan keseimbangan yang diinginkan tanpa campur tangan negara. Secara keseluruhan, teori Keynesian mengajukan pandangan yang lebih dinamis dan realistis tentang peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran ekonomi politik Keynesian menekankan tiga prinsip dasar yang saling terkait: permintaan agregat, peran aktif pemerintah, dan hubungan antara tabungan dan investasi. Pertama, Keynesian berpendapat bahwa permintaan agregat—yang terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor—merupakan faktor utama yang menentukan tingkat produksi dan kesempatan kerja dalam perekonomian. Kedua, Keynesian menegaskan bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dengan kebijakan

fiskal dan moneter yang bertujuan untuk menstabilkan permintaan agregat dan menghindari fluktuasi yang merugikan, seperti resesi atau inflasi. Terakhir, dalam hal tabungan dan investasi, Keynesian berpendapat bahwa tabungan lebih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sementara investasi dipengaruhi oleh suku bunga dan ekspektasi keuntungan di masa depan. Secara keseluruhan, pandangan Keynesian menyoroti pentingnya pengelolaan permintaan agregat dan peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

5.5 Latihan dan Refleksi

1. Apakah ide utama dalam pemikiran ekonomi politik Keynesian?
2. Bagaimanakah intervensi pemerintah menurut pemikiran ekonomi politik Keynesian?
3. Bagaimanakah pengaruh pemikiran ekonomi politik Keynesian bagi ekonomi negara?
4. Sebutkan contoh bentuk intervensi negara yang didasarkan pada pemikiran ekonomi politik Keynesian!

5.6 Glosarium

1. Permintaan Agregat (Aggregate Demand): Total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu.
2. Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy): Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian.
3. Kebijakan Moneter (Monetary Policy): Kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi.
4. Depresi Besar (Great Depression): Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1930-an, ditandai dengan penurunan produksi industri, peningkatan pengangguran, dan penurunan harga barang dan jasa.
5. Efisiensi Marjinal Modal (Marginal Efficiency of Capital): Tingkat keuntungan yang diharapkan dari tambahan unit modal yang diinvestasikan.

5.7 Penugasan: Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian

Instruksi:

Latihan ini akan menguji pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip dasar aliran Keynesian dan dampaknya dalam konteks ekonomi modern. Anda diharapkan untuk memberikan analisis yang mendalam serta menunjukkan keterkaitan konsep-konsep ini dengan kondisi ekonomi nyata.

1. Studi Kasus: Pengaruh Kebijakan Fiskal dalam Masa Krisis Ekonomi

- Buat studi kasus (2-3 halaman) tentang penerapan kebijakan fiskal di salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi, seperti krisis finansial global 2008 atau krisis COVID-19. Analisis bagaimana pemerintah negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip Keynesian dalam upaya pemulihan ekonomi, khususnya melalui kebijakan belanja publik dan penyesuaian pajak.
 - Sertakan contoh kebijakan yang diambil dan diskusikan bagaimana langkah tersebut berperan dalam meningkatkan permintaan agregat serta mendorong pemulihan ekonomi.
2. Analisis Teoretis: Intervensi Pemerintah Menurut Keynesian vs Klasik
- Tulis analisis singkat (1-2 halaman) yang membandingkan intervensi pemerintah dalam ekonomi menurut teori Keynesian dan teori klasik. Fokuslah pada bagaimana peran negara berbeda dalam menstabilkan perekonomian, terutama selama periode ketidakstabilan ekonomi.
 - Jelaskan bagaimana teori Keynesian melihat peran pemerintah dalam menjaga permintaan agregat tetap stabil dibandingkan dengan teori klasik yang lebih mengandalkan mekanisme pasar.
3. Eksplorasi: Penerapan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Resesi
- Pilih sebuah negara yang telah menerapkan kebijakan moneter untuk menangani masalah resesi dalam beberapa tahun terakhir. Buat analisis (2-3 halaman) mengenai bagaimana negara tersebut menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan investasi.
 - Gunakan prinsip-prinsip Keynesian dalam menilai dampak dari pengaturan suku bunga terhadap tingkat konsumsi dan investasi, serta efeknya terhadap permintaan agregat.
4. Refleksi: Kritik Terhadap Pemikiran Keynesian dalam Ekonomi Modern
- Tulis refleksi singkat (1-2 halaman) mengenai kritik yang sering kali diarahkan terhadap pemikiran ekonomi politik Keynesian, khususnya dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Pertimbangkan apakah intervensi pemerintah yang diusulkan oleh Keynesian selalu relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketidakstabilan sistem keuangan dan globalisasi.
 - Berikan pandangan Anda, apakah pendekatan Keynesian tetap relevan di era ekonomi digital dan globalisasi? Jelaskan alasan Anda dengan contoh yang mendukung argumen.

Batas Waktu: 2 Minggu

- Format Pengumpulan: Dokumen PDF dengan nama file: “Penugasan_Bab5_NamaMahasiswa.pdf”

BAB VI
PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK
ALIRAN MONETARIS

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran ekonomi politik aliran moneteris

Menjelaskan

Kemunculan pemikiran ekonomi politik aliran moneteris

Menjelaskan

Tokoh pemikiran ekonomi aliran moneteris: Milton Friedman

Menjelaskan

Prinsip-prinsip dasar dalam pemikiran ekonomi

politik aliran moneteris

Menjelaskan

Perdebatan Keynesian VS Moneteris

BAB VI

PEMIKIRAN EKONOMIPOLITIK ALIRAN MONETARIS

6.1 Pendahuluan

Pemikiran John Maynard Keynes, yang dikenal dengan istilah pemikiran Keynesian dalam bidang ekonomi, menjadi sangat populer dan dihargai setelah keberhasilannya mengatasi Depresi Besar (Great Depression) pada dekade 1930-an, serta menghadapi tantangan ekonomi selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Dengan menggunakan kebijakan fiskal yang bersifat *counter-cyclical* dan *fine tuning*, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, berhasil mengendalikan permintaan masyarakat tanpa disertai inflasi, seperti yang terjadi pada tahun 1930-an (Deliarnov, 2018).

Pada dekade 50-an dan 60-an, mayoritas ekonom dunia percaya bahwa fenomena boom dan depresi adalah masalah atau ketakutan masa lalu yang tidak perlu dikhawatirkan akan terulang di masa depan. Sebagai contoh, ketika output rendah dan pengangguran meningkat, pemikiran Keynesian menyarankan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui proyek-proyek padat karya. Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan output nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Dalam pandangan Keynesian, inflasi terjadi karena pengeluaran agregat yang berlebihan, dan untuk mengatasinya, pemerintah perlu mengurangi belanja atau meningkatkan pajak (Krugman & Wells, 2024). Selain itu, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter ketat (*tight money policy*) juga diterapkan, yang diharapkan dapat menurunkan inflasi secara otomatis.

Pada dekade 60-an, berkembang keyakinan di kalangan masyarakat bahwa terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran. Hal ini berarti para akademisi berpendapat bahwa jika inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran cenderung rendah, dan sebaliknya, jika inflasi rendah, maka tingkat pengangguran akan tinggi. Namun, pada tahun 1973/1974, terjadi lonjakan harga minyak yang diikuti dengan kenaikan harga-harga barang secara signifikan. Yang menjadi perhatian adalah bahwa meskipun terjadi inflasi, tingkat pengangguran justru terus meningkat. Akibatnya, teori Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran publik dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan inflasi selama masih ada pengangguran, tidak lagi terbukti efektif. Pada kenyataannya, upaya untuk mengurangi inflasi pada tahun 70-an justru

menyebabkan lonjakan pengangguran, sementara usaha untuk menurunkan pengangguran dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah malah memperburuk inflasi (Faruq & Mulyanto, 2017).

Kegagalan dan kelemahan pemikiran Keynesianisme dalam mengatasi beberapa masalah ekonomi, terutama setelah krisis inflasi dan pengangguran yang terjadi pada tahun 1970-an, mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ekonomi. Para ekonom modern mulai merumuskan teori-teori alternatif yang mencoba menjelaskan fenomena ekonomi yang belum dapat dipahami secara memadai oleh pendekatan Keynesian. Mereka menyoroti pentingnya faktor-faktor lain dalam perekonomian, seperti ekspektasi inflasi, kebijakan moneter, dan dinamika pasar tenaga kerja, yang tidak sepenuhnya dijelaskan dalam teori Keynesian. Berbagai pemikiran baru ini berusaha menawarkan solusi lebih komprehensif untuk masalah-masalah ekonomi yang dihadapi saat itu, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan pasar bebas, mekanisme harga, dan peran penting dari kebijakan moneter (Samuelson dan Nordhaus, 2010). Dengan kata lain, para pemikir ekonomi modern berupaya untuk memperbaharui dan menyempurnakan teori-teori ekonomi yang ada, agar lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Pemikiran ekonomi politik aliran moneteris merupakan salah satu aliran ekonomi yang berfokus pada peran penting uang dalam perekonomian. Aliran ini muncul sebagai respons terhadap teori Keynesian yang lebih menekankan pada intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah ekonomi. Aliran moneteris menekankan bahwa jumlah uang yang beredar adalah penentu utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan tingkat harga dalam jangka panjang. Kebijakan moneter, yang menggunakan instrumen seperti suku bunga, dianggap sebagai alat utama yang harus digunakan pemerintah untuk mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Aliran ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an ketika inflasi tinggi melanda Amerika Serikat dan Inggris, dan kebijakan moneteris digunakan untuk menurunkannya (Samuelson dan Nordhaus, 2010).

Keynes menjadi penggerak utama bagi intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter, yang berhasil memberikan solusi terhadap masalah Depresi Besar pada tahun 1930-an. Pemikirannya kemudian mendominasi di negara-negara Barat dan juga menyebar ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Saat itu, kebijakan fiskal yang bersifat counter-cyclical dan fine-tuning yang diterapkan di negara-negara Barat, terutama di negara-negara besar, berhasil mengoptimalkan permintaan masyarakat tanpa menimbulkan inflasi

seperti yang terjadi selama Depresi Besar. Pada masa kejayaan aliran Keynesian, para pendukungnya percaya bahwa pemikiran ini mampu menjawab pertanyaan yang sebelumnya belum terpecahkan, meyakinkan bahwa peristiwa tahun 1930-an adalah masalah yang telah berlalu dan tidak perlu dikhawatirkan (Mankiw, 2021).

Dalam situasi inflasi, mereka berpendapat bahwa diperlukan peran fiskal dengan menaikkan pajak, dan sebaliknya, yang pada dasarnya akan menggerakkan perekonomian suatu negara sesuai dengan resep Keynesian. sehingga pada tahun 1960-an masyarakat yakin bahwa ada hubungan terbalik antara inflasi dengan tingkat pengangguran pada saat itu, artinya ketika tingkat pengangguran rendah maka tingkat inflasi tinggi. Sebaliknya jika tingkat pengangguran rendah maka inflasi tinggi. Akan tetapi hal ini lama kelamaan menimbulkan gap pada teori ini yaitu seperti yang terjadi pada tahun 70-an yang terjadi ketidaksinkronan dengan anggapan tersebut. Pada tahun ini, harga mulai menunjukkan kecenderungan pada peningkatan yang tidak bisa dibendung, didorong dengan naiknya harga minyak pada saat itu, hal ini tentu sangat merisaukan dan terjadi kenaikan inflasi dan pengangguran meningkat. Hal ini tentu bertentangan dengan teori Keynesian yang menjelaskan nilai keterbalikkan. Dengan demikian, teori keynesian tidak lagi menunjukkan kebenaran dalam realitas kehidupan yang berkelanjutan. Nyatanya, kegiatan yang diarahkan untuk mengurangi inflasi malah membawa pada tingginya angka pengangguran pada tahun 70-an (Apridar, 2013). Usaha intervensi pemerintah untuk mengurangi pengangguran menyebabkan inflasi semakin parah.

Seiring berjalannya waktu, aliran Keynesian mengalami stagnasi dan sering kali tidak selaras dengan prinsip-prinsip ideal yang diusulkan oleh Keynes. Akibatnya, ajaran-ajaran Keynes terpaksa ditinjau ulang dan bahkan dipertanyakan kredibilitasnya. Banyak ekonom mulai mengkritik pandangan Keynes mengenai pentingnya intervensi pemerintah dalam mengarahkan perekonomian ke arah yang diinginkan. Ketidakberhasilan aliran Keynesian dalam mengatasi berbagai masalah pada tahun 1970-an, terutama stagflasi, melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat dianggap gagal total. Hal ini memunculkan aliran baru yang dikenal sebagai "aliran Moneter," yang lebih menekankan pada kebijakan moneter untuk menangani masalah ekonomi saat itu. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Karl Brunner untuk menjelaskan dan menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijakan moneter (Nanga, 2005).

6.2 Pemikiran Ekonomi Politik: Milton Friedman

Milton Friedman adalah tokoh utama dalam aliran monetaris, yang dikenal karena pandangannya yang menekankan pentingnya kebijakan moneter dalam mengatur perekonomian. Lahir di Brooklyn, New York, pada 31 Juli 1912, Friedman menjadi salah satu ekonom paling berpengaruh di abad ke-20. Kontribusinya dalam mengembangkan teori monetaris sangat besar, terutama dalam hal menjelaskan bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi, pengangguran, dan kestabilan ekonomi. Sebagai seorang pendukung pasar bebas, Friedman percaya bahwa peran pemerintah dalam ekonomi harus dibatasi, terutama dalam hal pengendalian uang dan kebijakan fiskal.

Salah satu karya paling penting dari Milton Friedman adalah buku yang berjudul *A Monetary History of the United States 1867-1960*, yang ditulis bersama dengan Anna Schwartz pada tahun 1963. Dalam buku ini, mereka berargumen bahwa kebijakan moneter yang buruk oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, adalah penyebab utama terjadinya Depresi Besar pada tahun 1930-an. Friedman dan Schwartz menganalisis peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah ekonomi Amerika dan menunjukkan bahwa kesalahan dalam kebijakan moneter, seperti kegagalan Federal Reserve untuk menjaga kestabilan jumlah uang beredar, sangat berperan dalam memperburuk krisis ekonomi pada masa itu (Friedman & Schwartz, 1963). Penurunan pasokan uang yang dipicu oleh kebijakan tersebut memperburuk resesi, memperpanjang periode depresinya, dan menyebabkan tingkat pengangguran yang sangat tinggi.

Menurut Friedman, kebijakan Federal Reserve yang mengurangi jumlah uang beredar pada saat krisis, bukannya mengimbangnya, justru memperburuk keadaan ekonomi yang sudah sangat sulit. Dalam pandangan monetaris, pengaturan jumlah uang beredar adalah kunci utama untuk menjaga kestabilan ekonomi. Friedman berpendapat bahwa inflasi dan resesi bisa lebih efektif dihindari dengan kebijakan moneter yang hati-hati dan prediktif, daripada kebijakan fiskal yang bergantung pada pengeluaran pemerintah. Dengan mengkaji kembali peristiwa besar seperti Depresi Besar, Friedman berusaha menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang tepat dapat mengurangi dampak krisis ekonomi dan membantu pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

Friedman juga dikenal dengan pernyataannya yang terkenal, "Inflasi ada di mana saja dan selalu merupakan fenomena moneter." Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya bahwa inflasi bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti pengeluaran pemerintah yang berlebihan atau kekurangan produksi, melainkan karena adanya kelebihan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Menurut Friedman, inflasi terjadi ketika terdapat lebih banyak uang yang

mengejar barang dan jasa yang terbatas, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga secara umum. (Friedman & Schwartz, 1963). Bagi Friedman, pengendalian inflasi sangat bergantung pada kebijakan moneter yang dapat mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ia berpendapat bahwa kebijakan moneter yang ketat dan terkontrol adalah solusi utama untuk menanggulangi inflasi, karena dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka daya beli masyarakat juga akan berkurang, dan inflasi dapat dikendalikan. Friedman menekankan bahwa pemerintah dan bank sentral harus berhati-hati dalam mengatur pasokan uang agar tidak melebihi kebutuhan perekonomian, karena inflasi yang tinggi dapat merusak kestabilan ekonomi (Friedman & Schwartz, 1963).

Oleh karena itu, untuk mengendalikan inflasi, menurut Friedman, pemerintah harus fokus pada pengelolaan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter yang ketat dan disiplin. Ia menyarankan agar bank sentral tidak terlalu bergantung pada kebijakan fiskal atau stimulus yang bersifat jangka pendek, karena kebijakan tersebut justru dapat memperburuk inflasi dalam jangka panjang. Menurut Friedman, hanya dengan menjaga pasokan uang yang stabil dan terkendali, perekonomian dapat berkembang secara sehat dan inflasi dapat dijaga pada tingkat yang rendah, memberikan kestabilan bagi masyarakat dan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Friedman, sebagai pemikir utama dalam teori monetaris, sangat menekankan bahwa pertumbuhan uang yang berlebihan merupakan penyebab utama terjadinya inflasi riil. Menurutnya, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian tumbuh lebih cepat daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelebihan uang ini mendorong kenaikan harga-harga secara umum, karena lebih banyak uang mengejar barang yang terbatas. Oleh karena itu, dalam pandangan Friedman, inflasi adalah fenomena moneter yang tidak bisa diatasi hanya dengan mengendalikan biaya upah atau harga, karena itu hanya menangani gejala, bukan akar permasalahannya.

Friedman berargumen bahwa kebijakan pengendalian harga dan upah yang sering diterapkan oleh pemerintah, meskipun dapat memberikan efek sementara, pada akhirnya tidak efektif dalam mengatasi inflasi dalam jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa cara-cara tersebut hanya menghambat mekanisme pasar yang seharusnya bekerja untuk menyesuaikan harga dengan kondisi perekonomian. Jika kebijakan ini terus dipertahankan, maka hanya akan menyebabkan distorsi lebih lanjut dalam perekonomian, yang pada gilirannya bisa memperburuk inflasi atau bahkan menciptakan masalah ekonomi lainnya, seperti kelangkaan barang (Friedman & Schwartz, 1963).

Lebih jauh lagi, Friedman menegaskan bahwa untuk mengendalikan inflasi secara efektif, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada pasokan barang dan jasa dalam perekonomian. Pengendalian inflasi jangka panjang, menurutnya, hanya dapat tercapai jika kebijakan moneter yang tepat diterapkan, yakni dengan mengatur jumlah uang yang beredar agar seimbang dengan kapasitas produksi barang dan jasa. Tanpa perhatian serius terhadap aspek pasokan, upaya untuk mengurangi inflasi hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak bertahan lama. Dengan demikian, Friedman mendorong kebijakan moneter yang lebih stabil dan terkontrol untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari terjadinya inflasi yang merugikan.

6.3 Prinsip-Prinsip Utama Aliran Moneteris

1. Pentingnya peran uang bagi ekonomi

Monetarisme berpendapat bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian adalah faktor penentu utama bagi kestabilan ekonomi. Menurut para penganut teori ini, keseimbangan jumlah uang yang beredar sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, hal ini akan mendorong terjadinya inflasi, karena lebih banyak uang mengejar barang dan jasa yang terbatas, sehingga harga-harga naik secara umum. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, perekonomian akan menghadapi deflasi, yang dapat mengarah pada resesi atau kontraksi ekonomi yang serius.

Inflasi yang disebabkan oleh kelebihan uang beredar dapat merusak daya beli masyarakat dan mengganggu kestabilan harga-harga barang dan jasa. Ketika harga-harga naik dengan cepat, pendapatan riil masyarakat akan tergerus, mengurangi konsumsi dan investasi. Hal ini bisa menciptakan ketidakpastian ekonomi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, para monetaris menekankan pentingnya pengendalian ketat terhadap jumlah uang yang beredar, dengan tujuan untuk mencegah inflasi yang tidak terkendali yang dapat merusak kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, perekonomian akan mengalami kekurangan likuiditas, yang dapat menyebabkan resesi. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dan konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan, sehingga investasi dan konsumsi akan menurun. Penurunan aktivitas ekonomi ini dapat memperburuk pengangguran dan menghambat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu,

monetaris berargumen bahwa kebijakan moneter yang tepat harus menjaga jumlah uang yang beredar pada tingkat yang seimbang, agar perekonomian dapat berjalan stabil tanpa terjebak dalam inflasi tinggi atau resesi.

2. Kebijakan Moneter Lebih Penting daripada Kebijakan Fiskal

Aliran moneteris lebih menekankan pada kebijakan moneter daripada kebijakan fiskal dalam upaya mengatur perekonomian. Para penganut teori ini berargumen bahwa kebijakan moneter, yang berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar, memiliki peran yang lebih besar dalam menjaga kestabilan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan fiskal yang melibatkan perubahan pajak atau pengeluaran pemerintah. Mereka percaya bahwa kebijakan moneter yang ketat dan terkontrol dapat secara langsung mempengaruhi inflasi, tingkat suku bunga, serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Menurut moneteris, pengaturan jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas harga, sehingga sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian. Jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, inflasi akan terjadi, sementara jika terlalu sedikit, perekonomian bisa jatuh ke dalam resesi. Oleh karena itu, bagi para moneteris, peran bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar sangat krusial untuk menghindari ketidakseimbangan yang dapat merusak stabilitas ekonomi. Mereka percaya bahwa dengan kebijakan moneter yang tepat, ekonomi bisa tumbuh dengan sehat tanpa mengalami gejolak inflasi yang berlebihan.

Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa perubahan dalam kebijakan fiskal, seperti penyesuaian pajak atau pengeluaran pemerintah, tidak seefektif kebijakan moneter dalam mengatasi masalah ekonomi. Meskipun kebijakan fiskal bisa memberikan dampak sementara, seperti merangsang permintaan agregat selama resesi, efeknya tidak selalu berkelanjutan. Moneteris percaya bahwa solusi jangka panjang untuk kestabilan ekonomi lebih bergantung pada pengendalian pasokan uang dan pengaturan inflasi melalui kebijakan moneter yang disiplin. Dengan demikian, mereka menekankan pentingnya peran bank sentral dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneter yang bijaksana dan terencana.

3. Minimnya Campur Tangan Pemerintah

Monetarisme berpendapat bahwa sektor swasta secara alami stabil dan dapat berfungsi dengan efisien tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah. Para penganut teori ini percaya bahwa mekanisme pasar, jika dibiarkan bekerja secara bebas, akan secara

otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan dalam perekonomian dan mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling produktif. Mereka melihat pasar sebagai kekuatan yang lebih efektif dalam menentukan harga, alokasi sumber daya, dan memacu pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan intervensi pemerintah yang sering kali menambah kompleksitas dan ketidakseimbangan.

Menurut para monetaris, campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam ekonomi, seperti pengaturan harga atau kebijakan subsidi yang besar, dapat menciptakan distorsi dalam perekonomian. Kebijakan semacam itu, menurut mereka, seringkali mengarah pada inefisiensi, pemborosan sumber daya, dan penghambatan inisiatif sektor swasta. Selain itu, campur tangan pemerintah juga dapat merusak mekanisme pasar yang seharusnya mengatur penawaran dan permintaan secara alami, yang pada gilirannya mengurangi daya saing dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, dari perspektif monetaris, peran pemerintah dalam perekonomian sebaiknya dibatasi. Mereka menyarankan agar pemerintah hanya fokus pada menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta untuk berkembang, seperti melalui kebijakan moneter yang stabil dan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Dengan membatasi campur tangan, para monetaris percaya bahwa perekonomian dapat berfungsi lebih efisien, memberikan insentif yang tepat untuk inovasi dan investasi, serta menjaga kestabilan jangka panjang.

Pemikiran ekonomi politik aliran monetaris memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami dan mengelola perekonomian. Meskipun banyak dikritik, pendekatan ini telah terbukti efektif dalam beberapa konteks sejarah, seperti penurunan inflasi pada 1980-an di Amerika Serikat. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengelolaan uang yang hati-hati dan peran terbatas pemerintah dalam mengatur perekonomian.

Meskipun pemikiran ekonomi politik aliran Moneteris menjadi semakin penting dan populer pada tahun 1970-an, Moneteris tetap mendapat kritik dari pemikir-pemikir aliran lain, terutama dari kaum Keynesian. Mereka berpendapat bahwa Moneteris tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai siklus perekonomian, karena pada dasarnya siklus ekonomi itu tidak stabil dan tidak hanya mengandalkan teori kuantitas. Selain itu, kaum Keynesian tidak percaya bahwa pasar dapat beradaptasi sendiri terhadap berbagai gangguan dan dengan cepat kembali ke

tingkat pekerjaan penuh (Hetzel, 2013). Walaupun kebijakan moneteris memiliki dampak signifikan dalam menangani masalah devaluasi modal dan keruntuhan kapasitas produksi, terutama saat resesi dan inflasi terjadi, hal ini tidak menghilangkan kecenderungan akumulasi modal yang berlebihan. Meskipun permasalahan ini terus berlangsung, para ekonom dan pemerintah terus mencari solusi untuk mencapai stabilitas dalam siklus ekonomi. Sama halnya dengan aliran Keynesian, stabilitas politik dalam paham Moneteris juga bergantung pada akumulasi modal yang berkelanjutan, meskipun tidak merata di seluruh dunia.

6.4 Moneteris vs Keynesian

Pemikiran ekonomi politik aliran Moneteris memiliki cara pandang yang berbeda dengan aliran Keynesian. Perbedaan pandangan ini dinilai saling berhubungan satu dan yang lainnya. Berikut adalah perbedaan pandangan antara aliran Moneteris dan Keynesian:

1. Pandangan terhadap Inflasi

Monetarisme berpendapat bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian terlalu banyak, melebihi kapasitas produksi barang dan jasa. Menurut aliran ini, kelebihan uang tersebut mendorong kenaikan harga-harga, yang pada akhirnya menyebabkan inflasi. Sebagai solusi, moneteris mengusulkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter yang ketat. Dengan cara ini, diharapkan inflasi dapat dikendalikan dan perekonomian tetap stabil, karena pengendalian jumlah uang beredar dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian (Hasan, 2020).

Sebaliknya, para penganut teori Keynesian berpendapat bahwa inflasi disebabkan oleh pengeluaran agregat yang terlalu besar, yaitu ketika total permintaan dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi yang tersedia, sehingga mendorong kenaikan harga. Sebagai solusi, Keynesian menyarankan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak guna menurunkan permintaan agregat, dengan harapan bahwa langkah-langkah ini dapat menekan inflasi dan membawa perekonomian kembali ke keseimbangan.

2. Kebijakan utama bagi ekonomi

Monetarisme lebih mengutamakan kebijakan moneter sebagai cara untuk mengendalikan perekonomian, dengan fokus utama pada pengaturan jumlah uang yang beredar untuk

menjaga kestabilan harga dan menghindari inflasi. Para penganut teori ini percaya bahwa kebijakan moneter yang ketat dan terkontrol lebih efektif dalam mengatur permintaan agregat dan menjaga keseimbangan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, Keynesian lebih mengutamakan kebijakan fiskal, seperti pengeluaran pemerintah dan pajak, untuk merangsang perekonomian, terutama dalam menghadapi resesi atau pengangguran yang tinggi.

Monetarisme juga berpendapat bahwa kebijakan fiskal seringkali tidak efektif karena dapat menyebabkan defisit anggaran yang tinggi, yang justru memperburuk ketidakseimbangan fiskal dan memperburuk inflasi dalam jangka panjang. Menurut mereka, pengeluaran pemerintah yang berlebihan dapat merusak stabilitas ekonomi dengan meningkatkan utang negara dan menciptakan distorsi pasar (Hasan, 2020). Oleh karena itu, monetaris lebih memilih penggunaan kebijakan moneter yang lebih terukur dan dapat diandalkan untuk menjaga kestabilan ekonomi tanpa harus bergantung pada pembelanjaan pemerintah yang berisiko menciptakan ketidakstabilan fiskal.

3. Peran Pemerintah bagi ekonomi

Monetarisme menyarankan peran pemerintah yang minimal dalam perekonomian, dengan fokus utama pada kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga kestabilan harga. Para penganut aliran ini percaya bahwa pasar seharusnya dibiarkan bekerja secara bebas tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah, karena mereka yakin bahwa sektor swasta dapat mengatur dirinya sendiri dan mencapai efisiensi yang lebih baik. Mereka menganggap bahwa campur tangan pemerintah yang berlebihan sering kali menciptakan distorsi dalam perekonomian, menghambat pasar, dan berpotensi menambah ketidakseimbangan ekonomi.

Sebaliknya, Keynesian percaya bahwa pemerintah harus aktif mengatur perekonomian untuk mencapai kestabilan dan pertumbuhan. Menurut mereka, pasar tidak selalu dapat mengatasi masalah ekonomi dengan sendirinya, terutama dalam situasi krisis atau resesi. Oleh karena itu, Keynesian mendorong intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, seperti pengeluaran publik yang meningkat atau pemotongan pajak, untuk merangsang permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, Keynesian melihat peran aktif pemerintah sebagai kunci untuk menjaga perekonomian berjalan dengan lancar dan menghindari fluktuasi besar yang dapat merugikan masyarakat.

Terdapat perbedaan yang mencolok antara aliran Monetaris dan Keynesian dalam hal pembuatan kebijakan moneter untuk perekonomian suatu negara. Kaum Monetaris berpendapat bahwa uang hanya memengaruhi tingkat inflasi dan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, penganut aliran Keynesian berargumen bahwa uang dapat secara langsung memengaruhi kekuatan ekonomi riil, selain juga berdampak pada inflasi.

Ada banyak perbedaan pendapat tentang cara perekonomian dilihat oleh kelompok monetaris dan keynesian. Secara keseluruhan, pendukung keynesian berpendapat bahwa ekonomi mungkin berada dalam situasi seimbang tingkat output rendah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mekanisme pasar kurang efektif dalam melakukan perubahan yang dibutuhkan, khususnya tingkat harga dan gaji, dan bahwa pengeluaran umumnya lebih rendah daripada penerimaan umumnya. Hal ini dapat berasal dari kekuatan serikat buruh dan praktik oligopolistic yang diterapkan (Deliarnov, 2018).

Kelompok monetaris menolak pandangan Keynesian yang menyatakan bahwa mekanisme korektif kurang efektif. Mereka berargumen bahwa tingkat output yang rendah biasanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kaum monetaris mengkritik bahwa beberapa kekuatan pasar tidak diperhitungkan dalam model Keynesian. Dua faktor utama yang dimaksud adalah efek pigou, yang menunjukkan bahwa investasi akan meningkat seiring dengan penurunan suku bunga, dan bahwa penurunan harga dapat mendorong konsumsi (Hasan, 2020). Perekonomian sering kali berada dalam keadaan seimbang, memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Pemikir Keynesian berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara perubahan ekonomi dan jumlah uang yang beredar. Namun, mereka berargumen bahwa bukan kondisi moneter yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut, melainkan perubahan ekonomi yang memengaruhi jumlah uang yang beredar. Menurut pandangan Keynesian, variasi dalam komponen yang memengaruhi pengeluaran agregat menyebabkan fluktuasi, dan cara paling efektif untuk mengurangi fluktuasi ini adalah dengan menerapkan kebijakan *counter-cyclical* yang lebih fokus pada kebijakan fiskal.

6.5 Kesimpulan

Meskipun pemikiran Keynesian awalnya berhasil mengatasi masalah ekonomi besar seperti Depresi Besar dan memberi solusi untuk pemulihan ekonomi pasca-Perang Dunia Kedua, teori

ini mulai menunjukkan kelemahan dalam menghadapi krisis inflasi dan pengangguran pada dekade 1970-an. Kegagalan dalam menangani fenomena stagflasi, yang menggabungkan inflasi tinggi dengan pengangguran meningkat, menantang prinsip-prinsip Keynesian yang sebelumnya diterima secara luas. Sebagai respons terhadap kegagalan ini, muncul aliran moneter yang menekankan pentingnya kebijakan moneter dan kontrol terhadap jumlah uang beredar untuk mengatasi masalah ekonomi. Dengan demikian, meskipun Keynesian memberi kontribusi besar dalam membentuk kebijakan ekonomi pada abad ke-20, tantangan yang muncul di lapangan mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan baru yang lebih menekankan pada pasar bebas dan kontrol moneter. Pemikiran-pemikiran baru ini menunjukkan pentingnya adaptasi teori ekonomi dalam menjawab masalah ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis.

Kesimpulannya, terdapat perbedaan mendasar antara aliran Moneteris dan Keynesian dalam memahami hubungan antara kebijakan moneter dan perekonomian suatu negara. Kaum Moneteris berfokus pada pengaruh uang terhadap inflasi, dan percaya bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sementara Keynesian menekankan bahwa uang dapat memengaruhi kekuatan ekonomi riil dan tingkat output. Kaum Keynesian juga berpendapat bahwa mekanisme pasar seringkali tidak efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, sehingga kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi. Di sisi lain, kaum Moneteris menolak pandangan ini dan lebih mengutamakan kebijakan yang mengandalkan pasar bebas dan kontrol moneter untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Perbedaan pendapat ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola perekonomian dan menangani tantangan ekonomi, seperti inflasi dan pengangguran.

6.5 Latihan dan Refleksi

1. Bagaimana peran negara pada aliran Moneteris?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan moneteris terhadap perekonomian negara?
3. Bagaimana pentingnya uang bagi ekonomi negara menurut aliran Moneteris?
4. Apakah pembatasan peran pemerintah dalam perekonomian selalu membawa dampak positif?

6.7 Glosarium

1. Moneteris: Aliran pemikiran ekonomi yang menekankan pentingnya jumlah uang yang beredar dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat harga.
2. Kebijakan Moneter: Kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi.
3. Inflasi: Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam perekonomian.
4. Resesi: Penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dan berkepanjangan, ditandai dengan penurunan produk domestik bruto (PDB), peningkatan pengangguran, dan penurunan tingkat investasi.
5. Federal Reserve: Bank sentral Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan kesempatan kerja maksimal.

6.8 Penugasan: Analisis Pemikiran Ekonomi Aliran Moneteris

Instruksi:

Latihan ini akan menguji pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip utama aliran moneteris dan perbedaannya dengan teori Keynesian. Anda diharapkan untuk memberikan analisis mendalam yang mencerminkan keterkaitan konsep-konsep dalam bab ini dengan situasi nyata.

1. Analisis Kontekstual: Dampak Kebijakan Moneter dalam Situasi Stagflasi

- Buat analisis (2-3 halaman) mengenai dampak kebijakan moneteris yang diterapkan oleh Federal Reserve selama krisis stagflasi pada tahun 1970-an. Diskusikan bagaimana pendekatan ini berbeda dari pendekatan Keynesian sebelumnya dan mengapa kebijakan moneter dipilih sebagai solusi utama dalam mengatasi inflasi dan pengangguran pada saat itu.
- Gunakan konsep dari pemikiran Milton Friedman, terutama terkait dengan peran jumlah uang beredar dalam mempengaruhi inflasi dan stabilitas ekonomi.

2. Refleksi Peran Pemerintah dalam Ekonomi: Moneteris vs Keynesian

- Tulis refleksi singkat (1-2 halaman) mengenai bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian berbeda menurut aliran moneteris dan Keynesian. Fokuslah pada dampak pembatasan intervensi pemerintah seperti yang

disarankan oleh monetaris terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan Anda, apakah pembatasan intervensi ini efektif dalam situasi ekonomi yang kompleks dan tidak terduga seperti krisis finansial 2008? Jelaskan alasannya.

3. Studi Kasus: Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Ekonomi Modern

- Pilih satu negara yang baru saja menerapkan kebijakan moneter ketat (contoh: kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat pada 2022 untuk mengendalikan inflasi). Buat studi kasus (2-3 halaman) mengenai dampak dari kebijakan tersebut terhadap ekonomi negara yang dipilih, mencakup aspek inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan stabilitas harga. Gunakan teori monetaris dalam menganalisis dampak kebijakan ini, dan diskusikan perbedaan potensial jika kebijakan Keynesian diterapkan dalam situasi tersebut.

4. Eksplorasi: Pengaruh Pembatasan Peran Pemerintah terhadap Sektor Swasta

- Buat analisis (1-2 halaman) mengenai pandangan monetaris terkait pembatasan peran pemerintah dalam perekonomian. Jelaskan bagaimana sektor swasta berfungsi dalam kondisi di mana pemerintah hanya memberikan peran minimal dalam regulasi ekonomi. Dalam konteks ekonomi digital saat ini, apakah peran minimal pemerintah memberikan dampak positif terhadap inovasi dan efisiensi sektor swasta? Berikan contoh nyata dari sektor teknologi atau startup.

Batas Waktu: 2 Minggu

- **Format Pengumpulan:** Dokumen PDF dengan nama file: “Penugasan_Bab6_NamaMahasiswa.pdf”

BAB VII
PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK
SUSAN STRANGE DAN ROBERT GILPIN

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran ekonomi politik Susan Strange dan Robert Gilpin

Menjelaskan

Pemikiran ekonomi politik: Susan Strange

Menjelaskan

Teori Struktur Kekuatan (*Structural Power Theory*)

Menjelaskan

Pemikiran ekonomi politik: Robert Gilpin

Menjelaskan

Dual economy, Modern world system, dan

Hegemonis stability theory

BAB VII
PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK SUSAN STRANGE DAN
ROBERT GILPIN

7.1 Pendahuluan

Pemikiran ekonomi politik internasional menawarkan perspektif yang lebih luas dalam memahami hubungan antara negara dan pasar dalam konteks global, dengan fokus pada interaksi antara kekuatan politik, ekonomi, dan sosial di tingkat internasional. Pendekatan ini menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi dan keputusan negara mempengaruhi pasar global, serta bagaimana dinamika pasar internasional, seperti perdagangan, investasi, dan globalisasi, dapat mempengaruhi kebijakan negara dan hubungan antarnegara. Dengan demikian, ekonomi politik internasional memberikan wawasan tentang peran negara, pasar, dan aktor-aktor lainnya dalam membentuk struktur dan kebijakan ekonomi global.

Susan Strange dan Robert Gilpin adalah dua tokoh utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap studi ekonomi politik internasional. Strange dikenal karena pemikirannya yang menghubungkan hubungan antara kekuatan politik dan ekonomi dalam konteks global, serta pentingnya struktur pasar internasional dan kekuatan negara dalam membentuk tatanan ekonomi global. Sementara itu, Gilpin berfokus pada analisis hubungan antara negara dan pasar global, serta bagaimana kebijakan ekonomi negara-negara besar memengaruhi sistem internasional. Keduanya telah memberikan landasan teori yang penting dalam memahami dinamika ekonomi politik global dan bagaimana kekuatan internasional saling berinteraksi dalam membentuk kebijakan dan ekonomi dunia.

Susan Strange dan Robert Gilpin mengembangkan teori-teori yang menjelaskan bagaimana negara, pasar, dan aktor-aktor non-negara lainnya berinteraksi dan mempengaruhi dinamika ekonomi global. Strange menekankan pentingnya kekuatan struktural dalam sistem ekonomi internasional dan peran negara dalam mengatur dan memengaruhi pasar global, sementara Gilpin berfokus pada hubungan antara kekuatan negara besar dan pasar internasional, serta dampaknya terhadap sistem global. Keduanya memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana faktor politik, ekonomi, dan sosial saling berhubungan dalam membentuk tatanan ekonomi global dan mempengaruhi kebijakan internasional.

Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, Susan Strange dan Robert Gilpin sepakat bahwa negara masih memegang peran penting dalam mengatur perekonomian, baik di tingkat domestik maupun internasional. Keduanya mengakui bahwa meskipun pasar global semakin terintegrasi dan aktor non-negara semakin berpengaruh, negara tetap memiliki kekuatan untuk membentuk kebijakan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan ekonomi global. Baik Strange maupun Gilpin menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola hubungan ekonomi internasional, menjaga kepentingan nasional, dan mempengaruhi tatanan ekonomi dunia melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pasar.

7.2 Pemikiran Ekonomi Politik: Susan Strange

Susan Strange (1923-1998) adalah seorang ahli ekonomi politik internasional yang sering disebut sebagai "Mother of International Political Economy" karena kontribusinya yang luar biasa dalam mengembangkan disiplin ini. Strange dikenal karena pendekatannya yang menggabungkan teori ekonomi dengan analisis kekuatan politik, serta kemampuannya untuk mengidentifikasi peran penting yang dimainkan oleh negara, pasar, dan aktor non-negara dalam membentuk tatanan ekonomi global. Karyanya mengkritik pandangan tradisional yang terlalu mengutamakan pasar bebas dan menekankan perlunya perhatian terhadap struktur kekuatan dalam sistem internasional, termasuk peran penting institusi dan kekuatan negara dalam mengatur dan mengawasi dinamika ekonomi global.

Dalam karyanya, Susan Strange menyoroti pentingnya memahami interaksi antara negara dan pasar, serta bagaimana hubungan tersebut membentuk tatanan ekonomi internasional. Ia berpendapat bahwa pasar global tidak dapat dipahami secara terpisah dari kekuatan politik yang ada, dan bahwa negara memainkan peran penting dalam mengatur serta memengaruhi dinamika pasar internasional. Strange mengkritik pandangan yang menganggap pasar sebagai kekuatan yang sepenuhnya bebas dari campur tangan negara, dan sebaliknya, ia menekankan perlunya analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuatan struktural, baik yang berasal dari negara maupun dari aktor-aktor non-negara, memengaruhi perekonomian global (Strange, 1988). Menurut Susan Strange, ketika negara dan pasar dapat bersinergi dengan baik, maka ekonomi politik dapat berjalan dengan stabil. Ia berpendapat bahwa hubungan yang seimbang antara negara yang mengatur dan pasar yang berfungsi secara efisien sangat penting untuk mencapai kestabilan ekonomi global. Tanpa sinergi yang tepat, ketidakseimbangan dalam

interaksi tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan yang merugikan baik bagi perekonomian domestik maupun internasional.

Salah satu kontribusi utama Susan Strange dalam bidang ekonomi politik internasional adalah pengembangan Teori Struktur Kekuatan (*Structural Power Theory*), yang dijelaskan secara mendalam dalam bukunya *States and Markets* (1988). Dalam teori ini, Strange mengemukakan bahwa kekuatan struktural yang mencakup kemampuan negara untuk mempengaruhi pasar dan aktor-aktor ekonomi lainnya merupakan elemen krusial dalam memahami dinamika ekonomi global. Teori ini menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur dan membentuk sistem pasar global, serta bagaimana kekuatan struktural dapat memengaruhi alokasi sumber daya dan pembuatan kebijakan ekonomi (Strange, 1988).

7.3 Teori Struktur Kekuatan (*Structural Power Theory*)

Susan Strange mencoba menemukan dan menyampaikan bahwa ada empat kekuatan utama yang diperlukan oleh negara untuk membangun ekonomi, baik secara domestik maupun global. Kekuatan-kekuatan ini menjadi pedoman yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan dan kemajuan ekonomi negara. Keempat kekuatan tersebut berfungsi sebagai rujukan strategis bagi negara untuk mengelola interaksi antara pasar, kebijakan ekonomi, dan dinamika politik internasional, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan dan memperkuat posisi negara dalam perekonomian global (Strange, 1988). Susan Strange membagi struktur kekuatan menjadi empat kategori utama yaitu:

1. Struktur Produksi dan Perdagangan (*Production and Trade Structure*)

Struktur ini menentukan siapa yang memproduksi suatu barang, apa yang diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan bagaimana distribusi produk tersebut di pasar internasional. Dalam konteks ini, struktur pasar global sangat dipengaruhi oleh kekuatan negara atau aktor yang mengendalikan proses produksi dan distribusi barang. Keputusan tentang apa yang diproduksi dan bagaimana produk tersebut didistribusikan dapat memengaruhi pola perdagangan internasional dan hubungan antarnegara.

Produksi merupakan kunci utama bagi negara dalam membangun ekonomi, karena sektor ini menjadi dasar bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Negara-negara maju umumnya memiliki tingkat produksi yang besar, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah signifikan, memenuhi kebutuhan

domestik, serta bersaing di pasar global. Dengan produksi yang efisien dan berkembang, negara-negara ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat posisi mereka dalam ekonomi internasional.

Negara atau aktor yang menguasai produksi memiliki peluang besar untuk mendominasi pasar global. Dengan mengendalikan sumber daya produksi dan teknologi, mereka dapat mempengaruhi harga, pasokan, dan bahkan aturan-aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Hal ini memberikan kekuatan ekonomi yang signifikan, memungkinkan negara atau aktor tersebut untuk memimpin pasar global dan mengatur dinamika perdagangan serta aliran barang dan jasa di seluruh dunia.

Negara atau aktor yang menguasai produksi memiliki peluang besar untuk mendominasi pasar global, karena penguasaan atas sumber daya produksi, teknologi, dan distribusi memberikan mereka kekuatan ekonomi yang signifikan. Dengan kontrol tersebut, mereka dapat mempengaruhi harga, pasokan, dan pola perdagangan internasional, serta menetapkan standar yang berlaku di pasar global. Hal ini memungkinkan negara atau aktor tersebut untuk memimpin dan mengatur dinamika perdagangan dunia, serta memperkuat posisi mereka dalam ekonomi internasional.

2. Struktur Keuangan (*Financial Structure*)

Keuangan merupakan faktor penting bagi ekonomi negara karena pengelolaan yang baik terhadap sumber daya keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat stabilitas ekonomi domestik. Dengan keuangan yang dikelola secara efektif, negara dapat membiayai proyek-proyek pembangunan, meningkatkan infrastruktur, dan menyediakan layanan publik yang vital. Selain itu, kestabilan sektor keuangan juga penting untuk menarik investasi asing, menjaga nilai tukar mata uang, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran internasional, yang semuanya berperan besar dalam memperkuat posisi ekonomi negara di kancah global.

Struktur keuangan mencakup pengaturan mata uang, suku bunga, pajak, dan sektor keuangan lainnya, yang semuanya berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Pengaturan mata uang dan suku bunga, misalnya, dapat mempengaruhi inflasi, investasi, dan daya saing ekonomi, sementara kebijakan pajak berperan dalam pengumpulan pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan. Selain itu, pengelolaan sektor keuangan yang efektif juga penting untuk memastikan

kelancaran aliran modal, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi risiko sistemik dalam perekonomian.

Penguasaan atas struktur keuangan memungkinkan negara atau aktor tertentu untuk mengendalikan aliran modal internasional, yang menjadi sumber kekuatan ekonomi. Dengan mengatur aliran modal, negara atau aktor tersebut dapat mempengaruhi investasi global, alokasi sumber daya, dan bahkan kebijakan ekonomi di negara lain. Kekuatan ini memberi mereka kemampuan untuk mengarahkan arus uang ke sektor-sektor yang strategis, serta mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik di tingkat internasional.

Selain itu, pengendalian aliran modal juga memberikan keuntungan dalam hal kestabilan ekonomi domestik dan internasional. Negara atau aktor yang menguasai struktur keuangan dapat memanfaatkan posisi mereka untuk mengatasi krisis ekonomi, mendukung pertumbuhan sektor-sektor vital, dan memperkuat pengaruh mereka dalam organisasi-organisasi ekonomi global. Dengan demikian, struktur keuangan yang terkendali menjadi alat yang sangat efektif dalam mempertahankan dan memperluas kekuatan ekonomi di panggung dunia.

3. Struktur Keamanan (*Security Structure*)

Keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia, karena setiap individu membutuhkan rasa aman untuk dapat hidup dengan tenang dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa takut akan ancaman atau bahaya. Keamanan ini mencakup perlindungan terhadap diri, keluarga, harta benda, serta kebebasan untuk beraktivitas dalam masyarakat. Tanpa rasa aman, manusia tidak dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, karena ketakutan dan ketidakpastian dapat menghambat produktivitas dan kesejahteraan. Oleh karena itu, menciptakan dan menjaga keamanan adalah hal yang fundamental bagi tercapainya stabilitas individu maupun masyarakat dalam negara.

Negara yang mampu menciptakan struktur keamanan yang kuat, bebas dari ancaman seperti perang, kelaparan, bencana, dan terorisme, akan memiliki kekuatan lebih besar dalam tatanan internasional. Keamanan yang stabil memungkinkan negara untuk fokus pada pembangunan ekonomi, inovasi, dan kemajuan sosial tanpa gangguan dari ancaman eksternal atau ketidakpastian domestik. Dengan memiliki sistem keamanan yang handal, negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kestabilan politik yang sangat penting untuk daya saing di tingkat global.

Selain itu, kekuatan keamanan yang solid juga meningkatkan posisi negara dalam diplomasi internasional, memungkinkan negara untuk berperan aktif dalam mengatasi isu-isu global dan menjaga hubungan yang harmonis dengan negara lain. Keamanan yang terjamin menjadi daya tarik bagi investor dan mitra internasional, yang cenderung memilih negara yang stabil dan aman sebagai tempat untuk melakukan bisnis dan berkolaborasi. Dengan demikian, struktur keamanan yang efektif bukan hanya menjaga ketertiban domestik, tetapi juga memperkuat posisi negara di arena internasional.

Keamanan negara menjadi kunci penting untuk mampu menjadi negara yang maju dan ekonomi yang besar, karena tanpa stabilitas keamanan, segala upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Negara yang aman dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan perdagangan, yang pada gilirannya mendorong kemajuan ekonomi. Selain itu, keamanan yang terjaga memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya tanpa terganggu oleh ancaman eksternal atau ketidakstabilan internal. Dengan keamanan yang kuat, negara juga dapat menarik lebih banyak investor asing, membuka peluang kerja, serta memperkuat posisinya dalam tatanan global, yang semua itu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Struktur Pengetahuan (*Knowledge Structure*)

Tidak ada negara yang maju tanpa adanya teknologi dan pendidikan yang maju, karena keduanya merupakan pilar utama dalam mendorong inovasi, produktivitas, dan daya saing global. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Sementara itu, kemajuan teknologi memungkinkan negara untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempercepat transformasi di berbagai sektor. Dengan kombinasi keduanya, negara dapat memperkuat infrastruktur, memperluas sektor industri, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada kemajuan dan daya saing negara di kancah internasional.

Pengetahuan dianggap sebagai aset penting dalam pembangunan suatu negara karena merupakan dasar bagi inovasi, kemajuan teknologi, dan daya saing global. Negara dengan tingkat pengetahuan yang tinggi memiliki kemampuan untuk mengembangkan

keterampilan dan keahlian di berbagai sektor, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pendidikan yang berkualitas dan pengembangan riset menjadi kunci utama dalam meningkatkan kapasitas intelektual suatu negara, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi tuntutan dunia yang terus berkembang.

Negara yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi juga akan lebih mampu mengikuti perkembangan dunia dan memanfaatkan teknologi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan menguasai teknologi terbaru, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, serta memperkuat posisi mereka di pasar global. Selain itu, penguasaan pengetahuan memungkinkan negara untuk berinovasi, menciptakan solusi baru untuk masalah sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menurut Susan Strange, negara yang mampu mengendalikan keempat struktur utama yaitu struktur produksi, distribusi, keuangan, dan keamanan—akan memiliki kekuatan besar dalam ekonomi politik internasional. Keempat struktur ini membentuk dasar dari stabilitas dan pengaruh negara dalam sistem ekonomi global. Negara yang menguasai produksi dan distribusi barang serta mengelola sektor keuangan dengan efektif akan memiliki posisi tawar yang kuat dalam perdagangan internasional dan hubungan ekonomi dengan negara lain.

Selain itu, kekuatan dalam bidang keamanan juga memainkan peran krusial dalam menentukan dominasi suatu negara di kancah global. Negara yang mampu menjaga stabilitas domestik dan melindungi kepentingan internasionalnya dengan kekuatan militer dan keamanan yang terjamin akan memperkuat posisinya dalam geopolitik. Dengan menguasai keempat struktur ini, negara tidak hanya mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi global, tetapi juga dapat menentukan arah perkembangan ekonomi dunia serta memperkuat dominasi mereka atas negara-negara lain.

7.4 Pemikiran Ekonomi Politik: Robert Gilpin

Robert Gilpin (1930-2018) adalah seorang akademisi Amerika yang terkenal di bidang ekonomi politik internasional, di mana ia memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika hubungan antara negara, pasar, dan aktor global lainnya. Sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang ini, Gilpin mengembangkan teori-teori yang menggali interaksi antara ekonomi global

dan kekuatan politik, serta menganalisis bagaimana perubahan dalam sistem internasional dapat mempengaruhi struktur ekonomi dunia. Pemikirannya banyak berfokus pada globalisasi, peran negara dalam ekonomi internasional, serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di tengah perkembangan ekonomi yang terus berubah.

Gilpin mencoba menggabungkan beberapa aliran pemikiran, seperti realisme merkantilis, liberalisme, dan marxisme, untuk memahami kompleksitas ekonomi politik domestik dan internasional. Dengan pendekatan eklektik ini, ia berusaha menganalisis dinamika hubungan antara negara, pasar, dan aktor-aktor global dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Ia melihat bagaimana kekuatan politik dan ekonomi berinteraksi, mempengaruhi kebijakan negara, serta membentuk sistem ekonomi global. Integrasi berbagai teori tersebut memungkinkan Gilpin untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang peran negara dalam perekonomian dunia (Gilpin, 2001). Hal ini juga memberinya wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi negara dalam menghadapi perubahan sistem internasional yang terus berkembang. Dengan pendekatannya, Gilpin memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana ekonomi global dapat dipengaruhi oleh kebijakan domestik dan dinamika kekuatan internasional.

Menurut Gilpin, negara merupakan aktor utama dalam perekonomian, baik domestik maupun internasional. Negara berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi di dalam dan luar negeri. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, sektor bisnis, dan kelompok lainnya, yang kemudian mengikuti arahan yang ditetapkan oleh negara (Gilpin, 2001). Negara memiliki kontrol yang signifikan dalam menentukan arah perekonomian, baik melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun perdagangan. Dengan peran sentral ini, negara tidak hanya memengaruhi ekonomi domestik, tetapi juga memainkan posisi penting dalam ekonomi global.

Sebagai pendekatan yang relevan, sebaiknya memiliki *state-centric realist* yang menekankan pada konsep "self-help," di mana negara bertindak untuk mengantisipasi dan mengelola potensi ancaman yang ada baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai aktor utama yang harus mampu melindungi kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Negara diharapkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri dengan memperkuat kemampuan militer, ekonomi, serta institusi politik (Gilpin, 2001). Dalam menghadapi ancaman dari luar maupun tantangan domestik, negara harus proaktif dalam membangun kekuatan dan strategi pertahanan yang efektif. Pendekatan ini juga menganggap

bahwa konflik dan persaingan kekuatan antara negara-negara adalah bagian dari dinamika yang tak terhindarkan dalam sistem internasional. Dengan mengutamakan keamanan dan kemandirian, negara dapat mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan dalam menghadapi situasi yang terus berubah.

7.5 Pandangan Utama Robert Gilpin

1. Dual Economy

Gilpin membedakan antara ekonomi tradisional dan ekonomi modern berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Ekonomi tradisional lebih fokus pada produksi untuk kebutuhan domestik, dengan efisiensi yang cenderung rendah dan terbatas pada pasar lokal. Sementara itu, ekonomi modern berorientasi pada efisiensi yang tinggi, di mana teknologi dan inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, ekonomi modern juga berfokus pada kompetisi global, dengan negara-negara berusaha untuk bersaing di pasar internasional (Gilpin, 2001). Perbedaan ini mencerminkan perubahan besar dalam cara negara dan masyarakat mengelola sumber daya serta berinteraksi dalam ekonomi global.

Menurut Gilpin, ekonomi modern cenderung menggantikan ekonomi tradisional dengan cara yang lebih efisien dan terintegrasi. Ekonomi modern mengurangi biaya transaksi melalui teknologi dan inovasi, yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi menjadi lebih cepat dan murah. Hal ini juga meningkatkan integrasi ekonomi global, di mana negara-negara semakin terhubung dan saling bergantung satu sama lain (Gilpin, 2001). Dengan adanya globalisasi, pasar-pasar domestik pun semakin terpengaruh oleh dinamika ekonomi internasional. Akibatnya, ekonomi modern mendorong perubahan struktural yang signifikan dalam cara negara dan pelaku ekonomi beroperasi di tingkat global.

Ekonomi modern dipandang akan menggantikan ekonomi tradisional karena pendekatannya yang lebih efisien dan berfokus pada globalisasi. Dalam sistem ekonomi modern, teknologi dan inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya transaksi. Dengan demikian, pasar menjadi lebih terbuka dan saling terhubung, mempercepat pertukaran barang, jasa, dan informasi. Integrasi ekonomi global pun semakin kuat, seiring berkurangnya hambatan perdagangan antarnegara. Oleh karena

itu, ekonomi modern memungkinkan terciptanya sistem ekonomi yang lebih terintegrasi dan kompetitif di tingkat internasional.

Sebagai konsekuensinya, ekonomi modern mendorong persaingan yang lebih ketat di antara produsen. Dengan semakin banyaknya produk yang tersedia di pasar global, produsen diharuskan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi guna bertahan dalam kompetisi. Hal ini menciptakan dinamika baru di mana persaingan antarprodusen menjadi lebih intens, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis di tingkat domestik maupun internasional.

Ekonomi cenderung dikendalikan oleh pasar, di mana mekanisme penawaran dan permintaan memainkan peran utama dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Dalam sistem pasar, kompetisi harga menjadi faktor penting yang mendorong produsen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar. Hal ini menciptakan dinamika di mana pasar dapat berfungsi dengan lebih optimal, memungkinkan terciptanya alokasi sumber daya yang lebih efisien. Semakin berkurangnya biaya transaksi menjadi salah satu ciri utama dalam perkembangan ekonomi modern. Dengan adanya teknologi, proses transaksi menjadi lebih cepat dan murah, memungkinkan pelaku ekonomi untuk berinteraksi secara lebih efisien di pasar global. Pengurangan biaya transaksi ini juga mempermudah perusahaan dan individu untuk berpartisipasi dalam pasar internasional, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Berkembangnya integrasi ekonomi atau kerja sama ekonomi antarnegara juga menjadi dampak dari semakin terbukanya pasar global. Negara-negara semakin terhubung satu sama lain melalui perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi yang saling mendukung. Kerja sama ini mendorong terciptanya pasar yang lebih besar dan lebih terdiversifikasi, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi global.

2. *Modern World System*

Dunia saat ini terbagi menjadi dua kelompok besar negara, yaitu negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara maju memiliki keunggulan dalam hal teknologi, modal, dan kekuatan ekonomi yang besar, sementara negara-negara berkembang seringkali kekurangan sumber daya dan akses ke pasar global. Hal ini menciptakan ketimpangan yang jelas, di mana negara maju cenderung mendominasi baik dalam

perdagangan internasional maupun dalam pengambilan keputusan ekonomi global. Sebaliknya, negara-negara berkembang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah, bergantung pada ekspor bahan mentah dan sumber daya alam yang harganya dipengaruhi oleh kekuatan pasar internasional yang dikendalikan oleh negara maju.

Pasar internasional menjadi sarana utama bagi negara-negara maju untuk mengeksploitasi negara-negara berkembang. Negara maju memiliki akses lebih besar ke teknologi canggih dan kemampuan produksi yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan aliran barang, jasa, dan modal di pasar global. Sementara itu, negara berkembang seringkali terjebak dalam posisi yang kurang menguntungkan, hanya sebagai pengeksport bahan mentah atau tenaga kerja dengan nilai tambah yang rendah. Ketergantungan ini membuat negara berkembang kesulitan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional, yang pada akhirnya memperburuk ketergantungan ekonomi mereka terhadap negara-negara maju (Gilpin, 2001).

Akibatnya, kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang semakin melebar. Negara-negara maju terus menguasai teknologi dan kapital, sementara negara-negara berkembang sering kali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pasar global yang dinilai hanya mementingkan kepentingan negara majua. Ketimpangan ini membuat terdapatnya kesenjangan yang semakin besar antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, untuk mampu bertahan dalam kondisi yang diciptakan ini diperlukannya kemampuan setiap negara terutama negara ekonomi berkembang untuk membangun negara dengan mengandalkan kemampuannya sendiri atau yang dikenal juga dengan istilah *self help* (Gilpin, 2001). Kemampuan ini harus selalu dibangun oleh negara agar negara dapat terhindar dari tekanan yang didapat dari kehadiran neagara maju yang senantiasa menjaga pengaruhnya terhadap negara berkembang. Ide ini memperlihatkan salah satu bentuk nilai pemikiran marxisme yang diadopsi oleh Rober Gilpin kedalam penemuannya pada *Modern World System theory*.

3. *Hegemonic Stability Theory*

Gilpin berpendapat bahwa stabilitas ekonomi politik internasional hanya dapat tercapai jika terdapat satu kekuatan dominan atau hegemon yang memimpin dan mengatur sistem global. Menurutnya, hegemon memiliki peran penting dalam menetapkan aturan permainan di pasar internasional, memastikan bahwa negara-negara lain mengikuti

pedoman yang ditetapkan, dan menjaga keteraturan dalam hubungan ekonomi antarnegara. Tanpa adanya kekuatan dominan, sistem ekonomi global cenderung tidak stabil, dengan ketidakpastian dan ketegangan yang dapat memicu konflik dan krisis. Hegemon yang kuat mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk kerjasama internasional dan mengurangi gesekan antarnegara. Dengan demikian, kekuatan dominan dianggap esensial untuk menjaga kedamaian dan keteraturan dalam ekonomi politik global (Gilpin, 2001).

Setelah Perang Dingin, Amerika Serikat berperan sebagai hegemon yang menjaga stabilitas sistem global dengan mengatur banyak aspek ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Sebagai kekuatan dominan, Amerika memimpin dalam merumuskan kebijakan global dan mempertahankan tatanan internasional yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan pasar bebas. Namun, kemunculan kekuatan-kekuatan baru seperti China dan Rusia mulai mengancam stabilitas ini, karena kedua negara tersebut semakin meningkatkan pengaruhnya di panggung global dan menantang dominasi Amerika dalam berbagai isu internasional. China, dengan kekuatan ekonomi dan militernya yang terus berkembang, serta Rusia, dengan pendekatan geopolitik yang agresif, berusaha memperluas pengaruh mereka, yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan internasional dan merubah dinamika geopolitik yang sebelumnya didominasi oleh Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan tatanan internasional yang telah ada.

Dengan adanya satu negara yang paling dominan dalam sistem internasional, seperti yang terjadi pada era pasca-Perang Dingin dengan dominasi Amerika Serikat, negara hegemon tersebut dapat berfungsi sebagai pengontrol yang menjaga stabilitas global dan mengatur hubungan antarnegara. Namun, kondisi ini juga rentan terhadap intervensi yang tidak diinginkan dari negara hegemon terhadap negara-negara lain, yang sering kali memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur kebijakan dalam negeri negara lain sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Intervensi semacam ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, karena negara yang terintervensi sering kali merasa kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dominasi satu negara juga berisiko menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan dari negara-negara lain yang merasa dirugikan atau terpinggirkan dalam sistem internasional yang didominasi oleh hegemon tersebut. Karena itu, meskipun hegemon dapat menjaga stabilitas, keberlanjutan tatanan internasional yang adil dan seimbang tetap menjadi tantangan yang besar.

7.6 Kesimpulan

Meskipun pemikiran ekonomi politik Susan Strange dan Robert Gilpin memiliki fokus yang berbeda, keduanya sepakat bahwa negara tetap menjadi aktor kunci dalam perekonomian internasional. Strange lebih menekankan pada pentingnya struktur-struktur kekuatan dalam ekonomi politik, yang mencakup kontrol atas produksi, keuangan, dan keamanan untuk menjaga stabilitas ekonomi global. Sementara itu, Gilpin menyoroti peran negara sebagai pengatur utama dan stabilisator dalam tatanan global, yang bertugas mengelola hubungan antarnegara dan memitigasi ketegangan ekonomi yang timbul. Menurut kedua pemikir, negara memiliki peran yang tak tergantikan dalam memastikan bahwa sistem ekonomi internasional berjalan dengan adil dan stabil. Oleh karena itu, peran negara harus dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan yang memungkinkan tercapainya kestabilan dan keadilan dalam ekonomi politik internasional.

Kedua pemikiran ekonomi politik ini dinilai relevan dalam memahami dinamika ekonomi politik internasional saat ini. Misalnya, dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan perubahan geopolitik, negara-negara perlu memperkuat struktur kekuatannya, baik melalui pengembangan teknologi, peningkatan keamanan, maupun kerjasama ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti China dan India, konsep stabilitas hegemonik Gilpin menjadi penting dalam memahami perubahan keseimbangan kekuatan global. Dengan demikian, pemikiran Susan Strange dan Robert Gilpin memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika ekonomi politik internasional. Konsep-konsep mereka tetap relevan dalam menganalisis tantangan global saat ini dan peran negara dalam ekonomi dunia.

7.6 Latihan dan Refleksi

1. Apakah ide utama pada pemikiran ekonomi politik menurut Susan Strange dan Robert Gilpin?
2. Bagaimana penerapan teori struktur kekuatan Susan Strange dalam konteks ekonomi digital saat ini?
3. . Apakah teori hegemonic stability masih relevan di era multipolar seperti sekarang? Jelaskan dengan contoh konkret.
4. Apakah dominasi negara maju terhadap negara berkembang dalam sistem ekonomi global masih terjadi? Diskusikan dengan menggunakan teori Modern World System dari Gilpin.

7.8 Glosarium

1. Ekonomi Politik Internasional: Studi tentang interaksi antara negara, pasar, dan aktor-aktor non-negara dalam konteks global.
2. Structural Power: Konsep yang dikembangkan oleh Susan Strange untuk menjelaskan sumber-sumber kekuatan dalam ekonomi politik internasional, yang mencakup struktur produksi, keuangan, keamanan, dan pengetahuan.
3. Dual Economy: Konsep yang dikemukakan oleh Robert Gilpin yang membedakan antara ekonomi tradisional yang berfokus pada produksi domestik dengan efisiensi rendah dan ekonomi modern yang berorientasi pada efisiensi tinggi dan kompetisi global.
4. Modern World System: Teori Gilpin yang menjelaskan hubungan dominasi negara maju terhadap negara berkembang dalam tatanan ekonomi global.
5. Hegemonic Stability Theory: Teori yang menyatakan bahwa stabilitas ekonomi politik internasional hanya dapat dicapai jika ada satu kekuatan dominan yang mengatur sistem global.

7.9 Penugasan: Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Susan Strange dan Robert Gilpin

Instruksi:

1. Refleksi Individu (1-2 Halaman)

Tugas Anda: Pilih salah satu konsep utama dari Susan Strange atau Robert Gilpin, seperti Structural Power Theory atau Hegemonic Stability Theory. Jelaskan konsep tersebut secara singkat dan refleksikan bagaimana penerapannya dalam konteks global saat ini. Berikan contoh spesifik untuk menunjukkan bagaimana pemikiran ini masih relevan atau tidak relevan dengan situasi ekonomi dan politik internasional modern, misalnya terkait teknologi digital atau persaingan ekonomi antarnegara.

2. Analisis Kritis (1-2 Halaman)

Tugas Anda: Bandingkan pandangan Susan Strange mengenai Structural Power dengan pandangan Robert Gilpin mengenai Modern World System. Analisis bagaimana kedua konsep ini memberikan perspektif berbeda tentang dominasi ekonomi global oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang. Diskusikan relevansi kedua perspektif tersebut dalam menjelaskan hubungan ekonomi saat ini antara negara maju dan negara berkembang.

3. Studi Kasus Aplikasi (1-2 Halaman)

Situasi Kasus: Bayangkan Anda adalah seorang ekonom yang ditugaskan untuk menganalisis pengaruh teknologi digital terhadap stabilitas ekonomi global. Gunakan konsep Structural Power dari Susan Strange untuk menjelaskan bagaimana penguasaan atas teknologi digital dapat membentuk kekuatan ekonomi dan politik global. Bagaimana negara-negara yang mengendalikan teknologi ini mempengaruhi negara-negara lain, khususnya dalam konteks perdagangan, keamanan, dan pengembangan ekonomi?

Batasan Waktu: 2 Minggu

Format Pengumpulan:

Dokumen PDF dengan nama file: "Penugasan_Bab7_NamaMahasiswa.pdf"

BAB VIII
PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK
ISLAM KLASIK

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran ekonomi politik Islam klasik

Menjelaskan

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW

Menjelaskan

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin

Menjelaskan

Pemikiran ekonomi Islam pasca masa Khulafaur Rasyidin

BAB VIII

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK ISLAM KLASIK

8.1 Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam merupakan sebuah pemikiran ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi dalam masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Disiplin ini berusaha untuk mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi dengan tuntunan syariat Islam, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui sistem ekonomi yang sesuai dengan norma-norma agama. Dalam ekonomi Islam, perhatian diberikan pada konsep-konsep seperti distribusi kekayaan yang adil, larangan riba (bunga), penekanan pada transaksi yang transparan dan adil, serta kewajiban untuk memperhatikan kepentingan sosial dan etika dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan secara holistik bagi individu dan masyarakat.

Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan seimbang. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial diutamakan dalam berbagai transaksi ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya mementingkan keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Al-Qaradawi, 2022). Sebagai contoh, larangan terhadap riba dan praktik eksploitasi, serta kewajiban berbagi melalui zakat dan infak, mencerminkan upaya untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial.

Implementasi ekonomi Islam sering kali bervariasi tergantung pada penafsiran ulama dan pemikir terhadap ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, Hadis, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Hal ini menyebabkan konsep ekonomi Islam terus berkembang dan mengalami perubahan dalam aplikasinya, sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi

yang berlaku di berbagai masyarakat (Ikit & Saleh, 2022). Sebagai contoh, praktik ekonomi Islam di negara-negara Timur Tengah mungkin berbeda dengan penerapannya di negara-negara Asia Tenggara atau Barat, tergantung pada bagaimana ulama dan pemikir menginterpretasikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, distribusi kekayaan, dan larangan terhadap riba. Seiring berjalannya waktu, dinamika ekonomi global dan kemajuan teknologi juga mendorong terciptanya pemikiran-pemikiran baru dalam ekonomi Islam, yang mencoba menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang untuk menjawab kebutuhan zaman dan memastikan relevansi prinsip-prinsipnya dalam konteks yang lebih luas.

8.2 Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kehidupan masyarakat diatur secara menyeluruh berdasarkan wahyu dan Sunnah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Periode ini dikenal sebagai revolusi sosial, politik, dan ekonomi yang membawa perubahan mendalam dalam struktur masyarakat Arab pada waktu itu. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip Islam diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana aspek-aspek ekonomi diatur tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan kolektif. Ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam Islam bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mengenai membangun hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat.

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan berbagai kebijakan ekonomi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Dalam konteks ini, Nabi SAW mempromosikan ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, yang berbeda dengan sistem ekonomi yang ada pada masa itu, yang sering kali didominasi oleh ketidakadilan dan eksploitasi. Salah satu langkah penting yang diambil Nabi adalah pembentukan kesepakatan antara kaum Muhajirin dan Anshar melalui Piagam Madinah, yang memberikan landasan hukum dan sosial bagi masyarakat Madinah untuk hidup bersama secara harmonis dan saling membantu dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik (Al-Qaradawi, 2022).

Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW juga menghapuskan praktik-praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti riba (bunga), penipuan dalam jual beli, dan ketidakjelasan

dalam transaksi perdagangan. Semua bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam sistem ekonomi tradisional pada masa itu digantikan dengan sistem yang lebih transparan dan adil, yang mengedepankan prinsip saling membantu dan menjaga kepentingan bersama (Muhamad, 2022). Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan sistem yang seimbang dan berkelanjutan, di mana hak-hak individu dan masyarakat dilindungi, serta praktik ekonomi dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Prinsip dasar ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW antara lain:

1. Allah SWT sebagai Pemilik Segala Sesuatu

Manusia hanyalah khalifah yang mengelola kekayaan di bumi. Oleh karena itu, kekayaan tidak boleh ditimbun dan harus didistribusikan secara adil.

2. Larangan Riba

Eksplorasi dalam segala bentuknya dilarang, termasuk riba yang merupakan tambahan yang tidak adil dalam transaksi utang piutang.

3. Redistribusi Kekayaan

Nabi Muhammad SAW menerapkan zakat sebagai kewajiban untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, sistem warisan juga berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan untuk mengeliminasi konflik individu.

Nabi Muhammad SAW juga membentuk lembaga keuangan pertama dalam Islam, yaitu Baitul Mal, yang berfungsi untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara secara transparan dan bertanggung jawab. Baitul Mal tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga mengelola berbagai sumber daya ekonomi lainnya, seperti harta rampasan perang, pajak, dan sumbangan sukarela dari masyarakat (Muhamad, 2022). Lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekayaan negara dikelola dengan cara yang adil, digunakan untuk kepentingan umat, dan didistribusikan untuk membantu mereka yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan para janda.

Baitul Mal menjadi cikal bakal sistem keuangan Islam yang lebih kompleks di masa-masa berikutnya, dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang terus diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan adanya Baitul Mal, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya pengelolaan harta negara dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan kekayaan, tetapi juga pada distribusi yang

adil dan pemerataan kesejahteraan (Al-Qaradawi, 2022). Sistem ini menjadi dasar bagi pengembangan lembaga keuangan Islam yang lebih modern, seperti bank syariah dan lembaga zakat, yang bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

8.3 Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar ash-Shidiq, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan mereka, pemikiran ekonomi Islam mulai berkembang seiring dengan penerapan ijtihad oleh para sahabat untuk mengatasi tantangan ekonomi yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Para khalifah tidak hanya melanjutkan kebijakan ekonomi yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berinovasi dan menyesuaikan hukum-hukum ekonomi Islam dengan kondisi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, seperti pengelolaan harta negara, distribusi kekayaan, dan pengaturan pasar (Chaudhry, 2020). Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi landasan bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih terstruktur dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umat.

1. Masa Abu Bakar ash-Shidiq

Pembentukan Baitul Mal dan pengukuhan zakat sebagai sumber pendapatan negara merupakan langkah penting dalam sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola pendapatan dan pengeluaran, dengan zakat sebagai salah satu sumber utamanya. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah kesetaraan dalam distribusi harta Baitul Mal, di mana kekayaan yang terkumpul dikelola dan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk membantu yang kurang mampu dan memenuhi kebutuhan sosial lainnya (Qotum & dkk, 2021). Kebijakan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan solidaritas dalam Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di kalangan umat.

2. Masa Umar bin Khatthab

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, penetapan anggaran untuk ghanimah (rampasan perang) dan kharaj (pajak tanah) menjadi bagian penting dari sistem keuangan negara, dengan dana yang terkumpul didistribusikan untuk berbagai keperluan, seperti pensiun, keluarga Nabi, dan pegawai negara. Selain itu, pada periode ini juga

diperkenalkan jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai bagian dari sistem perpajakan yang adil dan seimbang. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kestabilan keuangan negara, mendukung kebutuhan sosial, serta menjaga hubungan yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim dalam masyarakat yang beragam (Qotum & dkk, 2021).

3. Masa Utsman bin Affan

Pada masa ini, pemikiran ekonomi Islam lebih difokuskan pada reformasi administrasi dan distribusi tanah negara untuk tujuan reklamasi, dengan tujuan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam secara lebih efektif dan adil. Selain itu, dilaksanakan pula perubahan administrasi di tingkat pemimpin atas, yang bertujuan untuk memperkuat struktur pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan urusan negara (Qotum & dkk, 2021). Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya negara demi kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan lebih transparan dan terorganisir.

4. Masa Ali bin Abi Thalib

Pada masa ini, pemikiran Islam klasik ditandai dengan dilaksanakannya pendistribusian seluruh pendapatan yang ada di Baitul Mal kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pendapatan negara yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti pajak dan zakat, disalurkan secara merata kepada rakyat, termasuk kaum dhuafa, anak yatim, fakir miskin, dan kelompok-kelompok yang membutuhkan (Qoyum & dkk, 2021). Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam, di mana setiap individu berhak mendapatkan bagian dari kekayaan yang ada, sesuai dengan kebutuhan dan kontribusinya terhadap masyarakat.

8.4 Pemikiran Ekonomi Islam Pasca Masa Khulafaur Rasyidin

1. Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Fiqh Iqtishad

Masa ini dikenal sebagai masa pengembangan ilmu ekonomi Islam yang pesat, terutama melalui pemikiran para ulama dan ahli fiqh. Salah satu konsep utama yang muncul pada periode tersebut adalah fiqh iqtishad, yang berfokus pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, serta menolak segala bentuk kesenjangan sosial. Fiqh iqtishad menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan keadilan dalam berbisnis, di mana setiap

lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun miskin, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi (Hasan & Muin, 2013). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan umat.

Salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa fiqh iqtishad adalah Zaid bin Ali (738 M), yang dikenal sebagai penggagas awal konsep penjualan komoditas secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai. Konsep ini, yang dikenal dengan istilah jual beli dengan tangguh, bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki uang tunai untuk tetap dapat membeli barang yang dibutuhkan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip fiqh iqtishad yang lebih mengutamakan keadilan dalam transaksi ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dalam hal akses terhadap barang maupun dalam hal ketimpangan dalam transaksi jual beli (Hasan & Muin, 2013).

2. Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Kemapanan Ekonomi

Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diformalkan dan disusun dalam kitab-kitab khusus, yang mencakup berbagai aturan mengenai muamalah, zakat, dan sistem keuangan negara. Masa ini juga dikenal sebagai masa kemapanan ekonomi, di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai diterapkan secara sistematis dalam kehidupan masyarakat, menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual (Qoyum & dkk, 2021). Dalam periode ini, struktur ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil dan transparan menjadi prioritas utama, menghasilkan stabilitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat secara luas.

Tokeoh pemikiran ekonomi Islam pada masa ini diantaranya:

1. Abu Yusuf (731-798M)

Konsep pengendalian harga dalam ekonomi Islam berkembang dengan memperhatikan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai faktor utama yang menentukan harga pasar. Dalam hal ini, penetapan harga oleh penguasa dilarang karena dianggap dapat mengganggu keseimbangan pasar dan menghilangkan mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara alami. Prinsip ini menekankan bahwa harga seharusnya tercipta melalui interaksi bebas antara pembeli dan penjual, tanpa adanya campur tangan yang merusak kestabilan ekonomi (Hasibuan & dkk,

2020). Dengan demikian, pengendalian harga oleh pasar dianggap lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan kestabilan ekonomi, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keseimbangan dan transparansi.

2. Al-Awza'i (707-774 M)

Al-Awza'i merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, yang menggagas beberapa konsep ekonomi penting dalam kerangka hukum Islam. Di antaranya adalah kebolehan sistem muzara'ah, yang memungkinkan kerjasama antara pemilik modal dan petani dalam pembagian hasil pertanian, serta kebolehan peminjaman modal baik dalam bentuk tunai maupun barang, selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan menghindari unsur riba. Gagasan-gagasan Al-Awza'i ini memberikan dasar bagi praktik ekonomi Islam yang mendukung kerjasama yang saling menguntungkan dan menjaga keseimbangan dalam aktivitas ekonomi (Muhammad, 2002).

3. Malik bin Anas (712-796 M)

Mengusulkan bahwa pemerintah Islam memiliki hak untuk memungut pajak demi kepentingan umum, bahkan jika melebihi jumlah yang ditetapkan dalam syariah.

Pada masa ini diusulkan bahwa pemerintah Islam memiliki hak untuk memungut pajak demi kepentingan umum, bahkan jika jumlah pajak yang dipungut melebihi batas yang ditetapkan dalam syariat, selama tujuannya untuk kemaslahatan umat dan kepentingan masyarakat secara luas. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dalam kebijakan fiskal Islam, di mana kewenangan negara untuk mengumpulkan dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang mendesak, asalkan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan manfaat bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum menjadi prioritas, meskipun terkadang memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan syariat demi kepentingan yang lebih besar (Hasibuan & dkk, 2020).

8.5 Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Kebijakan Publik

Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini adalah penekanan pada pengelolaan belanja negara. Berikut adalah beberapa tokoh pemikiran ekonomi Islam pada masa kebijakan publik:

1. Al-Ghazali (1111 M)

Pemikiran ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial yang berlandaskan pada prinsip maslahat, yaitu kebaikan bersama yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam pandangan ini adalah penolakan terhadap praktik riba, yang dianggap berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Selain alasan agama yang menganggap riba sebagai dosa, argumen lain yang mendasari penolakan ini adalah dampak negatifnya terhadap masyarakat, di mana transaksi yang melibatkan riba dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, menguntungkan pihak yang lebih kuat sementara merugikan pihak yang lemah (Muhammad, 2002). Dengan demikian, ekonomi Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan, serta mengutamakan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam setiap bentuk interaksi ekonomi.

2. At-tussi (1201 M)

Pemikiran ekonomi Islam yang mendukung bahwa uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga instrumen keadilan dalam masyarakat. Sebagai medium yang menghubungkan berbagai transaksi ekonomi, uang harus digunakan secara adil dan transparan agar tidak terjadi penipuan atau ketidaksetaraan. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pertukaran uang antar individu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pemerintah diperlukan untuk mengawasi transaksi keuangan dan mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan pihak tertentu, seperti penimbunan atau penipuan, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pengawasan pemerintah dalam kegiatan ekonomi berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.

3. Ibnu Khaldun (1406 M)

Menurut Ibn Khaldun, terdapat empat teori utama dalam ekonomi yang saling terkait, yaitu teori produksi, teori nilai, uang, dan harga, teori distribusi, serta teori siklus ekonomi. Dalam pemikirannya, Ibn Khaldun menguraikan sebuah teori dinamis yang mencakup hukum populasi dan hukum keuangan publik, yang berperan penting dalam memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi saling berinteraksi dalam suatu masyarakat. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan populasi yang pesat dapat mendorong peningkatan permintaan, yang pada gilirannya mempengaruhi produksi dan distribusi barang. Selain itu, ia juga mengemukakan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik, untuk menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kemakmuran dalam masyarakat (Hasan & Muin, 2013). Pemikiran Ibn Khaldun ini

memberikan dasar bagi analisis ekonomi yang lebih holistik, menggabungkan aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang dinamis.

4. Al-Maqrizi (1441 M)

Pemikiran Al-Maqrizi mengenai fenomena ekonomi suatu negara berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi naik-turunnya stabilitas pemerintahan. Ia menyoroti bahwa masalah seperti korupsi, kebijakan pemerintah yang buruk dan tidak populer, serta administrasi yang lemah dapat memperburuk keadaan ekonomi negara. Dalam pandangannya, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola urusan negara dengan baik akan mengarah pada penurunan kepercayaan publik dan ketidakstabilan politik, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ibn Khaldun menekankan bahwa sebuah pemerintahan yang kuat, bersih dari korupsi, dan memiliki kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat adalah kunci untuk mencapai kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan (Hasan & Muin, 2013).

8.6 Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Fatwa

Pada masa ini, pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi, di mana para ulama lebih banyak merujuk pada pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh imam madzhab sebelumnya tanpa melakukan ijtihad baru yang signifikan. Keadaan ini menyebabkan perkembangan teori ekonomi Islam menjadi terbatas, karena tidak ada upaya yang cukup untuk menyesuaikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan dinamika dan tantangan zaman yang terus berubah. Alih-alih menggali solusi baru berdasarkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih modern, banyak ulama yang cenderung mempertahankan pandangan tradisional, sehingga pemikiran ekonomi Islam terkesan kurang berkembang dan tidak dapat menghadapi masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan yang inovatif.

Meskipun pada masa tersebut pemikiran ekonomi Islam cenderung stagnan, beberapa pemikir seperti Syah Waliullah (1702-1763 M) berusaha memperkenalkan konsep-konsep baru yang relevan dengan tantangan zaman. Syah Waliullah menekankan pentingnya tanggung jawab negara dalam mengatur ekonomi, serta memperkenalkan ide pajak sebagai salah satu cara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kejujuran moral dalam tatanan ekonomi, dengan menegaskan bahwa perilaku ekonomi yang adil dan transparan sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dan menghindari penindasan dalam masyarakat (Hasan & Muin, 2013). Pemikiran-pemikiran Syah Waliullah membuka jalan

bagi pengembangan konsep-konsep ekonomi Islam yang lebih progresif, meskipun masih dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang telah ada.

8.7 Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Islam klasik memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi yang adil dan seimbang, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan larangan terhadap praktik eksploitasi seperti riba. Meskipun konsep-konsep ini berasal dari masa lalu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kian meningkat. Prinsip-prinsip ini, yang menekankan distribusi kekayaan yang adil, tanggung jawab negara, serta pentingnya moralitas dalam transaksi ekonomi, menawarkan solusi terhadap masalah ketidakadilan dan kesenjangan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi saat ini. Oleh karena itu, ekonomi Islam klasik tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga potensi besar untuk berperan dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, ekonomi Islam klasik juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf menjadi cara untuk redistribusi kekayaan yang lebih adil dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kalangan yang rentan. Zakat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan langsung mengarahkan dana kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip gotong royong dan solidaritas yang terwujud dalam berbagai instrumen ekonomi Islam ini tidak hanya membantu meredam ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar di antara para pelaku ekonomi. Di tengah tantangan global saat ini, seperti kesenjangan pendapatan yang semakin melebar dan keterbatasan akses ke sumber daya, pendekatan ini memberikan alternatif yang komprehensif dan manusiawi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

8.8 Latihan dan Refleksi

1. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern yang sangat kompleks?

2. Apakah sistem keuangan Islam seperti Baitul Mal masih relevan diterapkan di negara-negara Muslim saat ini? Jelaskan dengan contoh.
3. Bagaimana konsep redistribusi kekayaan dalam Islam dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di negara-negara berkembang?
4. Apa peran ijtihad dalam mengembangkan ekonomi Islam kontemporer?

8.9 Glosarium

1. Baitul Mal: Lembaga keuangan yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dalam sistem ekonomi Islam.
2. Riba: Tambahan atau bunga yang diambil dalam transaksi pinjaman yang dianggap haram dalam Islam.
3. Fiqh Iqtishad: Pemikiran ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan anti-kesenjangan sosial.
4. Jizyah: Pajak yang dikenakan kepada non-Muslim di negara Islam sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan oleh negara.
5. Zakat: Kewajiban sedekah yang harus diberikan oleh umat Islam yang mampu kepada mereka yang membutuhkan.

8.10 Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Islam Klasik

Instruksi:

1. Refleksi Individu (1-2 Halaman)

Tugas Anda: Pilih salah satu periode ekonomi Islam klasik yang dibahas dalam Bab VIII (masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, masa Fiqh Iqtishad, masa Kemapanan Ekonomi, masa Kebijakan Publik, atau masa Fatwa). Refleksikan bagaimana konsep-konsep ekonomi pada masa tersebut dapat relevan dengan tantangan ekonomi yang ada saat ini, misalnya ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, atau keberlanjutan ekonomi. Berikan contoh spesifik untuk menunjukkan relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik di era modern.

2. Analisis Kritis (1-2 Halaman)

Tugas Anda: Bandingkan pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Analisis bagaimana perkembangan konsep ekonomi seperti redistribusi kekayaan, pengelolaan harta negara, dan penghapusan riba berbeda atau berkembang antara kedua periode tersebut. Diskusikan bagaimana prinsip-prinsip yang

diterapkan pada kedua periode ini dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara dan keadilan sosial.

3. Studi Kasus Aplikasi (1-2 Halaman)

Situasi Kasus: Bayangkan Anda adalah seorang ekonom yang ditunjuk sebagai penasihat untuk negara berkembang mayoritas Muslim yang sedang mengalami ketimpangan ekonomi yang parah dan dominasi pihak asing dalam sektor perbankan. Berdasarkan konsep Baitul Mal atau larangan riba pada masa klasik Islam, saran apa yang akan Anda berikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif? Jelaskan kebijakan yang akan diterapkan dan bagaimana hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Batasan Waktu: 2 Minggu

Format Pengumpulan:

Dokumen PDF dengan nama file: "Penugasan_Bab8_NamaMahasiswa.pdf"

BAB IX
PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK
ISLAM KONTEMPORER

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran ekonomi politik Islam kontemporer

Menjelaskan

Pemikiran ekonomi politik Islam: Abad ke 19 -20

Menjelaskan

Pemikiran ekonomi politik Islam: Abad ke 21

BAB IX

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK ISLAM KONTEMPORER

9.1 Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respons terhadap dominasi pemikiran ekonomi Barat, seperti kapitalisme dan sosialisme. Berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern, pemikiran ini bertujuan untuk menawarkan alternatif yang lebih adil dan beretika dalam mengelola sumber daya serta distribusi kekayaan, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial dan tanggung jawab moral.

Meskipun ekonomi Islam telah ada sejak lama, pemikiran ekonomi Islam kontemporer berupaya mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam ekonomi global saat ini, seperti eksploitasi sumber daya alam, ketidakadilan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Pemikiran ini berfokus pada pencarian solusi yang tidak hanya mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjamin kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam kontemporer berusaha menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan beretika dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di dunia ekonomi modern.

Pada masa ini, negara-negara Islam dihadapkan pada tantangan kolonialisme dan ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara Barat. Eksploitasi sumber daya alam dan penguasaan ekonomi oleh kekuatan kapitalis Barat membuat banyak pemikir Islam, seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Abduh, mengkritik model ekonomi yang ada dan mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi.

9.2 Pemikiran ekonomi politik Islam: Abad ke 19 -20

Dimulai dari abad ke-19 atau dikenal juga dengan masa modernisasi. Pada masa ini pemikiran ekonomi politik dunia juga telah dipengaruhi oleh pemikiran dari Barat dan bahkan jauh

menguasai perekonomian dan politik dunia. Walaupun eksistensi pemikiran ekonomi dan politik barat banyak diakui, namun masih ada beberapa tokoh ekonomi dan politik Islam yang memiliki pemikiran yang patut untuk dipelajari.

Tokoh Pemikiran Ekonomi Politik Islam Kontemporer

1. Jamaluddin al-Afghani (1839-1897)

Al-Afghani adalah salah satu pemikir awal yang mengkritik dominasi Barat atas dunia Islam. Ia menyatakan bahwa pada masa kolonialisme, negara-negara Barat tidak hanya menjajah secara fisik tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi. Al-Afghani menekankan pentingnya persatuan umat Islam untuk menghadapi dominasi ekonomi dan teknologi dari Barat. Menurutnya, negara-negara Islam perlu mengembangkan kekuatan ekonomi dan teknologinya sendiri untuk mencapai kemandirian (Muhammad, 2002)

2. Muhammad Iqbal (1877-1938)

Muhammad Iqbal mengkritik kapitalisme dan sosialisme sebagai sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam bukunya *Ilm-ul-iqtisad* (Ilmu Ekonomi), ia menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Iqbal menolak eksploitasi kapitalis yang hanya berfokus pada akumulasi modal dan menekankan bahwa zakat merupakan instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengkritik sosialisme yang menurutnya terlalu represif dan bertentangan dengan kebebasan individu yang diakui dalam Islam (Qoyum & dkk, 2021).

3. Muhammad Abduh (1849-1905)

Muhammad Abduh berpendapat bahwa negara harus terlibat aktif dalam ekonomi untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Ia mengecam perilaku zalim dalam ekonomi, seperti riba dan eksploitasi tenaga kerja. Abduh menekankan bahwa kekayaan harus digunakan untuk kepentingan umum dan negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi mendukung keadilan sosial, termasuk melalui pengaturan harga dan upah minimum (Qoyum & dkk, 2021).

9.3 Pemikiran Ekonomi Politik Abad 21

Karakteristik pemikiran ekonomi Islam pada masa ini ditandai oleh semangat kebangkitan kembali pada penerapan sistem ekonomi Islam yang telah ditinggalkan. Berikut adalah tokoh ekonomi politik Islam pada masa ini yaitu:

1. Muhammad Abdul Mannan

Ia menekankan pentingnya zakat dan sedekah dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Ia mengkritik kapitalisme yang berorientasi pada individualisme dan menolak konsep kekuasaan produsen maupun kekuasaan konsumen. Menurutnya, ekonomi Islam harus didasarkan pada moralitas dan etika yang menolak eksploitasi dan dominasi satu pihak atas pihak lain. Lebih lanjut Muhammad Abdul Mannan juga melihat bahwa Teori Marxis merupakan reaksi dari kapitalisme yang jika dilihat dapat dikatakan bahwa Marxis tidak lebih dari solusi yang belum jelas. Bahkan lebih jauh, teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, dimana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti (Harahap & Ridwan, 2016).

Pemikiran ekonomi politik Muhammad Abdul Mannan menekankan integrasi prinsip-prinsip Islam dengan sistem ekonomi untuk mencapai kemakmuran material dan spiritual. Gagasan-gagasan kuncinya meliputi: Mannan mengusulkan untuk memodifikasi teori-teori ekonomi konvensional untuk memasukkan nilai-nilai Islam, pengaturan kelembagaan, dan tujuan. Ia berpendapat bahwa dalam kerangka kerja Islam, kemakmuran ekonomi adalah sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral, bukan tujuan itu sendiri (Fachrodzi & harefa, 2022; Menita, 2017). Hal ini yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi modern lainnya dalam pandangan Mannan. Dalam hal kebijakan ekonomi, Mannan mendukung pendekatan yang seimbang yang menggabungkan elemen-elemen ekonomi tradisional dan pasar. Dia mengizinkan kepemilikan pribadi tetapi menekankan distribusi pendapatan yang adil untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti beberapa ekonom Islam lainnya, Mannan tidak menolak kekuatan pasar secara keseluruhan (Ainiyah et al., 2019). Rekomendasi kebijakan fiskalnya bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan yang adil dengan tetap menyeimbangkan nilai-nilai material dan spiritual (Menita, 2017). Mannan menekankan bahwa kegiatan produksi harus berorientasi pada keuntungan dan tujuan spiritual, memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Ia mengusulkan indikator objektif seperti peningkatan produksi dan indikator subjektif berdasarkan kepatuhan syariah untuk mengukur kesejahteraan (Faizah, 2019). Teori konsumsi Mannan juga menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan moral, menganjurkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kedermawanan, dan moralitas untuk memandu perilaku konsumsi (Indranata, 2022).

2. Muhammad Nejatullah Siddiqi

Siddiqi memperkenalkan konsep perbankan Islam dan mendorong pendirian Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Ia menekankan bahwa zakat dan sedekah harus menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Siddiqi juga mengembangkan teori "Islamic Man" yang mengacu pada individu yang mematuhi paradigma ekonomi Islam dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil (Harahap & Ridwan, 2016).

3. Monzer Kahf

Monzer Kahf menekankan bahwa ekonomi Islam harus berlandaskan pada prinsip etika yang kuat. Menurutnya, negara harus berperan aktif tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai partisipan dalam produksi dan distribusi untuk menjamin keadilan sosial. Ia menolak sistem ekonomi yang membiarkan kekuatan pasar beroperasi tanpa pengawasan, karena hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dan eksploitasi (Harahap & Ridwan, 2016).

4. Syed Nawab Haider Naqvi

Naqvi menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan etika Islam. Ia menolak kapitalisme dan sosialisme sebagai sistem yang tidak mampu memenuhi kebutuhan moral dan spiritual manusia. Naqvi berpendapat bahwa negara harus memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan (Harahap & Ridwan, 2016)

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berupaya menjawab tantangan modern seperti globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim. Dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan kesejahteraan bersama, ekonomi Islam menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi yang ada saat ini. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam praktik ekonomi modern yang didominasi oleh kapitalisme.

9.4 Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respons terhadap dominasi pemikiran ekonomi Barat seperti kapitalisme dan sosialisme. Berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern, pemikiran

ini bertujuan untuk menciptakan alternatif yang lebih adil dan beretika dalam mengelola sumber daya dan distribusi kekayaan, dengan menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial. Meskipun ekonomi Islam sudah ada sejak lama, pemikiran kontemporer berusaha mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam untuk menghadapi tantangan ekonomi global, seperti eksploitasi sumber daya, ketidakadilan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Pemikir-pemikir Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Abduh mengkritik ketergantungan ekonomi terhadap Barat dan mendorong penerapan nilai-nilai Islam untuk mencapai keadilan sosial serta kemandirian ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam kontemporer menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan beretika bagi tantangan ekonomi modern.

Pada abad ke-19, atau masa modernisasi, pemikiran ekonomi dan politik dunia sangat dipengaruhi oleh ideologi Barat, yang menguasai perekonomian dan politik global. Meskipun pemikiran Barat mendominasi, masih ada tokoh-tokoh ekonomi dan politik Islam yang memiliki pemikiran penting untuk dipelajari. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini ditandai oleh semangat kebangkitan kembali sistem ekonomi Islam yang sebelumnya ditinggalkan. Ekonomi Islam kontemporer berusaha menjawab tantangan-tantangan modern seperti globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim, dengan prinsip keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan kesejahteraan bersama. Tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik ekonomi modern yang didominasi oleh kapitalisme.

9.5 Latihan dan Refleksi

1. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat diterapkan dalam sistem ekonomi global yang saat ini didominasi oleh kapitalisme?
2. Apakah sistem perbankan syariah mampu menjadi alternatif yang efektif terhadap sistem perbankan konvensional? Jelaskan dengan contoh konkret.
3. Bagaimana peran zakat dan sedekah dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial di negara-negara Muslim?
4. Apakah intervensi negara yang diusulkan oleh pemikir ekonomi Islam kontemporer sesuai dengan prinsip-prinsip pasar bebas? Mengapa?

9.6 Glosarium

1. Zakat: Sedekah wajib yang harus diberikan oleh umat Islam yang mampu kepada mereka yang membutuhkan.
2. Riba: Tambahan atau bunga yang diambil dalam transaksi pinjaman yang dianggap haram dalam Islam.
3. Mudharabah: Kontrak kerjasama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.
4. Islamic Man: Konsep yang dikembangkan oleh Siddiqi yang merujuk pada individu yang mematuhi nilai-nilai ekonomi Islam dalam setiap keputusan ekonomi.
5. Bank Syariah: Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan spekulasi.

9.7 Penugasan: Refleksi dan Analisis Pemikiran Ekonomi Politik Islam Kontemporer

Instruksi:

1. Refleksi Individu (1-2 Halaman)

Tugas Anda: Pilih salah satu tokoh ekonomi politik Islam kontemporer yang dibahas dalam Bab IX (Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, atau Syed Nawab Haider Naqvi). Jelaskan pemikiran ekonomi yang diusung oleh tokoh tersebut dan refleksikan bagaimana konsep tersebut relevan atau tidak relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, globalisasi, dan perubahan iklim. Berikan contoh konkret untuk mendukung refleksi Anda.

2. Analisis Kritis (1-2 Halaman)

Tugas Anda: Bandingkan pemikiran ekonomi politik Islam dari dua tokoh berbeda yang hidup di abad ke-19 hingga ke-20 (misalnya, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Iqbal) dengan dua tokoh di abad ke-21 (misalnya, Monzer Kahf dan Muhammad Nejatullah Siddiqi). Diskusikan bagaimana perbedaan konteks sejarah memengaruhi pemikiran ekonomi mereka, terutama dalam hal tujuan ekonomi, peran negara, dan mekanisme distribusi kekayaan. Jelaskan bagaimana ide-ide dari keempat tokoh ini dapat saling melengkapi untuk membentuk sebuah model ekonomi Islam yang lebih holistik.

3. Studi Kasus Aplikasi (1-2 Halaman)

Situasi Kasus: Bayangkan Anda adalah seorang ekonom yang bekerja untuk pemerintah sebuah negara mayoritas Muslim yang sedang menghadapi masalah ketimpangan sosial yang tinggi dan dominasi ekonomi oleh investor asing. Berdasarkan pemikiran ekonomi salah satu tokoh Islam kontemporer yang Anda pelajari, saran apa yang akan Anda berikan kepada pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi dan keadilan sosial? Jelaskan kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan, seperti reformasi zakat, pengurangan ketergantungan terhadap investor asing, atau pembentukan bank syariah. Gunakan argumen yang kuat untuk mendukung keputusan Anda.

Batasan Waktu: 2 Minggu

Format Pengumpulan:

Dokumen PDF dengan nama file: "Penugasan_Bab9_NamaMahasiswa.pdf"

BAB X

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK

SOCIAL ECOLOGICAL MARKET ECONOMY (SEME)

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda dapat:

Mengidentifikasi

Pemikiran ekonomi politik Social Market Economy (SME)

Menjelaskan

Kemunculan pemikiran ekonomi politik

Social Market Economy (SME)

Menjelaskan

Nilai Utama Social Market Economy (SME)

Menjelaskan

Implementasi Ekonomi Pasar Sosial di Jerman

Menjelaskan

Social Ecological Market Economy (SEME)

Menjelaskan

Tantangan Social Ecological Market Economy (SEME)

BAB X

PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK SOCIAL ECOLOGICAL MARKET ECONOMY (SEME)

10.1 Pendahuluan

Ekonomi Pasar Sosial (Social Market Economy atau SME) adalah sebuah konsep ekonomi yang berusaha menggabungkan prinsip pasar bebas dengan tanggung jawab sosial. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di Jerman setelah Perang Dunia II oleh Ludwig Erhard, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan kemudian menjadi Kanselir Jerman. Erhard menyadari pentingnya menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan perlindungan sosial untuk membangun kembali ekonomi Jerman yang hancur akibat perang. Dengan menerapkan konsep ini, Jerman dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial warganya.

Ekonomi pasar sosial bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap perdebatan panjang antara model ekonomi kapitalis yang cenderung mementingkan kebebasan pasar, dan model sosialis yang lebih menekankan pada kontrol negara terhadap ekonomi. SME menawarkan solusi tengah dengan memadukan mekanisme pasar yang efisien dengan perlindungan sosial untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan akses yang lebih merata terhadap kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Van Hook, 2004). Sebagai hasilnya, ekonomi pasar sosial berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang mengutamakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhir Perang Dunia II, Jerman berada dalam keadaan ekonomi yang kacau balau dengan tingkat inflasi yang tinggi dan pengangguran yang meluas. Dalam situasi yang penuh kesulitan ini, terjadi perdebatan sengit antara dua kelompok utama mengenai arah ekonomi negara. Kelompok sosialis mengusulkan perluasan peran negara, termasuk nasionalisasi sektor industri dan perbankan, sebagai cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Mereka percaya bahwa intervensi negara yang lebih besar dapat mengontrol ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata (Muresan, 2014).

Namun, Ludwig Erhard, yang berasal dari kubu liberalis, menentang gagasan tersebut dan mengusulkan pendekatan yang berbeda. Erhard memperkenalkan konsep ekonomi pasar sosial

sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi Jerman. Berbeda dengan sosialisme, ekonomi pasar sosial menggabungkan prinsip pasar bebas dengan tanggung jawab sosial, menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan perlindungan sosial (Petring, 2012). Erhard percaya bahwa dengan membuka pasar dan mengurangi intervensi negara, sambil tetap memberikan perlindungan sosial yang memadai, Jerman dapat memulihkan perekonomiannya secara berkelanjutan.

Sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, Ludwig Erhard memutuskan untuk menerapkan konsep ekonomi pasar sosial, yang menggabungkan kebebasan pasar dengan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, Erhard berusaha menciptakan sistem yang memungkinkan pelaku ekonomi untuk berinovasi dan bersaing secara bebas, namun tetap dalam batas-batas yang mengutamakan keadilan sosial (Petring, 2012). Dengan demikian, ekonomi pasar sosial bukan hanya tentang efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konsep ini juga dikenal dengan nama ordoliberalisme atau neoliberalisme Jerman, yang menekankan pentingnya peran negara sebagai pengawas yang memastikan kompetisi berjalan sehat dan menghindari praktik-praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan pasar. Negara, dalam model ini, tidak terlibat langsung dalam mengelola ekonomi, tetapi berfungsi untuk menciptakan kerangka hukum dan institusi yang mendukung pasar bebas sekaligus melindungi kepentingan sosial. Dengan pendekatan ini, Erhard berupaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dalam pasar dan tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan sosial serta stabilitas ekonomi.

10.2 Nilai Utama Social Market Economy (SME)

Berikut adalah tiga nilai utama yang dimiliki oleh pemikiran ekonomi Sosial Market Economy (SME) yaitu:

1. Nilai individualisme sesuai dengan prinsip pemikiran liberalisme yaitu kebebasan bagi setiap individu. Nilai individualisme yang sejalan dengan prinsip liberalisme, mengutamakan kebebasan setiap individu untuk membuat keputusan ekonomi secara mandiri. Konsep ini memberikan ruang bagi individu untuk berinovasi dan bersaing dalam pasar bebas, namun dengan batasan yang mengedepankan keadilan sosial. Kedua, nilai

sosial yang menekankan pentingnya saling ketergantungan antarindividu dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan sosial. Ketiga, nilai subsidi atau bantuan negara, yang berperan dalam memastikan terciptanya hubungan yang baik antarindividu serta mendukung tercapainya kehidupan sosial yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

2. Nilai sosial yaitu setiap manusia atau masyarakat akan membutuhkan manusia lainnya atau saling membutuhkan dengan mengedepankan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nilai sosial dalam ekonomi pasar sosial menekankan pentingnya saling ketergantungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Setiap manusia, dalam kehidupan sosialnya, saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, nilai sosial ini mengedepankan prinsip keadilan, di mana setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam kerangka ini, keadilan sosial menjadi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab bersama, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau dirugikan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi.
3. Nilai subsidi/bantuan yaitu negara membantu dan mengatur agar terciptanya hubungan yang baik antara setiap individu yang ada dalam masyarakat dan berjalannya kehidupan sosial yang lebih baik. Nilai subsidi atau bantuan dalam pemikiran ekonomi Social Market Economy (SME) menekankan peran negara dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara individu-individu dalam masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memberikan bantuan yang diperlukan guna memastikan terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik dan lebih adil. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasar, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan memberikan subsidi atau bantuan, negara dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mendukung terciptanya kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

Pemikiran ekonomi Social Market Economy (SME) mengedepankan tiga nilai utama yang saling mendukung: individualisme, nilai sosial, dan subsidi negara. Nilai individualisme memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat keputusan ekonomi secara mandiri, namun tetap diatur untuk mencegah ketimpangan. Nilai sosial menekankan pentingnya

saling bergantung antarindividu dalam masyarakat, dengan keadilan sosial sebagai prinsip utama agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi. Sementara itu, nilai subsidi atau bantuan negara memastikan bahwa hubungan antarindividu berjalan dengan baik, dengan negara berperan aktif dalam memberikan perlindungan sosial dan menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan kebutuhan sosial.

10.3 Implementasi Social Market Economy (SME) di Jerman

Pada awal penerapannya, *Social Market Economy* (SME) atau ekonomi pasar sosial berhasil membangkitkan kembali perekonomian Jerman yang hancur pasca perang. Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Erhard mencakup deregulasi harga, pengurangan kontrol pemerintah atas sektor ekonomi, serta dukungan terhadap inisiatif swasta. Di sisi lain, pemerintah juga memperkenalkan sistem jaminan sosial yang kuat, termasuk asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran, untuk melindungi masyarakat dari ketidakpastian ekonomi.

Keberhasilan Jerman dalam menerapkan ekonomi pasar sosial tidak terlepas dari dukungan Marshall Plan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk membangun kembali ekonomi Eropa yang hancur akibat perang. Dengan dukungan dana ini, Jerman mampu membangun infrastruktur, memperbaiki sektor industri, dan menciptakan lapangan kerja baru (Abelshauer, 1997). Keberhasilan ini menjadikan Jerman sebagai model bagi negara-negara Eropa lainnya dalam mengembangkan perekonomian yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial.

10.4 Social Ecological Market Economy (SEME)

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep ekonomi pasar sosial mengalami penyesuaian untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim. Pada tahun 1970-an, muncul gerakan yang mendorong integrasi nilai-nilai lingkungan ke dalam ekonomi pasar sosial, yang kemudian dikenal sebagai *Social Ecological Market Economy* (SEME). SEME mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada efisiensi pasar, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, SEME menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi pasar sosial dengan kesadaran ekologis, berusaha menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan demi masa depan yang lebih lestari.

Konsep Social Ecological Market Economy (SEME) menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam SEME, isu-isu seperti kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, dan pengelolaan limbah menjadi perhatian utama, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan atau memperburuk ketimpangan sosial (Petring, 2012). Dengan mengintegrasikan pertimbangan ekologis dalam kerangka ekonomi pasar sosial, SEME berupaya menciptakan sistem yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

10.5 Tujuan Social Ecological Market Economy (SEME)

Social Ecological Market Economy (SEME) dinilai memiliki tujuan yang cukup kompleks karena tidak hanya menyentuh ranah ekonomi dan sosial namun juga mengusung nilai-nilai lingkungan yang berkelanjutan. Terlihat bahwa SEME mencoba menggabungkan semua unsur penting yang dapat membangun ekonomi negara sejara adil dan berkelanjutan. Berikut adalah tujuan utama *Social Ecological Market Economy* (SEME) :

1. Kesejahteraan untuk Semua (Welfare for All)

Tujuan utama ekonomi pasar sosial adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Meskipun kesetaraan absolut tidak mungkin dicapai, pemerintah berusaha untuk meminimalkan kesenjangan melalui kebijakan redistribusi pendapatan dan program sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan kunci utama bagi sebuah pembangunan ekonomi. Meskipun kesetaraan absolut tidak mungkin dicapai, karena setiap individu memiliki peran dan kapasitas ekonomi yang berbeda, konsep ini berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda (Siebert, 2014). Dalam sistem ekonomi pasar sosial, kebebasan pasar tetap dijaga untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, namun prinsip keadilan sosial menjadi fokus utama agar hasil dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan redistribusi pendapatan dan program sosial yang bertujuan untuk mendukung mereka yang kurang beruntung. Program-program ini mencakup bantuan sosial, subsidi, serta akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, meskipun ekonomi pasar sosial mengakui peran pasar dalam

menciptakan efisiensi, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan sosial tetap terjaga dan kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan.

2. Keadilan Sosial (Social Justice)

Ekonomi pasar sosial berupaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, terutama melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam distribusi sumber daya dan layanan publik.

Keadilan sosial merupakan sebuah kondisi yang dapat menjadi dasar penting bagi berjalannya ekonomi negara. Dalam kerangka ini, ekonomi pasar sosial mengakui bahwa peluang untuk berkembang harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang memastikan setiap individu, tanpa diskriminasi, dapat memanfaatkan potensi penuh mereka melalui akses yang adil terhadap berbagai layanan dan peluang ekonomi.

Pemerintah dalam sistem ekonomi pasar sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam distribusi sumber daya dan layanan publik. Ini mencakup penerapan kebijakan yang mengurangi ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan kerja yang adil bagi semua warga negara. Dengan cara ini, ekonomi pasar sosial berusaha menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan menikmati hasilnya (Petring, 2012).

3. Keseimbangan Lingkungan (Environmental Compatibility)

Ekonomi pasar sosial yang berkelanjutan harus memperhitungkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, mengingat bahwa keberlanjutan jangka panjang tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan untuk menjaga ekosistem dan sumber daya alam. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak bisa hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologis untuk memastikan bahwa alam tetap dapat mendukung kehidupan di masa depan (Siebert, 2014). Pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan ramah lingkungan menjadi bagian penting dari kerangka ekonomi pasar sosial berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan regulasi yang mendukung keberlanjutan, seperti kebijakan perlindungan lingkungan dan insentif untuk praktik bisnis yang ramah lingkungan. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan untuk mengadopsi model bisnis yang mengedepankan keberlanjutan dan inovasi hijau, sementara masyarakat turut berperan dalam menjaga kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. Dengan kolaborasi yang erat antara ketiga pihak ini, ekonomi pasar sosial dapat menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian alam bagi generasi mendatang.

10.6 Implementasi SEME di Berbagai Sektor

Konsep Ekonomi Pasar Sosial dan Ekologi (SEME) menggabungkan efisiensi ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk di berbagai negara dan sektor, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Dalam SEME, pasar diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sebuah ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan SEME, namun konsep ini menawarkan solusi yang holistik dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi di masa depan.

Di sektor perikanan, SEME dipandang sebagai pendekatan penting untuk menyeimbangkan keberlanjutan sumber daya, manfaat ekonomi, dan kesejahteraan sosial nelayan. Instrumen untuk mengimplementasikan SEME di sektor perikanan meliputi peraturan yang mendukung, meningkatkan ekonomi pasar lokal, menciptakan jaringan kerja sama, dan membentuk kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan (Kaya & Sajriawati, 2023). Demikian pula, dalam industri pariwisata, pajak lingkungan telah digunakan sebagai sarana regulasi ekonomi yang efektif untuk mempromosikan pariwisata yang ramah lingkungan dan pengembangan ekonomi pariwisata dan lingkungan ekologi yang harmonis (Zou, 2019). Implementasi SEME di sektor perikanan dan pariwisata merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan peningkatan ekonomi pasar lokal, diharapkan dapat tercipta kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pariwisata yang berkelanjutan. Pajak lingkungan juga menjadi instrumen efektif dalam mengatur industri pariwisata agar lebih berwawasan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Menariknya, konsep SEME telah diusulkan sebagai model potensial untuk penyatuan kembali antara Korea Selatan dan Korea Utara, mengingat keberhasilannya dalam memberikan kemakmuran, pertumbuhan, dan kohesi sosial di Eropa selama 70 tahun terakhir (Park, 2021). Namun, penerapan kebijakan pengendalian lingkungan dapat menyebabkan efek tata kelola yang tidak merata dan ketidaksetaraan kesejahteraan sosial, sehingga menyoroti perlunya pertimbangan yang cermat terhadap eksternalitas, kekuatan pasar, dan preferensi konsumen ketika menerapkan kebijakan tersebut (Wang & Lu, 2019). Sebagai contoh, pembatasan industri yang berpotensi merusak lingkungan dapat mengurangi lapangan kerja bagi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Selain itu, kebijakan yang memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan dapat memperkuat posisi pasar perusahaan besar dan mengorbankan kepentingan konsumen dan produsen kecil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor tersebut agar kebijakan SEME dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. SEME telah diterapkan di berbagai sektor dan negara, yang menunjukkan potensinya untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, keberhasilan penerapannya membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap konteks lokal, struktur pasar, dan instrumen kebijakan untuk memastikan hasil yang adil dan berkelanjutan.

10.7 Tantangan Social Ecological Market Economy (SEME)

1. Globalisasi

Tantangan utama yang dihadapi oleh Social Ecological Market Economy (SEME) adalah dampak globalisasi, yang dapat mengurangi peran negara dalam mengatur perekonomian domestik. Dengan adanya globalisasi, banyak keputusan ekonomi yang kini dipengaruhi oleh pasar internasional dan kebijakan global, yang kadang sulit dikendalikan oleh negara. Hal ini menuntut penyesuaian kebijakan ekonomi pasar sosial agar tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan dinamika global. SEME harus memastikan bahwa meskipun pasar global terus berkembang, prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan peran negara dalam mengawasi ekonomi domestik tetap terjaga, sehingga tujuan kesejahteraan bersama dan pelestarian sumber daya alam dapat tercapai meskipun dalam konteks ekonomi global yang semakin terhubung.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi Social Ecological Market Economy (SEME), karena dampaknya dapat mengancam keberlanjutan ekonomi dan ekosistem global (Benecke, 2008). Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. SEME menuntut adanya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan, di mana kebijakan-kebijakan yang diambil harus mendorong praktik ekonomi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, pemerintah berperan penting dalam menciptakan regulasi yang dapat mengarahkan ekonomi ke jalur yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.

3. Masalah Demografi

Masalah demografi menjadi tantangan penting bagi Social Ecological Market Economy (SEME), terutama dengan adanya peningkatan migrasi, rendahnya angka kelahiran di negara maju, serta tantangan kesehatan dan keamanan sosial. Peningkatan migrasi membawa dampak pada struktur pasar tenaga kerja, sistem sosial, dan layanan publik, sementara rendahnya angka kelahiran di negara maju mengarah pada penuaan populasi yang dapat membebani sistem jaminan sosial dan kesehatan. Di sisi lain, tantangan kesehatan dan keamanan sosial juga memerlukan perhatian lebih, karena dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan produktivitas ekonomi (Benecke, 2008). Untuk mengatasi masalah ini, SEME membutuhkan kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh isu sosial dan demografi, dengan memastikan inklusi sosial, pengelolaan sumber daya manusia yang optimal, serta perlindungan bagi kelompok yang rentan dalam masyarakat.

10.8 Kesimpulan

Secara keseluruhan, Social Market Economy (SME) menawarkan sebuah kerangka ekonomi yang seimbang antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial. Diperkenalkan oleh Ludwig Erhard pasca-Perang Dunia II, konsep ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata melalui kebebasan ekonomi yang terkontrol, serta perlindungan bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Dengan memberikan ruang bagi pasar bebas untuk

mendorong inovasi dan pertumbuhan, SME juga menekankan perlunya kebijakan redistribusi dan program sosial untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini menjadikan ekonomi pasar sosial sebagai alternatif yang lebih inklusif dibandingkan dengan model kapitalis atau sosialis yang ekstrem.

Selain itu, konsep ekonomi pasar sosial ini juga mengalami perkembangan untuk menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, seperti globalisasi dan perubahan iklim. Social Ecological Market Economy (SEME), yang muncul pada 1970-an, berusaha mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam kerangka ekonomi pasar sosial. SEME menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem sebagai bagian dari kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari efisiensi pasar, tetapi juga dari bagaimana dampak lingkungan dapat diminimalkan dan bagaimana keberlanjutan sumber daya alam dapat dijaga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, SEME mencoba menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh SEME adalah dinamika global yang cepat berubah, seperti dampak globalisasi, perubahan iklim, dan masalah demografi. Globalisasi dapat mengurangi peran negara dalam mengatur perekonomian domestik, sementara perubahan iklim membutuhkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Masalah demografi, termasuk migrasi dan penurunan angka kelahiran, juga menambah kompleksitas dalam penerapan SEME. Untuk itu, SEME membutuhkan kebijakan yang adaptif dan inklusif, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan, serta memastikan keberlanjutan ekosistem. Dengan pendekatan yang holistik, SEME berupaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

10.9 Latihan dan Refleksi

1. Bagaimana penerapan ekonomi pasar sosial dapat menyeimbangkan antara kebebasan pasar dan keadilan sosial dalam konteks globalisasi saat ini?
2. Apakah ekonomi pasar sosial dapat menjadi model bagi negara berkembang? Berikan contoh penerapannya di negara berkembang.
3. Bagaimana tantangan lingkungan dan perubahan iklim dapat diatasi dalam kerangka kerja SEME?

4. Apa peran pemerintah dalam memastikan keadilan sosial dalam ekonomi pasar sosial? Dengan demikian, ekonomi pasar sosial menawarkan sebuah kerangka kerja yang fleksibel dan seimbang dalam mengatur perekonomian modern. Konsep ini memungkinkan negara untuk menggabungkan kekuatan pasar dengan perlindungan sosial dan lingkungan, sehingga dapat menjadi model alternatif bagi negara-negara yang ingin mencapai kesejahteraan bersama.

10.10 Glosarium

1. Ekonomi Pasar Sosial (Social Market Economy): Sistem ekonomi yang menggabungkan kebebasan pasar dengan perlindungan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil.
2. Subsidiaritas: Prinsip yang menyatakan bahwa keputusan ekonomi sebaiknya diambil pada tingkat terendah yang memungkinkan, kecuali jika diperlukan intervensi pada tingkat yang lebih tinggi.
3. Ordo-liberalisme: Pemikiran ekonomi yang berasal dari Jerman yang menggabungkan prinsip-prinsip liberalisme dengan intervensi negara yang terbatas untuk menjaga keseimbangan pasar.
4. Social Ecological Market Economy (SEME): Transformasi dari ekonomi pasar sosial yang memasukkan nilai-nilai lingkungan dalam kerangka kerja ekonomi dan sosial.
5. Marshall Plan: Program bantuan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia II.

10.11 Penugasan: Refleksi dan Analisis Social Ecological Market Economy (SEME)

Instruksi:

1. Refleksi Individu (1-2 Halaman)

- **Tugas Anda:** Pilih satu dari tiga nilai utama Social Market Economy (SME): *Individualisme*, *Nilai Sosial*, atau *Subsidi/Bantuan Negara*. Refleksikan bagaimana nilai tersebut berperan dalam mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Jelaskan apakah nilai tersebut masih relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di era modern ini, seperti globalisasi atau perubahan iklim. Berikan argumen yang mendukung pendapat Anda, dengan mencantumkan contoh konkret.

2. Analisis Kritis (1-2 Halaman)

- **Tugas Anda:** Lakukan analisis kritis mengenai perbedaan antara Social Market Economy (SME) dan Social Ecological Market Economy (SEME). Diskusikan

bagaimana kedua konsep ini berevolusi dari fokus pada ekonomi sosial menuju integrasi nilai lingkungan. Bandingkan dampak dari dua pendekatan ini terhadap kebijakan sosial dan lingkungan dalam suatu negara. Berikan contoh kebijakan yang menunjukkan perbedaan antara SME dan SEME dalam konteks praktiknya di dunia nyata.

3. Studi Kasus Aplikasi (1-2 Halaman)

- **Situasi Kasus:** Negara Anda menghadapi tantangan ketidakstabilan ekonomi akibat perubahan iklim, serta tingginya tingkat ketimpangan sosial. Sebagai seorang ekonom modern, saran apa yang akan Anda berikan kepada pemerintah berdasarkan konsep SEME? Gunakan konsep *keseimbangan lingkungan*, *keadilan sosial*, dan *kesejahteraan untuk semua* yang menjadi tujuan SEME untuk merumuskan kebijakan konkret.
- **Panduan Studi Kasus:** Sebutkan kebijakan yang harus diterapkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial. Jelaskan bagaimana peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Batasan Waktu: 2 Minggu

Format Pengumpulan:

- Dokumen PDF dengan nama file: "*Penugasan_Bab10_NamaMahasiswa.pdf*"

Petunjuk Pengumpulan:

- Kirimkan dokumen ke platform pembelajaran online yang telah disediakan oleh dosen atau melalui email yang akan diinformasikan

BAB XI

PENUTUP

Buku ini telah membawa pembaca dalam perjalanan intelektual yang mendalam tentang transformasi pemikiran ekonomi politik dari era pra-klasik hingga konsep-konsep modern yang relevan dengan dinamika global saat ini. Pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh besar seperti Xenophon, Plato, Aristoteles, hingga tokoh modern seperti Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, dan Milton Friedman memberikan wawasan historis yang kaya tentang bagaimana teori ekonomi politik berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep ekonomi politik tidak hanya menjelaskan hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial dalam setiap era. Pemikiran pra-klasik, misalnya, menekankan hubungan antara ekonomi dan etika dalam mengelola masyarakat yang adil. Era merkantilisme mencerminkan kebutuhan negara-negara untuk mengamankan kekayaan melalui penguasaan perdagangan global, sedangkan ekonomi klasik dan keynesianisme menandai era baru dengan fokus pada efisiensi pasar dan intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi.

Dalam konteks kontemporer, buku ini mengangkat isu-isu yang semakin relevan, seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan tantangan globalisasi. Pendekatan modern seperti Social Ecological Market Economy (SEME) menjadi salah satu landasan penting untuk memahami bagaimana ekonomi dapat diatur secara berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial. Bab tentang pemikiran ekonomi politik Islam klasik dan kontemporer juga menambahkan dimensi penting dalam memahami kontribusi Islam dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis tetapi juga menekankan pentingnya aplikasi praktis dari pemikiran ekonomi politik. Melalui pembahasan studi kasus dan analisis kritis dalam berbagai bab, pembaca diajak untuk menghubungkan teori dengan realitas, seperti dalam analisis kebijakan proteksionis, pengaruh media dalam ekonomi global, atau dampak reformasi kebijakan ekonomi di berbagai negara. Dengan pendekatan ini, buku ini diharapkan

dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang ingin memahami interaksi kompleks antara ekonomi dan politik dalam konteks lokal maupun global.

Sebagai refleksi, buku ini menegaskan bahwa ekonomi politik bukan sekadar disiplin yang membahas tentang kekayaan atau perdagangan, tetapi juga tentang bagaimana manusia hidup bersama, merancang kebijakan, dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori yang telah dijelaskan dalam buku ini dapat menjadi landasan penting untuk berkontribusi dalam pengembangan solusi terhadap isu-isu global kontemporer.

Kami menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca untuk pengembangan edisi berikutnya. Kami berharap buku ini dapat menjadi pijakan awal yang kuat untuk menggali lebih dalam tentang pemikiran ekonomi politik dan aplikasinya dalam kehidupan nyata.

Terima kasih atas perhatian dan dedikasi pembaca dalam mempelajari buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumber pengetahuan yang berkelanjutan bagi semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, D. N., Fachri, A. Z., & Abidin, M. Z. (2019). Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 47–73. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73>
- Al-Qaradawi, Y. (2022). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Alvey, J. E. (2011a). The ethical foundations of economics in ancient Greece, focussing on Socrates and Xenophon. *International Journal of Social Economics*, 38(8), 714–733. <https://doi.org/10.1108/03068291111143910>
- Alvey, J. E. (2011b). The ethical foundations of economics in ancient Greece, focussing on Socrates and Xenophon. *International Journal of Social Economics*, 38(8), 714–733.
- Alvey, J. E. (2011c). The foundations of the ethical tradition of economics: Plato's Republic. *International Journal of Social Economics*, 38(10), 824–846. <https://doi.org/10.1108/03068291111170389>
- Ambler, W. (1996). On the Oeconomicus. Xenophon. *The Shorter Socratic Writings. Apology of Socrates to the Jury, Oeconomicus, and Symposium*. Translations, with Interpretive Essays and Notes, Ed. by Robert C. Bartlett, 102–131.
- Apridar. (2013). *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*. Graha Ilmu.
- Arevuo, M. (2023). Adam Smith's moral foundations of self-interest and ethical social order. *Economic Affairs*, 43(3), 372–387. <https://doi.org/10.1111/ecaf.12592>
- Avineri, S. (2019). *Karl Marx*. Yale University Press.
- Bank, W. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. The World Bank.
- Banta, J. E. (1987). Sir William Petty: Modern epidemiologist (1623–1687). *Journal of Community Health*, 12, 185–198.
- Benecke, D. W. (2008). *Social and ecological market economy: A general overview*. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
- Bernanke, B. S. (2015). *The courage to act: A memoir of a crisis and its aftermath*. W.W. Norton & Company.
- Brownson, C. L., Todd, O. J., & Marchant, E. C. (1925). *Xenophon: in seven volumes (Vol. 51)*. W. Heinemann.
- Chaudhry, M. S. (2020). *Sistem ekonomi Islam: Prinsip dasar*. Prenada Media.
- Cohen, C. L. (1993). The Christopher Columbus Encyclopedia. *The Sixteenth Century Journal*, 24(3), 709–711. <https://doi.org/10.2307/2542130>

- Cooper, J. M. (1985). Aristotle on the Goods of Fortune. *The Philosophical Review*, 94(2), 173. <https://doi.org/10.2307/2185427>
- Deliarinov, E. (2018). *Perkembangan pemikiran ekonomi*. Rajawali Press.
- DeLong, B. J. (2001). *Macroeconomics: A modern approach*. McGraw-Hill Education.
- Douglass, R. (2023). A Moral Philosophy for Commercial Society? In *Interpreting Adam Smith* (pp. 124–141). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009296335.009>
- Ekelund Jr, R. B., & Hébert, R. F. (2013). *A history of economic theory and method*. Waveland Press.
- Enciso, A. G. (2016). *War, Power and the Economy: Mercantilism and state formation in 18th-century Europe*. Routledge.
- Engels, F. (2007). *Tentang DAS KAPITAL Marx* (E. Cahyono, Ed.).
- European Commission. (2021, November 24). *EU agriculture statistics: subsidies, jobs, production (infographic)*. European Commission.
- Fachrodzi, A. Al, & harefa, P. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sdfuq>
- Faizah, F. N. (2019). *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi*. SERAMBI: *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 55–68. <https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.71>
- Faruq, A., & Mulyanto, A. (2017). *Teori ekonomi dan pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi*. Rajawali Press.
- Figueira, T. J. (2012). Economic thought and economic fact in the works of Xenophon. In *Xenophon: Ethical Principles and Historical Enquiry* (pp. 665–687). Brill.
- Fontanel, J., Hebert, J., & Samson, I. (2008). THE BIRTH OF THE POLITICAL ECONOMY OR THE ECONOMY IN THE HEART OF POLITICS: MERCANTILISM. *Defence and Peace Economics*, 19(5), 331–338. <https://doi.org/10.1080/10242690802354279>
- Fotak, V., Megginson, W. L., & Tsai, Y.-D. (2022). *Is China's Belt and Road Initiative a Zero-Sum Game?* BAFFI CAREFIN Centre Research Paper, 2022–184.
- Friedman, M. (2016). *Capitalism and freedom*. In *Democracy: a reader* (pp. 344–349). Columbia University Press.
- Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963). *A monetary history of the United States, 1867–1960*. Princeton University Press.

- Fritze, R. H. (2007). Maritime Exploration in the Age of Discovery, 1415-1800. *The Sixteenth Century Journal*, 38(4), 1145–1146. <https://doi.org/10.2307/20478689>
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press.
- Goldsmith, A. A. (1995). The State, The Market and Economic Development: A Second Look at Adam Smith in Theory and Practice. *Development and Change*, 26(4), 633–650. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1995.tb00568.x>
- Hague, R., Harrop, M., & Breslin, S. (1992). The Nation-State in One World. In *Comparative Government and Politics* (pp. 100–132). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22276-6_5
- Harahap, I., & Ridwan, M. (2016). *The handbook of Islamic economics*. FEBI UIN-SU Press.
- Hasan, M. (2020). *Teori Ekonomi Makro: Perspektif Moneteris dan Keynesian*. Penerbit Ekonomi Utama.
- Hasan Khaeriyah, H., & Muin, R. (2013). *Fiqh iqtishad ekonomi Islam: Kerangka dasar, studi tokoh, dan kelembagaan ekonomi*. Alauddin University.
- Hasibuan, S. W., Ash Shiddieqy, H., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Fajri, M. Z. N., Wadud KA, H. A. M., Utomo, Y. T., Surepno, S., Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, R., Adnir, H. F., & Mubarrok, U. S. (Eds.). (2020). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. CV. Media Sains Indonesia.
- Hetzel, L. (2013). The Monetarist revolution in economic policy. *Economic Quarterly*, 99(3), 189-206.
- Ikit & Saleh, M. (2022). *Pengantar ekonomi Islam*. Gava Media.
- Indranata, C. J. (2022). Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi dalam Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 59–81. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1094>
- Karstenson, L. (2003). The Merchant and Mr. Reagan: *The American Journal of Economics and Sociology*, 62(3), 567–582. <https://doi.org/10.1111/1536-7150.00228>
- Kaya, I. R. G., & Sajriawati, S. (2023). SEME (SOCIAL AND ECOLOGYCAL MARKET ECONOMY) TERHADAP KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)*, 7(1), 32–39. <https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.32>

- Khalil, E. L. (2023). Adam Smith's Theory of Moral Sentiments. *Topoi*, 42(5), 1257–1262. <https://doi.org/10.1007/s11245-023-09959-6>
- Krugman, P. (2009). *The return of depression economics and the crisis of 2008*. W.W. Norton & Company.
- Krugman, P., & Wells, R. (2024). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Kopylov, A. V., & Moskovtsev, A. F. (2013). Aristotle economy and modern times annotation. *Middle East Journal of Scientific Research*, 14(8), 1070–1078.
- Kurz, H. D. (2016). David Ricardo (1772–1823). In *Handbook on the History of Economic Analysis Volume I*. Edward Elgar Publishing.
- Lloyd, H. A. (2023). Early Views on the Economic Role of the State. In *Monitoring the State or the Market* (pp. 10–16). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009434430.004>
- Luckett, D. (1984). Money and Banking. In McGraw-Hill, *Money and Banking* (pp. 65-70). New York: 3rd ed.
- Lux, D. S. (2013). Jean-Baptiste Colbert. In *The 17th and 18th Centuries* (pp. 336–340). Routledge.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- McCusker, J. J. (1996). British Mercantilist Policies and the American Colonies. In *The Cambridge Economic History of the United States* (pp. 337–362). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521394420.009>
- McNeill, D. (1990). Alternative interpretations of Aristotle on exchange and reciprocity. *Public Affairs Quarterly*, 4(1), 55–68.
- McNulty, P. J. (1975). A Note on the Division of Labor in Plato and Smith. *History of Political Economy*, 7(3), 372–378. <https://doi.org/10.1215/00182702-7-3-372>
- Meikle, S. (1979). Aristotle and the political economy of the polis. *The Journal of Hellenic Studies*, 99, 57–73. <https://doi.org/10.2307/630632>
- Menita, H. A. (2017). Pemikiran abdul mannan tentang ekonomi islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Miller, F. D. (1998). Was Aristotle the First Economist? *Apeiron*, 31(4). <https://doi.org/10.1515/APEIRON.1998.31.4.387>
- Mitchell, D. (2004). Historical materialism and Marxism. *A Companion to Cultural Geography*, 49–65.

- Muresan, S. S. (2014). *Social market economy: The case of Germany*. Springer International Publishing.
- Muhamad. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. UPP STIM YKPN
- Muhammad, A. H. (2002). *Studi dasar pemikiran Islam*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Muhammad Hasan, M. D. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Kota Bandung - Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Natali, C. (1995). 'Oikonomia' in the hellenistic political thinking. In *Justice and Generosity*, ed. by A. Laks & M. Schofield (pp. 95–128). Cambridge University Press.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Raja Grafindo Persada.
- Niu, J. (2023). US-China Trade War Effects on The Economy of The United States. *BCP Business & Management*, 38, 21–27. <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v38i.3665>
- O'Brien, D. P. (2003). Classical economics. A Companion to the History of Economic Thought, 112–129.
- Ozler, Ş. (2024). The Moral Value of Social Shame in Adam Smith's The Theory of Moral Sentiments. *Journal of Scottish Philosophy*, 22(1), 37–55.
- Palley, T. (2017). The general theory at 80: Reflections on the history and enduring relevance of Keynes' economics. *Cambridge Journal of Economics*, 76, 100–101.
- Park, C.-B. (2021). Social market economy and welfare in Europe and Korea. In *The Routledge Handbook of Europe–Korea Relations* (pp. 191–201). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429491351-18>
- Perrotta, C. (2023). Mercantilism. In *Economic Policy and the History of Economic Thought* (pp. 34–52). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003228097-3>
- Petring, A., et al. (2012). *Social democracy reader 3: Welfare state and social democracy*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Piketty, T. (2013). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Pomeroy, S. B. (1994). *Oeconomicus: A Social and Historical Commentary, with a New English Translation*.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Dwi Pusparini, F. M., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Rayward, L. (2022). CONCEPTII SOCIAL-POLITICE ALE ANTICHITĂŢII GRECEŞTI. In *Educație și valori în societatea contemporană*. Editura Eikon. <https://doi.org/10.56177/epvl.cap4.2022.ro>

- Reinert, E. S. (1999). The role of the state in economic growth. *Journal of Economic Studies*, 26(4/5), 268–326. <https://doi.org/10.1108/01443589910284903>
- Rosenberg, N. (1965). Adam Smith on the Division of Labour: Two Views or One? *Economica*, 32(126), 127. <https://doi.org/10.2307/2552544>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics*. McGraw-Hill Education.
- Shanlin, W. (2018). The Root of American Trade Protectionism: Using its Form Evolution of Mercantilism as Clues. *Journal of Finance and Economics*, 44(12), 18–30.
- Siebert, H. (2014). *The German economy: Beyond the social market*. Princeton University Press.
- Skinner, A. S. (1989). Adam Smith. In *The Invisible Hand* (pp. 1–42). Springer.
- Skinner, A. S. (2001). Smith, Adam (1723–90). In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 14189–14195). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/00338-7>
- Smith, L. V. (2023). The Rise and Fall of the Mercantilist Empire. In *French Colonialism* (pp. 6–37). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108874489.004>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. (1988). *Economics of the Public Sector* WW Norton & Company. New York.
- Strange, S. (1988). *States and markets*. Pinter Publishers.
- Strauss, L. (1970a). Xenophon’s Socratic discourse: an interpretation of the *Oeconomicus*. (No Title).
- Strauss, L. (1970b). Xenophon’s Socratic discourse: an interpretation of the *Oeconomicus*. (No Title).
- Sukirno, S. (2013). *Teori ekonomi makro*. Rajawali Press.
- Sweezy, P. M. (1985). After Capitalism—What? *Monthly Review*, 37(3), 98. https://doi.org/10.14452/MR-037-03-1985-07_6
- Utami, N. M., Siahaan, M. B., Tarigan, D., & Yanti, M. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*.
- Van Hook, J. C. (2004). *Rebuilding Germany: The creation of the social market economy, 1956-1957*. Cambridge University Press.
- van Berkel, T. A. (2024). Xenophon on Money and Its Right Use. In *The Palgrave Handbook of Philosophy and Money: Volume 1: Ancient and Medieval Thought* (pp. 263–289). Springer.

- Wang, L., & Lu, J. (2019). Analysis of the Social Welfare Effect of Environmental Regulation Policy Based on a Market Structure Perspective and Consumer. *Sustainability*, 12(1), 104. <https://doi.org/10.3390/su12010104>
- Zhang, J. (2021). On Plato's Virtue Education for the Defenders of the City-States: A Study Based on the Text of the Ideal State. *Frontiers in Educational Research*, 4(13). <https://doi.org/10.25236/FER.2021.041315>
- Zou, L. (2019). The Research on Influence of Tourism Economy and Environment Based on Environmental Taxation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 252, 042056. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/252/4/042056>



Maryam Jamilah, adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Lahir di Bukittinggi tanggal 07 Maret 1992. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Andalas dan melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia, dengan spesialisasi dalam Kajian Timur Tengah dan Islam. Saat ini, beliau juga aktif melakukan penelitian dan pengajaran dengan fokus utama pada Kebijakan Luar Negeri dan Gender.



Silvi Cory, adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Lahir di Balai Selasa tanggal 21 April 1986. Saat ini aktif mengajar, meneliti dan menulis dengan fokus kajian Ekonomi Politik Global. Untuk menghubungi bisa melalui email silvicory@soc.unand.ac.id